

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR : 02 Tahun 2022**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus dipertanggungjawabkan setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana laporan keuangan yang disusun sebanyak tujuh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dimaksudkan sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran (TA) 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut.

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;

- f) Menyediakan informasi mengenai potensi untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dalam mendanai aktivitas.

## **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6279);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

### **3. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan**

Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- a. **Pendahuluan**  
 Bab ini memuat tentang Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA2021.
- b. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target kinerja APBD**  
 Bab ini menguraikan tentang asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya, memuat faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang berdampak pada perubahan anggaran, perubahan kebijakan keuangan sehingga menyebabkan perubahan terhadap posisi Laporan Keuangan.

- c. **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**  
Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran pencapaian program/kegiatan.
- d. **Kebijakan Akuntansi**  
Dalam bab ini disajikan tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, juga menerangkan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- e. **Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**  
Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan akan disajikan secara kuantitatif dalam bab ini, seperti pos-pos laporan realisasi anggaran, neraca, serta laporan arus kas dari masing-masing aktivitas.
- f. **Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan**  
Memaparkan informasi tentang hal-hal yang belum dijelaskan dalam pos-pos laporan keuangan, seperti domisili dan dasar hukum, sifat operasi entitas, penggabungan atau pemekaran suatu entitas ditahun berjalan, serta kejadian yang mempunyai dampak sosial atau menyangkut kondusifitas daerah yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.
- g. **Penutup**  
Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan penting tentang laporan keuangan.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena adanya kenaikan *output* secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Kenaikan PAD ini jika dibelanjakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, baik atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah merupakan gambaran potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 sebesar Rp47.837 milyar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp47.348 milyar ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp489 juta dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 sebesar Rp48.710 milyar mengalami peningkatan sebesar Rp1.362 milyar jika dibandingkan dengan tahun 2020.

**Tabel 2.1**  
**PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2019 - 2021 (Milyar Rupiah).**

<b>Kategori</b>	<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020*)</b>	<b>2021 **)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.925	16.052	16.025
B	Pertambangan dan Penggalian	2.208	2.281	2.235
C	Industri Pengolahan	11.301	10.777	1.1443
D	Pengadaan Listrik dan Gas	56	60	62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16	17	19
F	Konstruksi	5.389	5.279	5.615
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.136	4.939	5.120
H	Transportasi dan Pergudangan	1.330	1.274	1.305
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	489	464	457
J	Informasi dan Komunikasi	1.931	2.051	2.182
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	720	747	765
L	Real Estate	938	909	927
M,N	Jasa Perusahaan	49	49	50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	720	750	779
P	Jasa Pendidikan	1.109	1.162	1.181
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	251	279	288
R,S,T,U	Jasa lainnya	269	258	257
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>47.837</b>	<b>47.348</b>	<b>48.710</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (diolah)*  
*Keterangan: 2020\*): angka sementara*  
*2021\*\*): angka sangat sementara*

**Tabel 2.2**  
**PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2019 - 2021 (Milyar Rupiah)**

Kategori	Uraian	2019	2020*)	2021 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.592	25.180	25.419
B	Pertambangan dan Penggalian	3.486	3.658	3.649
C	Industri Pengolahan	16.807	16.176	17.560
D	Pengadaan Listrik dan Gas	69	74	80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24	26	28
F	Konstruksi	7.586	7.391	8.137
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.175	7.047	7.468
H	Transportasi dan Pergudangan	1.905	1.855	1.952
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	825	788	782
J	Informasi dan Komunikasi	2.361	2.488	2.589
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.115	1.156	1.237
L	Real Estate	1.366	1.345	1.392
M,N	Jasa Perusahaan	82	82	85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.201	1.260	1.311
P	Jasa Pendidikan	1.644	1.739	1.817
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	373	417	440
R,S,T,U	Jasa lainnya	407	388	390
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>71.018</b>	<b>71.070</b>	<b>74.336</b>

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (diolah)

Keterangan: 2020\*): angka sementara

2021\*\*): angka sangat sementara

**a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Tingkat perkembangan riil ekonomi makro Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada 2021 mencapai sebesar 2,88 persen.

**Tabel 2.3**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2019 - 2021 (Persen)**

Kategori	Uraian	2019	2020*)	2021 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,06	0,80	
B	Pertambangan dan Penggalian	5,97	3,31	2,00
C	Industri Pengolahan	9,42	-4,63	6,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,88	7,93	4,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,01	5,60	6,75
F	Konstruksi	7,00	-2,03	6,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,97	-3,84	3,68
H	Transportasi dan Pergudangan	6,47	-4,21	2,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	-5,16	2,00
J	Informasi dan Komunikasi	7,95	6,24	6,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,72	2,38
L	Real Estate	4,98	-3,08	2,00
M,N	Jasa Perusahaan	4,54	-1,49	1,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,68	4,09	3,89
P	Jasa Pendidikan	7,94	4,81	1,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,52	10,83	3,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,26	-4,21	
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>6,05</b>	<b>0,85</b>	<b>3,24</b>

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (diolah)

Keterangan: 2020\*): angka sementara

2021\*\*): angka sangat sementara

## b) Pendapatan Per Kapita

Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita penduduk pada setiap tahunnya. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021\*\*) sebesar 50.315,59 (juta rupiah) cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020\*) sebesar 48.676,58 (juta rupiah) walaupun mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 55.425,31 (juta rupiah).

Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021\*\*) sebesar 32.970,19 (juta rupiah) atau meningkat dibanding Tahun 2020\*) sebesar 32.429,14 (juta rupiah) atau menurun dibandingkan Tahun 2019 sebesar 37.334,45 (juta rupiah).

**Tabel 2.4. Pendapatan Per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2021**

Tahun	Pendapatan Per Kapita (dalam juta rupiah)	
	Atas Harga Berlaku	Atas Harga Konstan
2019	55.425,31	37.334,45
2020*)	48.676,58	32.429,14
2021**)	50.315,59	32.970,19

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (diolah)  
Keterangan: 2020\*): angka sementara  
2021\*\*): angka sangat sementara

## c) Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 (nol) untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan Data BPS mencatat Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah pada rentang tahun 2019-2021 sebesar 0,308 pada tahun 2019 mengalami penurunan dan mendekati angka 0 hingga mencapai angka 0,291 pada tahun 2021, yang artinya semakin mendekati pemerataan sempurna. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik.

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini**  
**Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2020**

NO	Uraian	2019	2020	2021
1	Indeks Gini	0,308	0,304	0,291

*Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (diolah)*

## 1. Gambaran Umum Daerah

### a. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan karakteristik lokasi dan wilayah yaitu, areal seluas 4.545,55 km<sup>2</sup> yang terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung, berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara;
- 2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran;
- 3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro;
- 4) Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30' sampai dengan 4°15' Lintang Selatan, memiliki 28 kecamatan dengan 301 kampung dan 11 kelurahan.

Secara Topografi Lampung Tengah dapat dibagi 5 (lima) bagian, yaitu:

- 1) Daerah topografi berbukit sampai bergunung;
- 2) Daerah topografi berombak sampai bergelombang;
- 3) Daerah dataran aluvial;
- 4) Daerah rawa pasang surut;
- 5) Daerah river basin.

Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim Tropis-Humid dengan angin laut bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 Km/Jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 20°C - 28°C dengan suhu rata-rata pertahun 26,30°C.

Temperatur udara di Kabupaten Lampung Tengah relatif stabil dan tidak pernah menunjukkan perubahan yang ekstrim. Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%).

Beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lampung Tengah, adalah:

- 1) Way Waya;
- 2) Way Ketaya;
- 3) Way Pubian;
- 4) Kali Punggur;
- 5) Kali Pasir;
- 6) Way Sekampung;
- 7) Way Besi;
- 8) Way Raman;
- 9) Kali Macas;

- 10) Way Bening;
- 11) Way Tipo;
- 12) Way Keliwang;
- 13) Way Seputih;
- 14) Way Buring;
- 15) Way Pengakuan;
- 16) Way Pengubuan;
- 17) Way Tatayan;
- 18) Way Pengandungan.

Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut.

- 1) Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%);
- 2) Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung;
- 3) Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung;
- 4) Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan menjadi lima golongan yaitu:

- 1) Tanah Usaha Khusus I  
Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0-7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terus-menerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.
- 2) Tanah Usaha Utama IA dan B  
Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.
- 3) Tanah Usaha Utama IC  
Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif berkurang.
- 4) Tanah Usaha Utama ID  
Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.
- 5) Tanah Usaha Utama II  
Terletak pada ketinggian 500-1000m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

Kondisi geologi di Kabupaten Lampung Tengah terdapat aliran asam batuan gunung berapi yaitu Luffa Lampung yang hampir meliputi seluruh daerah Lampung Tengah dengan tanah Latosol dan Podsolik. Pada ketinggian 50-500 meter terdapat bahan

Luffa Lampung yang semakin kebarat semakin tinggi letaknya, terdiri dari endapan Gunung Api (*Plistosen*).

## b. Potensi Pengembangan Wilayah



Keterangan :

Lampung Tengah Bagian Timur

- ✓ Sentra Tanaman Pangan
- ✓ Perikanan
- ✓ Cadangan Agroindustri

Lampung Tengah Bagian Barat

- ✓ Perkebunan
- ✓ Hortikultura
- ✓ Peternakan
- ✓ Pertambangan
- ✓ Konservasi

Lampung Tengah Bagian Tengah

- ✓ Pemerintahan
- ✓ Pendidikan
- ✓ Perdagangan Dan Jasa

## c. Kondisi Umum Demografi

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, keadaan penduduk sangat menentukan keberhasilan karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan.

### 1) Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 berjumlah 1.477.395 jiwa, atau meningkat sebesar 13,95 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2020 yang berjumlah 1.460.045 jiwa dan meningkat 15,30 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2019 berjumlah 1.281.310 jiwa.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 didominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 755.635 jiwa dan penduduk perempuan 721.760 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki tercermin dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2021 rasio jenis kelamin 105 artinya pada Tahun 2020 setiap 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki, Komposisi Penduduk secara rinci dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2019 – 2021**

Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah		Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	%	
2019	651.323	50,83	629.987	49,17	1.281.310	100,00	103
2020	747.237	51,18	712.808	48,82	1.460.045	100,00	105
2021	755.635	51,15	721.760	48,85	1.477.395	100,00	105

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah Tahun 2021

## 2) Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk biasanya dibedakan menurut kelompok umur yaitu anak-anak umur 0-14 tahun, Kelompok umur Produktif umur 15-64 tahun dan Kelompok umur tua 65 keatas. Penduduk Usia Produktif ini dalam kehidupan akan menanggung beban hidup penduduk usia muda (0-14) dan Penduduk usia lanjut (65 tahun keatas).

Persentase jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 menurut kelompok umur adalah kelompok umur (0-14) sebesar 23,41 Persen; kelompok umur (15-64) sebesar 70,00 Persen; dan kelompok umur 65 ke atas sebesar 6,59 Persen.

**Tabel 2.7**  
**Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan**  
**Tahun 2019-2021**

Tahun	Kelompok umur			Rasio Ketergantungan
	0-14	15-64	65 keatas	
2019	27,18	66,66	6,16	50,01
2020	23,60	70,07	6,33	42,71
2021	23,41	70,00	6,59	42,86

Sumber: BPS Kab. Lampung Tengah Tahun 2021

Dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan Tahun 2021 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 42 orang penduduk tidak produktif.

## 3) Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan tingkat kemajuan masyarakat, makin tinggi tingkat pendidikan maka gambaran kemajuan masyarakat makin tinggi. Berikut ini gambaran keadaan pendidikan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

**Tabel 2.8**  
**Persentase Penduduk usia 15 Tahun Ke Atas**  
**Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki**

No	Ijazah tertinggi yang dimiliki	2019	2020	2021
1	Tidak/belum tamat SD dan Sekolah Dasar	43,13	21,32	28,11
2	SMP Sederajat	30,51	27,30	18,79
3	SMA Sederajat	21,73	22,51	16,43
4	Perguruan Tinggi	4,63	5,27	3,71

*Sumber: BPS Kab. Lampung Tengah Tahun 2021*

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 kepemilikan ijazah tingkat SMP, kepemilikan ijazah tingkat SMA mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang terjadi, membuat menurunnya tingkat ekonomi masyarakat.

#### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan hasil perhitungan IPM pada Tahun 2021 Kabupaten Lampung Tengah nilai IPM 70,23. Dengan rincian Angka Harapan Hidup 69,87 tahun, Harapan Lama Sekolah 12,93 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 7,59 tahun dan Pengeluaran Per Kapita Rp11,259 juta. Rincian IPM beserta komponennya di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019-2021 setelah rekonsiliasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.9**  
**Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2021**

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,04	70,16	70,23
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,75	69,84	69,87
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,91	12,92	12,93
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,57	7,58	7,59
5	Pengeluaran Perkapita	11.154	11.219	11.259

*Sumber Data: BPS Kab. Lampung Tengah*

#### **4) Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Ketenagakerjaan jika ditinjau dari dimensi ekonomi dan dimensi sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan, berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan ekonomi.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 berdasarkan status pekerjaan lebih banyak bekerja sebagai buruh/ karyawan/pegawai sebesar 22,71 %, dan status pekerjaan yang paling sedikit adalah berusaha dibantu pekerja tetap sebesar 3,37 %.

Komposisi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaannya di Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.10**  
**Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja**  
**Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2019-2021**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1	Berusaha sendiri	14,21	13,41	15,64
2	Berusaha dibantu pekerja tidak tetap	24,45	23,78	20,47
3	Berusaha dibantu pekerja tetap	2,48	1,85	3,37
4	Buruh/ Karyawan/pegawai	26,79	22,77	22,71
5	Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian	12,85	16,96	16,61
6	Pekerja tidak dibayar	19,22	21,23	21,20
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber data :BPS Lampung Tengah Tahun 2021

#### d. Kondisi Ekonomi

##### 1) Potensi Unggulan Daerah

##### a. Pertanian Tanaman Pangan

Secara umum keberhasilan pencapaian indikator kinerja jumlah produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat perkembangan jumlah produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dicapai pada tahun 2021.

Tercapainya target produksi jagung dipengaruhi oleh pengetahuan petani dalam melakukan pemanfaatan lahan secara *intercropping* dengan ubi kayu dan intensitas hujan yang mendukung pertanaman jagung (la nina).

Produksi komoditas padi mengalami kenaikan sebesar 2,43 persen yaitu dari 705.402 ton pada tahun 2019 menjadi 722.517 ton pada tahun 2021, dan mengalami penurunan sebesar 5,94 persen pada tahun 2020 menjadi 768.147 ton apabila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2021. Luas panen komoditas padi mengalami penurunan sebesar 21,13 persen yaitu dari 144.399 ha pada tahun 2019 menjadi 113.891 ha pada tahun 2021 dan mengalami penurunan juga sebesar 16,28 persen pada tahun 2020 menjadi 136.039 ha dibandingkan luas panen pada tahun 2021.

Secara rinci perkembangan jumlah produksi beberapa komoditas tanaman pangan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produksi**

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)			Luas Panen (Ha)			Produktivitas (ku/ha)			Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Padi	155.434	146.915	-	144.399	136.039	113.891	48,85	52,29	6,34	705.402	768.147	722.517
2	Jagung	61.524	68.175	-	59.041	65.148	-	60,89	56,53	-	359.506	385.425,51	-
3	Kedelai	2.392	-	-	2.266	-	-	12,95	-	-	2.935	-	-
4	Ubi Kayu	67.708	103.779	-	60.568	86.545	-	247,39	254,60	-	1.500.624	2.203.462	-

Sumber data: BPS Lampung Tengah Tahun 2021

**b. Perkebunan**

Komoditas perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya komoditas kelapa sawit, kelapa, kakao, dan kopi.

Pada Tahun 2021 luas areal tanaman kelapa sawit sebesar 19.178 Ha dengan total produksi sebesar 43.095 ton, kelapa dalam luas areal sebesar 6.993 Ha dengan total produksi sebesar 6.259 ton, kakao luas areal sebesar 5.275 Ha dengan total produksi sebesar 3.015 ton, karet dengan luas areal sebesar 11.548 Ha dengan total produksi sebesar 4.923 ton, tebu dengan luas areal sebesar 10.183 Ha dengan total produksi sebesar 65.246 ton, lada dengan luas areal sebesar 162 Ha dengan total produksi sebesar 105 ton (*sumber data Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah*), selain hasil perkebunan rakyat tersebut, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan seperti PTP Nusantara VII yang bergerak pada tanaman sawit, Gunung Madu Plantation, Gula Putih Mataram yang bergerak pada tanaman tebu dan gula.

**c. Peternakan**

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan ternak besar maupun kecil. Untuk pengembangan ternak besar seperti sapi, kerbau maupun kambing potensi ketersediaan pakan cukup besar seperti rumput, limbah nanas, daun jagung, kulit kakao maupun pucuk daun tebu serta jerami padi.

Sebagai gambaran pengembangan ternak di Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 populasi sapi sebanyak 343.049 ekor, kambing dan domba 290.970 ekor, ayam buras 1.033.369 ekor, ayam ras pedaging 1.136.765 ekor, dan ayam ras petelur 1.956.182 ekor.

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Populasi Ternak 2019 dan 2021**

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak		
		2019	2020	2021
1.	Sapi Potong	297.253	311.259	343.049
2.	Kambing dan domba	270.543	289.975	290.970
3.	Ayam Buras	1.032.780	1.014.199	1.033.369
4.	Ayam Ras Pedaging	2.151.805	1.054.883	1.136.765
5.	Ayam Ras Petelur	735.841	933.985	1.956.182

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Lampung Tengah

**d. Perikanan**

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan seperti kolam, perairan umum, perairan laut, dan keramba, Tahun 2021 produksi ikan mencapai 48.784,37 ton atau meningkat sebesar 7,85 persen dibandingkan tahun 2019. Secara lebih rinci

perkembangan produksi perikanan Tahun 2019-2021 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan Produksi Ikan Tahun 2019 – 2021**

No.	Uraian	2019	2020	2021
1	Kolam	38.724	41.434	42.697,87
2	Keramba Jaring	691	542	549
3	Keramba Bambu	470	353	355,5
4	Perairan Laut	3.473	3.217	3.331
5	Perairan Umum	1.875	1.948	1.851
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.233</b>	<b>47.494</b>	<b>48.784,37</b>

*Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021*

**e. Perindustrian**

Potensi bidang industri di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar, hal ini karena didukung oleh ketersediaan potensi bahan baku yang cukup terutama industri yang bergerak pada bidang agribisnis, sampai dengan Tahun 2021 jumlah unit usaha industri sebanyak 1.673 unit. dengan total investasi sebesar Rp.1.668.718.717.734,- milyar ( *Sumber data Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah*)

**f. Perdagangan dan Jasa**

Potensi bidang perdagangan dan jasa di Kabupaten Lampung Tengah cukup menjanjikan mengingat letak geografis Kabupaten Lampung Tengah yang cukup strategis, berada ditengah-tengah Propinsi Lampung serta dilintasi oleh Jalan Lintas Trans Sumatera. Selain itu telah dikembangkan kawasan niaga terpadu yang diharapkan dapat menarik investasi dibidang perdagangan dan jasa sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah agar lebih berkembang, serta didukung oleh pusat-pusat perdagangan dan jasa pada masing-masing kecamatan seperti pasar daerah, pasar kampung dan kios serta toko-toko yang semakin berkembang. Pada Tahun 2021 jumlah pelaku usaha yang telah memiliki SIUP sebesar 146 unit dengan rincian pedagang besar 7, pedagang menengah 8, pedagang kecil 66 dan pedagang mikro/SIUP mikro 65 ( *sumber data DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021*)

Volume ekspor produk yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 mencapai 35.706,05 ton, dengan total nilai ekspor mencapai 29.443.708,13 US\$, (*sumber data Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021*) selain itu dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh sektor perbankan yang semakin berkembang baik bank nasional, bank daerah, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

**g. Pertambangan**

Sesuai dengan formasi geologi dan jenis tanah yang ada, maka Kabupaten Lampung Tengah memiliki deposit mineral yang potensial untuk pengembangan usaha pertambangan terutama bahan tambang galian C. Potensi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah diantaranya marmer, granit, andesit, felspart, pasir, diorit, Batu Kapur, Lempung, Pasir Kuarsa dan Pasir Batu (Sirtu).

**2) Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

**a) Pendapatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, proyeksi anggaran pendapatan daerah sebesar Rp2.538.461.534.978,00 dan realisasi sebesar Rp2.485.893.332.630,19 atau 97,93% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.14. Laporan Realisasi Pendapatan TA 2021**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	210.592.445.386,00	234.891.264.050,19	111,54
2	Pendapatan Transfer	2.109.658.989.652,00	2.091.657.159.232,00	99,15
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang	218.210.099.940,00	159.344.909.348,00	73,02
	<b>Jumlah</b>	<b>2.538.461.534.978,00</b>	<b>2.485.893.332.630,19</b>	<b>97,93</b>

**b) Belanja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, proyeksi anggaran belanja daerah sebesar Rp2.833.897.326.813,00 dan realisasi sebesar Rp2.546.800.514.903,95 atau sebesar 89,87% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.15. Laporan Realisasi Belanja Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1	Belanja Operasi	1.851.965.760.013,00	1.709.448.587.852,85	92,30
2	Belanja Modal	456.031.748.580,00	355.715.743.166,02	78,00
3	Belanja Tidak Terduga	59.000.000.000,00	15.693.913.480,08	26,60
4	Belanja Transfer	466.899.818.220,00	465.942.270.405,00	99,79
	<b>Jumlah</b>	<b>2.833.897.326.813,00</b>	<b>2.546.800.514.903,95</b>	<b>89,87</b>

**c) Proyeksi Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, proyeksi anggaran pembiayaan netto sebesar Rp295.435.791.835,00 dan realisasi sebesar Rp252.389.623.303,44 atau sebesar 85,43% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.16. Laporan Pembiayaan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	303.670.970.014,00	257.110.970.014,44	84,67
2	Pengeluaran Pembiayaan	8.235.178.179,00	4.721.346.711,00	57,33
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>295.435.791.835,00</b>	<b>252.389.623.303,44</b>	<b>85,43</b>

### 3) Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Lampung Tengah dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

#### a) Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.485.893.332.630,19 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.538.461.534.978,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp2.431.332.258.820,89 terjadi kenaikan sebesar 2,24% atau senilai Rp54.561.073.809,30.

#### b) Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.546.800.514.903,95 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.833.897.326.813,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun 2020 sebesar Rp2.469.976.394.420,00 terjadi kenaikan sebesar 3,11% atau senilai Rp76.824.120.483,95.

#### c) Surplus/Defisit APBD

Pada Tahun 2021 APBD Kabupaten Lampung Tengah mengalami defisit sebesar Rp60.907.182.273,76 apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2020 yang mengalami defisit sebesar Rp38.644.135.599,11 maka terjadi kenaikan sebesar 57,61% atau sebesar Rp22.263.046.674,65.

Pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 menurut urusan pemerintahan daerah, serta faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan disajikan pada LAKIP Kabupaten Lampung Tengah.

#### d) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 terdapat SiLPA sebesar Rp191.482.441.029,68 terdiri dari:

(1) Kas Di Kas Daerah Sebesar Rp146.860.040.289,39 terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah pada Rekening Bank Lampung Nomor 385.00.09.00xxx.x Rp41.966.821.013,31;
- b) Kas di Kas daerah pada Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 03570100144xxxx Rp104.893.219.276,08;

(2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;

(3) Kas di Bendahara BLUD RSUD Demang Sepulau Raya sebesar Rp39.131.261.499,29;

(4) Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp5.409.983.241,00;

(5) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp81.156.000,00.

### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, dapat digambarkan dari indikator kinerja kunci sebagai berikut.

#### **1. Pertumbuhan APBD Kabupaten Lampung Tengah**

Pertumbuhan APBD Kabupaten Lampung Tengah sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan kenaikan. Jumlah realisasi pendapatan memiliki kecenderungan kenaikan dari sebesar Rp2.431.332.258.820,89 pada Tahun 2020, menjadi sebesar Rp2.485.893.332.630,19 pada Tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 2,24% atau senilai Rp54.561.073.809,30. Sedangkan disisi realisasi belanja mengalami kenaikan dari Rp2.469.976.394.420,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp2.546.800.514.903,95 pada Tahun 2021, menunjukkan kenaikan sebesar 3,11% atau senilai Rp76.824.120.483,95.

#### **2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada awal tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyusun APBD yang merupakan RKPD dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran. Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Analisis tersebut dimaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diantaranya apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sesuai yang diharapkan, apakah posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan ditahun sebelumnya. Pertanyaan dimaksud dapat menjawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut.

- a. Rasio antar pos LRA
  - 1) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja;
  - 2) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja;
  - 3) Rasio PAD terhadap Total Pendapatan;
  - 4) *Debt Service Ratio*;
  - 5) Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan;
  - 6) *Debt Service Coverage Rasio* (DSCR).
- b. Rasio antar pos Neraca
  - 1) Rasio Cair (*Quick Ratio*);
  - 2) Rasio Utang terhadap Total Aset;
  - 3) Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset.

Rincian Rasio antar pos LRA adalah sebagai berikut.

a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

$$\begin{aligned}
 \boxed{\begin{array}{c} \text{Rasio Belanja Operasi} \\ \text{Terhadap Total Belanja} \end{array}} &= \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \\
 &= \frac{\text{Rp1.709.448.587.852,85}}{\text{Rp2.546.800.514.903,95}} \\
 &= 67,12\%
 \end{aligned}$$

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan belanja hibah.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin.

b. Rasio belanja modal terhadap total belanja

$$\begin{aligned}
 \boxed{\begin{array}{c} \text{Rasio Belanja Modal Terhadap} \\ \text{Total Belanja} \end{array}} &= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \\
 &= \frac{\text{Rp355.715.743.166,02}}{\text{Rp2.546.800.514.903,95}} \\
 &= 13,97\%
 \end{aligned}$$

Rasio belanja modal terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri atas belanja modal aset tetap dan belanja modal aset lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih sebesar 13,97%

c. Rasio PAD terhadap total pendapatan

$$\begin{aligned}
 \boxed{\begin{array}{c} \text{Rasio PAD Terhadap Total} \\ \text{Pendapatan} \end{array}} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \\
 &= \frac{\text{Rp234.891.264.050,19}}{\text{Rp2.485.893.332.630,19}} \\
 &= 9,45\%
 \end{aligned}$$

Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. Termasuk didalam PAD yaitu pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan diwilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Bila rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain.

d. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned}
 \boxed{\text{Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan}} &= \frac{\text{Total Pendapatan Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \\
 &= \frac{\text{Rp1.664.299.043.383,00}}{\text{Rp2.485.893.332.630,19}} \\
 &= 66,95\%
 \end{aligned}$$

Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Termasuk di dalam dana perimbangan yaitu: pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan transfer dari Pemerintah Provinsi Lampung. Rasio ini mengatur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi tersebar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio yang dihasilkan maka makin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio diatas 50% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Rincian rasio antar pos Neraca adalah sebagai berikut.

a. Rasio Cair (*Quick Ratio*)

$$\begin{aligned}
 \boxed{\text{Rasio Cair (Quick Ratio)}} &= \frac{\text{Aset Lancar – Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}} \\
 &= \frac{\text{Rp268.313.853.502,86 – Rp15.022.361.855,82}}{\text{Rp95.317.220.408,58}} \\
 &= 265,74\%
 \end{aligned}$$

Rasio cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasil dibagi dengan utang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas dibendahara pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya di bendahara, bagian lancar TGR, piutang pajak, piutang lain-lain, Penyisihan Piutang dan persediaan.

Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak *likuid* sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Apabila dilihat dari rasio cair (*quick ratio*) diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya karena Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat menutup seluruh utangnya.

b. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt Ratio*)

$$\begin{aligned}
 \boxed{\begin{array}{c} \text{Rasio Utang Terhadap Aset} \\ \text{(Debt Ratio)} \end{array}} &= \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \\
 &= \frac{\text{Rp199.432.957.363,35}}{\text{Rp3.939.857.674.930,29}} \\
 &= 5,06\%
 \end{aligned}$$

Rasio utang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Analisis rasio ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Angka rasio 5,06% menunjukkan bahwa kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah relatif sangat kecil dalam sumbangannya untuk pembiayaan pembangunan. Analisis rasio utang terhadap total aset harus dihubungkan dengan DSR, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio ini maka akan diperoleh rasio utang total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

c. Rasio Ekuitas terhadap Total Aset

$$\begin{aligned}
 \boxed{\begin{array}{c} \text{Rasio Ekuitas Terhadap Total} \\ \text{Aset} \end{array}} &= \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}} \\
 &= \frac{\text{Rp3.740.424.717.566,94}}{\text{Rp3.939.857.674.930,29}} \\
 &= 94,94\%
 \end{aligned}$$

Rasio ekuitas terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sendiri dalam membiayai pembangunan. Capaian 94,94% menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik, artinya hampir seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintah yang dijabarkan dalam suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk memberikan landasan hukum kebijakan akuntansi dan menjadi panduan dan pedoman penerapan akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki Kebijakan Akuntansi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 57 Tahun 2020.

#### **1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang memperoleh anggaran dari APBD Kabupaten Lampung Tengah.

##### **a. Entitas Akuntansi**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### **b. Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas, dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

#### **2. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran Laporan Keuangan**

##### **a. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

##### **b. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan

yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1) Pengukuran aset

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Pengukuran Investasi jangka pendek

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c) Piutang dicatat sebesar selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

d) Persediaan dicatat sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

e) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang nonpermanen:

(1) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;

(2) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;

(3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah

(seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- f) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
  - g) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
- 2) Pengukuran kewajiban
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 3) Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- Dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, yang dapat disajikan sebagai berikut.
- a) Pengakuan pendapatan
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat:
- (1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
  - (2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
  - (3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
  - (4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

- (5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- (6) Dalam hal badan layanan umum dan terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pendapatan yang tidak melalui rekening kas umum daerah, pendapatan LRA diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pendapatan daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

b) Pengakuan belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diukur dan diakui dengan basis kas, dan merupakan unsur pembentukan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal pengeluaran kas baik secara tunai maupun secara non tunai dari Rekening Kas Umum Daerah atau Kas Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Pengeluaran kas secara non tunai dan batasannya dalam pelaksanaan diatur dengan aturan lebih lanjut

c) Pengakuan beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, dan merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO).

Beban diakui pada:

- (1) Saat timbulnya kewajiban;
- (2) Saat terjadinya konsumsi aset;
- (3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

d) Pengakuan pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan diukur berdasarkan Nilai historis (*historical cost*) atau nilai seluruh penerimaan kas atau pengeluaran kas atas transaksi pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e) Pengakuan aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

(1) Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, dan obat-obatan.

(2) Aset non lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

(3) Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; (d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. (e) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

f) Penilaian awal aset tetap

Aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

g) Penyusutan aset tetap

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Perhitungan penyusutan dilakukan dengan menyusutkan satu bulan penuh tanpa melihat tanggal perolehan, baik diperoleh diawal bulan ataupun diakhir bulan akan disusutkan selama satu bulan.

Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, barang bercorak kebudayaan dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara

periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

h) Pengakuan kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

a) Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek pada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b) Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau ada penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

i) Pengakuan ekuitas

Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

j) Komponen-komponen laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo

awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

(1) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

(3) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang..

(4) Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2020**

Secara umum realisasi pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.485.893.332.630,19 atau 97,93% dari anggaran sebesar Rp2.538.461.534.978,00 sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp2.546.800.514.903,95 atau sebesar 89,87 % dari anggaran sebesar Rp2.833.897.326.813,00 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi APBD**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan	2.538.461.534.978,00	2.485.893.332.630,19	97,93	2.431.332.258.820,89
2	Belanja dan Transfer	2.833.897.326.813,00	2.546.800.514.903,95	89,87	2.469.976.394.420,00
3	Surplus/Defisit	(295.435.791.835,00)	(60.907.182.273,76)	20,62	(38.644.135.599,11)
4	Penerimaan Pembiayaan	303.670.970.014,00	257.110.970.014,44	84,67	200.010.842.976,16
5	Pengeluaran Pembiayaan	8.235.178.179,00	4.721.346.711,00	57,33	12.895.737.362,61
6	Pembiayaan Netto	295.435.791.835,00	252.389.623.303,44	85,43	187.115.105.613,55
7	<b>Silpa Tahun Berjalan</b>	-	<b>191.482.441.029,68</b>	-	<b>148.470.970.014,44</b>

Realisasi APBD Tahun 2021 secara rinci antara lain pos pendapatan, pos belanja, pos transfer dan pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**5.1.1 PENDAPATAN - LRA**

Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.538.461.534.978,00 sampai dengan akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.485.893.332.630,19 atau 97,93%. Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.2. Pendapatan - LRA**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021(Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	210.592.445.386,00	234.891.264.050,19	111,54	179.883.067.925,86
2	Pendapatan Transfer	2.109.658.989.652,00	2.091.657.159.232,00	99,15	2.086.403.282.682,33
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	218.210.099.940,00	159.344.909.348,00	73,02	165.045.908.212,70
	<b>Jumlah</b>	<b>2.538.461.534.978,00</b>	<b>2.485.893.332.630,19</b>	<b>97,93</b>	<b>2.431.332.258.820,89</b>

Berdasarkan rincian tersebut di atas diketahui bahwa secara umum realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp54.561.073.809,30 atau 2,24% dibandingkan TA 2020 yang realisasinya sebesar Rp2.431.332.258.820,89.

**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA**

No	Uraian	Anggaran TA 2021(Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	93.961.730.200,00	100.691.283.459,70	107,16	85.423.990.503,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.557.000.000,00	8.075.809.375,00	69,88	9.646.781.059,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.711.541.564,00	7.711.541.564,54	100,00	7.231.134.960,48
4	Lain-Lain PAD yang Sah	97.362.173.622,00	118.412.629.650,95	121,62	77.581.161.403,38
	<b>Jumlah</b>	<b>210.592.445.386,00</b>	<b>234.891.264.050,19</b>	<b>111,54</b>	<b>179.883.067.925,86</b>

#### 5.1.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan masing-masing objek Pajak. Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Perda Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Perda Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Perda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp93.961.730.200,00 sampai dengan akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp100.691.283.459,70 atau 107,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp85.423.990.503,00 maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp15.267.292.956,70 atau 17,87%. Hal ini disebabkan karena beberapa jenis pajak yang pada TA 2020 diberikan relaksasi dengan diterbitkannya Perbup No 18 Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pengurangan Sementara Pembayaran Pajak Daerah yang berlaku sejak 6 April 2020 sudah tidak diberlakukan lagi. Sehingga ada peningkatan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan. Peningkatan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan disebabkan karena adanya penambahan Wajib Pajak baru dan adanya perubahan dari meteran rekening listrik beralih ke Token sehingga mengurangi adanya keterlambatan pembayaran listrik. Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah disebabkan karena adanya penambahan Wajib Pajak baru dan untuk saat ini sudah ada pemantauan melalui QR code dan CCTV yang setiap saat dapat dipantau melalui *Dashboard* BPPRD. Pendapatan Pajak dapat dirinci seperti di bawah ini.

**Tabel 5.4. Pendapatan Pajak Daerah - LRA**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	750.000.000,00	861.689.519,00	114,89	395.980.782,00
2	Pajak Rumah Makan	3.000.000.000,00	3.591.430.475,00	119,71	2.774.082.977,00
3	Pajak Hiburan	350.000.000,00	272.111.284,00	77,75	304.883.769,00
4	Pajak Reklame	1.250.000.000,00	1.385.458.130,00	110,84	1.050.998.939,00
5	Pajak Penerangan Jalan	48.639.016.900,00	50.613.340.873,00	104,06	47.680.683.424,00
6	Pajak Parkir	600.000.000,00	543.460.038,00	90,58	576.268.535,00
7	Pajak Air Tanah	7.700.512.454,00	8.929.856.091,00	115,96	4.783.181.741,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	871.134.343,00	116,15	707.157.677,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.072.200.846,00	28.654.518.687,70	114,29	21.073.935.282,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.850.000.000,00	4.968.284.019,00	84,93	6.076.817.377,00
	<b>Jumlah</b>	<b>93.961.730.200,00</b>	<b>100.691.283.459,70</b>	<b>107,16</b>	<b>85.423.990.503,00</b>

**5.1.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah -LRA**

Pendapatan Retribusi daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Perbup Nomor 32 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Perbup Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Perbup Nomor 29 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Jaringan Trayek dan Perizinan Angkutan Umum, Perda 06 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Perbup Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Perbup Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Lampung Tengah.

Pendapatan Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp11.557.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.075.809.375,00 atau 69,88%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya sebesar Rp9.646.781.059,00 maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.570.971.684,00 atau turun sebesar 16,28%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	1.221.482.500,00	40,72	2.070.007.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	856.780.000,00	947.208.000,00	110,55	844.160.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	120.900.000,00	100,75	106.800.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	1.119.718.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	922.000.000,00	959.109.900,00	104,02	860.708.200,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	263.550.000,00	266.910.000,00	101,27	47.980.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	162.637.500,00	81,32	112.157.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	448.845.000,00	99,74	458.562.500,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	710.000.000,00	200.425.000,00	28,23	306.705.000,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.439.670.000,00	1.436.889.000,00	99,81	-
11	Retribusi Terminal	16.000.000,00	16.260.000,00	101,63	14.070.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	440.000.000,00	440.000.000,00	100,00	-
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.250.000,00	3.260.000,00	100,31	2.000.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	133.500.000,00	133.600.000,00	100,07	186.846.200,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000,00	1.717.782.475,00	57,26	3.516.466.659,00
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.250.000,00	500.000,00	22,22	600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.557.000.000,00</b>	<b>8.075.809.375,00</b>	<b>69,88</b>	<b>9.646.781.059,00</b>

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pendapatan yang berasal dari Dinas Kesehatan tidak termasuk Rumah Sakit. Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari pendapatan rawat jalan umum, rawat inap, UGD, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan laboratorium klinik dasar, pelayanan laboratorium daerah dan pelayanan ambulans puskesmas.
- Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Tahun 2021 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya terealisasi sebesar Rp200.425.000,00 atau sebesar 28,23% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp710.000.000,00 hal ini disebabkan karena Gedung Bandiklat lebih banyak dipergunakan sendiri untuk kegiatan Prajabatan, untuk tahun 2021 terdapat 7 angkatan sehingga tidak bisa disewakan kepada pihak lain.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2020 tidak ada realisasi karena pada awalnya pendapatan ini dikelola oleh pihak ketiga yaitu PT. Pandu Jaya Buana, karena cacat kontrak maka baru pada pertengahan tahun 2021 pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan.

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan hanya terealisasi sebesar Rp1.717.782.475,00 atau sebesar 57,26% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 disebabkan karena Izin Mendirikan Bangunan terbit hanya satu kali dan pembayaran PAD hanya satu kali selama tidak ada penambahan bangunan atau bangunan baru.
- Retribusi Izin Trayek terealisasi sebesar Rp500.000,00 atau sebesar 22,22% dari anggaran sebesar Rp2.250.000,00 disebabkan karena pendapatan Izin Trayek ini adalah untuk angkutan umum dan banyak angkutan umum yang tidak beroperasi karena tidak ada penumpang sebab sebagian besar penumpang angkutan umum adalah anak sekolah sedangkan anak sekolah belajar dari rumah (daring) akibat dari wabah Covid-19.

#### 5.1.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2021 diterima berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2021 Tentang Pembagian Laba PT. Bank Lampung Tahun 2020 dan Perda Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp7.711.541.564,00 terealisasi sebesar Rp7.711.541.564,54 atau 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 realisasinya sebesar Rp7.231.134.960,48 maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp480.406.604,06 atau naik sebesar 6,64% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	PT Bank Lampung	7.711.541.564,00	6.461.458.068,54	83,79	5.944.035.422,48
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPRS Rajasa		1.250.083.496,00	16,21	1.287.099.538,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.711.541.564,00</b>	<b>7.711.541.564,54</b>	<b>100,00</b>	<b>7.231.134.960,48</b>

#### 5.1.1.1.d Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan yang sah lainnya yang diterima selain dari Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp97.362.173.622,00 terealisasi sebesar Rp118.412.629.650,95 atau 121,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp77.581.161.403,38 maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp40.831.468.247,57 atau 52,63%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut.

**Tabel 5.7. Lain-lain PAD yang Sah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	8.046.010,00	0,00	1.036.175.998,00
2	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	656.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	9.254.825.475,00	10.552.909.365,38	114,03	11.944.394.163,82
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	47.521.075,00	-	70.002.021,40
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	24.000.000,00	0,00	35.978.080,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	3.939.758.354,47	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	90.085.149,10	0,00	8.511.130,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	200.000.000,00	39.976.927,00	19,99	89.029.051,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	54.207.200,00	108,41	485.300,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	800.813.068,00	0,00	1.624.734.255,92
11	Pendapatan BLUD	43.302.042.799,00	73.042.194.035,00	168,68	21.936.109.816,24
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	43.898.505.348,00	29.813.118.467,00	67,91	37.341.004.750,00
13	Pendapatan dari Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	1.648.841.337,00
14	Pendapatan Piutang dari Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	1.637.500.000,00
15	Pendapatan dari Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0,00	0,00	0,00	172.545.500,00
16	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.850.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>97.362.173.622,00</b>	<b>118.412.629.650,95</b>	<b>121,62</b>	<b>77.581.161.403,38</b>

Berdasarkan data di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

Hasil penjualan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 tidak dianggarkan tetapi terdapat realisasi sebesar Rp8.046.010,00 yang berasal dari lelang penjualan sisa bongkaran gedung Puskesmas Kotagajah, yang terdiri dari:

**Tabel 5.8. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		8.046.010,00	152.684.200,00
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	-	-	48.244.009,00
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	-	-	835.247.789,00
	<b>Jumlah</b>	-	<b>8.046.010,00</b>	<b>1.036.175.998,00</b>

(2) Hasil dari kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Hasil dari kerjasama Penyediaan Infrastruktur pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp656.800.000,00 tetapi tidak ada realisasi, Rekening ini dianggarkan untuk menampung pendapatan dari pihak ketiga yaitu PT. Pandu Jaya Buana tetapi tidak ada realisasi karena adanya cacat kontrak.

(3) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan jasa Giro terdiri dari:

**Tabel 5.9. Penerimaan jasa Giro**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
	Jasa Giro Kas Daerah, terdiri dari:	<b>9.254.825.475,00</b>	<b>10.552.909.365,38</b>	<b>11.944.394.163,82</b>
1	Jagir dari Bank Lampung Cabang Bandar Jaya	-	5.857.542.249,36	2.376.629.866,82
2	Jagir Dari Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya	-	4.695.367.116,02	9.567.764.297,00

- (4) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp47.521.075,00 yang penagihannya sudah diserahkan kepada KPKNL Metro dengan surat penyerahan Nomor: 500/24/05/2016 Tanggal 16 Nopember 2016.
- (5) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara  
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara terdiri dari:

**Tabel 5.10. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang	-	24.000.000,00	24.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	-	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>

- (6) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain  
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain terdiri dari:

**Tabel 5.11. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	LLG DR TITIPAN IURAN DAN AS	-	108.305.407,00	11.978.080,00
2	LLG DR ASURANSI KREDIT INDONESIA	-	68.319.737,31	-
3	LLG DR NUR SHAKDIAH	-	169.491.696,00	-
4	LLG DR PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI	-	53.291.530,00	-
5	LLG DR SOLUSI MENARA INDONESIA	-	46.181.580,00	-
6	LLG DR INDOMARCO PRISMATAMA	-	4.210.682,00	-
7	TRF DR 2 LIA ATIKA RANI	-	12.240,00	-
8	TRF DR 2 OLIVIA IRNI	-	85.000,00	-
9	TRF DR S AGUS SUGANDA	-	1.512.000,00	-
10	Pengembalian tapi Tidak Ada Keterangan	-	8.890.984,00	-
11	Kelebihan Pembayaran Makan Minum Rapat (Temuan Inspektorat)	-	250.000,00	-
12	Pembayaran Kelebihan Tunj. Fungsional An. Muningtya	-	2.000.000,00	-
13	Pengembalian UMKM dari Dinas Koperasi Karena Double Nama Penerima	-	103.565.779,00	-
14	Pembayaran Kekurangan Penggantian Kendaraan Dinas Roda 2 BE 6520 GZ	-	4.074.000,00	-
15	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas	-	27.852.584,00	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>598.043.219,31</b>	<b>11.978.080,00</b>

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
	<b>Jumlah Pindahan</b>	-	<b>598.043.219,31</b>	<b>11.978.080,00</b>
16	Setoran Kelebihan Pembayaran Kegiatan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan	-	802.565.874,26	-
17	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Biaya Personil / Jasa Konsultan	-	360.126.000,00	-
18	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Swakelola	-	111.925.782,78	-
19	Pengembalian Kekurangan volume atas pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi	-	420.920.698,89	-
20	Pengembalian Dana Operasional Covid-19 TA 2020	-	207.742.000,00	-
21	Pengembalian Belanja Penggantian Suku Cadang BPBD TA 2020	-	50.000.000,00	-
22	Pengembalian Uang Belanja Tak Terduga Untuk Biaya Operasional TA 2020	-	34.200.734,00	-
23	Pengembalian Uang Belanja Tak Terduga Untuk Bongkar Muat TA 2020	-	3.757.494,66	-
24	Pengembalian belanja tidak terduga dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19	-	22.624.473,00	-
25	Pengembalian Atas Belanja Dana Aokasi Khusus Beanja Aat Kesehatan Covid - 19	-	80.502.176,00	-
26	Pengembalian kelebihan Pembayaran Pekerjaan Fisik	-	100.044.290,36	-
27	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan	-	129.579.774,19	-
28	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat	-	10.737.581,00	-
29	Pengembalian Dana Jasa Giro dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kegiatan Pemilukada TH 2020	-	22.399.503,00	-
30	Pengembalian Sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilukada Tahun 2020	-	739.608.866,02	-
31	Pengembalian TPP Bulan April 2020	-	1.109.019,00	-
32	Pengembalian Pembayaran Gaji	-	23.925.000,00	-
33	Peny By Transaksi ATM Galih	-	8.000,00	-
34	Pengembalian Kekurangan Volume Pengadaan ATK dan Barang Keperluan Peerkantoran Pada Dinas PP & KB. TA 2020	-	23.384.950,00	-
35	Pengembalian Kelebihan Pembavaran Atas	-	176.400.000,00	-
36	Set Puskesmas Seputih Elita	-	1.026.000,00	-
37	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BBm Kendaraan Dinas Roda 2 Dari Bulan Januari s/d Des 2020 Pada Dinas Lingkungan Hidup	-	5.500.000,00	-
38	Pembayaran Kerugian Daerah Atas Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 2 BE 7073 GZ an. Aria Meza,SH	-	5.000.000,00	-
39	Setoran Tunai Mujahidin	-	2.994.000,00	-
40	Pengembalian Potongan BPJS 1% dari Januari - Juni TA 2021	-	5.632.918,00	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>3.939.758.354,47</b>	<b>11.978.080,00</b>

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain merupakan gabungan dari pendapatan yang tidak ada rekeningnya. Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran merupakan pengembalian yang berasal dari Temuan Pemeriksaan, dan tidak ada rekeningnya.

- (7) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp90.085.149,10;

- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah  
Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri dari:

**Tabel 5.12. Pendapatan Denda Pajak Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	10.928.835,00	8.788.130,00
2	Pendapatan Denda PBBP2	200.000.000,00	39.976.927,00	80.240.921,00
<b>Jumlah</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>50.905.762,00</b>	<b>89.029.051,00</b>

- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp54.207.200,00 merupakan pendapatan denda biaya rekening air dan penyambungan PAM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

**Tabel 5.13. Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	54.207.200,00	485.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>54.207.200,00</b>	<b>485.300,00</b>

- (10) Pendapatan dari Pengembalian  
Pendapatan dari pengembalian terdiri dari:

**Tabel 5.14. Pendapatan Pengembalian**

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	799.217.460,00	669.913.748,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	-	1.595.608,00	-
3	Pendapatan dari Pengembalian karena Temuan Badan Pemeriksa	-	-	930.129.143,92
4	Pendapatan PT. Taspen	-	-	24.691.364,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>800.813.068,00</b>	<b>1.624.734.255,92</b>

- (11) Pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp43.302.042.799,00 dan terealisasi sebesar Rp73.042.194.035,00 atau 68,55%, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp21.936.109.816,24 mengalami kenaikan sebesar Rp51.106.084.218,76 atau sebesar 232,98%. Pendapatan BLUD terdiri dari Penerimaan Umum sebesar Rp1.448.545.868,00; Penerimaan BPJS sebesar Rp8.544.421.236,00; Penerimaan JSPS sebesar Rp174.457.185,00; Klaim Jampersal sebesar Rp646.722.446,00; dan Pendapatan Covid-19 sebesar Rp62.228.047.300,00.

- (12) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp29.813.118.467,00 yang merupakan dana Kapitasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp29.367.029.367,00 dan dana non kapitasi sebesar Rp446.089.100,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dapat dirinci sebagai berikut:

No	Puskesmas	Pendapatan (Rp)	
		Kapitasi	Non Kapitasi
1	Segala Mider	559.699.839	-
2	Kali Rejo	1.120.716.000	15.591.300
3	Sendang Agung	605.911.350	-
4	Poncowarno	407.153.925	-
5	Bangun Rejo	590.332.050	-
6	Sukanegara	400.170.822	-
7	Padang Ratu	628.031.250	-
8	Haji Pemanggilan	1.013.760.450	-
9	Payung Rejo	490.999.900	-
10	Karang Anyar	889.731.000	24.450.000
11	Surabaya	1.022.792.668	-
12	Gedung Sari	531.705.975	-
13	Gunung Sugih	1.005.470.200	800.000
14	Wates	1.065.954.300	12.797.100
15	Terbanggi Subing	627.917.568	-
16	Kesumadadi	501.786.450	5.297.100
17	Simbar Waringin	1.151.065.476	-
18	Pujokerto	216.504.000	-
19	Punggur	871.277.400	-
20	Kota Gajah	577.133.019	45.560.000
21	Sritejo Kencono	236.758.500	-
22	Bandar Jaya	1.951.940.503	1.400.000
23	Simpang Agung	1.074.351.600	-
24	Bandar Agung	1.096.672.794	100.146.300
25	Candi rejo	690.648.750	-
26	Poncowati	671.039.550	-
27	Seputih Raman	642.507.164	600.000
28	Rama Indra	284.020.550	-
29	Rumbia	728.889.825	-
30	Bumi Nabung	630.763.650	-
31	Bina Karya Utama	579.108.485	70.991.300
32	Seputih Banyak	1.173.932.501	40.979.200
33	Sukobinangun	316.806.875	-
34	Seputih Mataram	1.324.305.000	-
35	Jati Datar	890.081.850	-
36	Seputih Surabaya	1.023.590.093	84.584.700
37	Gaya Baru 5	771.530.400	-
38	Sriwijaya Mataram	819.663.235	42.892.100
39	Anak Tuha	182.304.400	-
<b>Jumlah</b>		<b>29.367.029.367,00</b>	<b>446.089.100,00</b>

#### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan tranfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. Pendapatan Transfer dianggarkankan sebesar Rp2.109.658.989.652,00 terealisasi sebesar Rp2.091.657.159.232,00 atau 99,15%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya sebesar Rp2.086.403.282.682,33 maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.253.876.549,67 atau naik 0,25% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.15. Pendapatan Transfer**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.974.658.989.652,00	1.987.454.150.583,00	100,65	1.970.721.003.774,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.000.000.000,00	104.203.008.649,00	77,19	115.682.278.908,33
	<b>Jumlah</b>	<b>2.109.658.989.652,00</b>	<b>2.091.657.159.232,00</b>	<b>99,15</b>	<b>2.086.403.282.682,33</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.1.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp1.974.658.989.652,00 terealisasi sebesar Rp1.987.454.150.583,00 atau 100,65%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya sebesar Rp1.970.721.003.774,00 maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp16.733.146.809,00 atau naik 0,85% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.16. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021(Rp)	%	Realisasi TA 2020(Rp)
1	Dana Perimbangan	1.651.364.764.652,00	1.664.299.043.383,00	100,78	1.625.918.929.774,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	9.907.524.000,00	9.907.524.000,00	100,00	34.625.097.000,00
3	Dana Desa	313.386.701.000,00	313.247.583.200,00	99,96	310.176.977.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.974.658.989.652,00</b>	<b>1.987.454.150.583,00</b>	<b>100,65</b>	<b>1.970.721.003.774,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dirinci sebagai berikut:

#### 1) Dana Perimbangan - LRA

Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.664.299.043.383,00 atau sebesar 100,78% dari anggaran sebesar Rp1.651.364.764.652,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.17. Dana Perimbangan – LRA**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021(Rp)	%	Realisasi TA 2020(Rp)
1	Dana Bagi Hasil	42.274.963.222,00	73.279.957.288,00	173,34	33.545.484.116,00
2	Dana Alokasi Umum	1.233.414.075.000,00	1.233.414.075.000,00	100,00	1.248.686.762.000,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	97.616.099.000,00	92.492.306.802,00	94,75	62.547.183.193,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	278.059.627.430,00	265.112.704.293,00	95,34	281.139.500.465,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.651.364.764.652,00</b>	<b>1.664.299.043.383,00</b>	<b>100,78</b>	<b>1.625.918.929.774,00</b>

#### a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2021 sebesar Rp73.279.957.288,00 terdiri dari:

**Tabel 5.18. Dana Bagi Hasil (DBH)**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	23.169.023.900,00	49.312.125.517,00	212,84	0,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.977.837.000,00	16.047.415.130,00	114,81	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	564.918.800,00	685.316.029,00	121,31	0,00
4	Bagi Hasil Cukai Tambakau (CHT)	11.960.147,00	51.118.605,00	427,41	103.399.816,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.105.162.300,00	3.322.393.130,00	157,82	5.249.193.048,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.447.600,00	262.211.090,00	10.712,99	559.003.599,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	646.993.700,00	1.487.474.891,00	229,91	637.869.386,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	38.345.407,00	0,00	0,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	196.122.950,00	491.200.542,00	250,46	205.481.722,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	155.296.825,00	224.737.797,00	144,71	49.715.350,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.445.200.000,00	1.357.619.150,00	93,94	788.276.289,00
12	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	69.194.924,00
13	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	0,00	0,00	0,00	3.107.532.244,00
14	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	0,00	0,00	5.539.905.521,00
15	Bagi Hasil dari Pajak PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP orang pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	14.334.247.083,00
16	Bagi Hasil Dana Biaya Pungutan PBB bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	190.173.200,00
17	Bagi Hasil Alokasi PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	2.711.491.934,00
	<b>Jumlah</b>	<b>42.274.963.222,00</b>	<b>73.279.957.288,00</b>	<b>173,34</b>	<b>33.545.484.116,00</b>

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021 sebesar Rp1.233.414.075.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.19. Dana Alokasi Umum (DAU)**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.233.414.075.000,00	1.233.414.075.000,00	100,00	1.248.686.762.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.233.414.075.000,00</b>	<b>1.233.414.075.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.248.686.762.000,00</b>

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Pemerintah Pusat sebesar Rp92.492.306.802,00 terdiri dari:

**Tabel 5.20. Dana Alokasi Khusus – Fisik**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	20.875.126.900,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	407.897.000,00	406.010.000,00	99,54	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	25.549.213.000,00	25.168.870.407,00	98,51	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.783.152.000,00	4.746.434.014,00	99,23	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	445.000.000,00	425.484.000,00	95,61	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	211.054.000,00	197.185.120,00	93,43	0,00
7	DAK Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	28.011.976.666,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.425.264.000,00	7.250.848.600,00	97,65	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.376.042.000,00	2.778.237.744,00	82,29	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.979.696.000,00	3.924.205.294,00	98,61	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.893.390.000,00	2.808.157.400,00	97,05	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.400.000.000,00	1.357.416.500,00	96,96	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.233.455.000,00	612.153.154,00	49,63	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	40.000.000,00	39.599.604,00	99,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan	4.340.000.000,00	4.338.000.900,00	99,95	1.680.000.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	945.000.000,00	939.448.750,00	99,41	954.903.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	14.832.782.000,00	14.148.936.227,00	95,39	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.215.897.000,00	8.479.303.039,00	92,01	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	8.547.855.000,00	8.272.207.973,00	96,78	1.035.000.000,00
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.488.781.000,00	3.488.781.000,00	100,00	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.201.621.000,00	3.111.027.076,00	97,17	2.791.157.927,00
22	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	3.217.740.000,00
24	DAK Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.981.278.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>97.616.099.000,00</b>	<b>92.492.306.802,00</b>	<b>94,75</b>	<b>62.547.183.193,00</b>

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Pemerintah Pusat sebesar Rp265.112.704.293,00 terdiri dari:

**Tabel 5.21. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	233.934.691.000,00	233.934.691.000,00	100,00	215.562.821.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.848.750.000,00	2.848.750.000,00	100,00	1.351.750.000,00
3	DAK Non Fisik-BOP PAUD	19.767.000.000,00	18.554.700.000,00	93,87	19.242.000.000,00
4	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.934.400.000,00	4.846.350.000,00	98,22	32.109.664.181,00
5	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.497.706.385,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	431.258.000,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.097.666.534,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	4.619.942.218,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.986.587.721,00	2.986.587.721,00	100,00	2.973.731.000,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	753.122.000,00	753.122.000,00	100,00	417.358.000,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.188.503.572,00	1.188.503.572,00	100,00	4.551.016.284,00
12	Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	85.560.000,00
13	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	4.845.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>278.059.627.430,00</b>	<b>265.112.704.293,00</b>	<b>95,34</b>	<b>281.139.500.465,00</b>

Untuk Pendapatan Transfer DAK Non Fisik BOK KB-BOK, Pengawasan Obat dan Makanan, Akreditasi Puskesmas, Jaminan Persalinan pada tahun 2021 tidak ada realisasi hal ini disebabkan karena masih terdapat SILPA pada tahun 2020, karena untuk saat ini SILPA diperhitungkan ditahun berikutnya.

**2) Dana Insentif Daerah (DID)**

Pada Tahun 2021 Kabupaten Lampung Tengah memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp9.907.524.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.22. Dana Insentif Daerah (DID)**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	9.907.524.000,00	9.907.524.000,00	100,00	0,00
2	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi	0,00	0,00	0,00	22.672.625.000,00
3	Pemulihan Ekonomi Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	11.952.472.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.907.524.000,00</b>	<b>9.907.524.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.625.097.000,00</b>

### 3) Dana Desa

Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dengan realisasi sebesar Rp313.247.583.200,00 terdiri dari:

**Tabel 5.23. Dana Desa**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Desa	313.386.701.000,00	313.247.583.200,00	99,96	310.176.977.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>313.386.701.000,00</b>	<b>313.247.583.200,00</b>	<b>99,96</b>	<b>310.176.977.000,00</b>

#### 5.1.1.2.b Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan dana bagi hasil pajak dari pendapatan pajak daerah Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar Rp104.203.008.649,00 yang terdiri dari:

**Tabel 5.24. Transfer Antar Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	27.000.000.000,00	22.734.751.034,00	84,20	21.545.908.975,71
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.000.000.000,00	12.112.710.995,00	37,85	15.955.212.072,61
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	45.990.000.000,00	30.273.789.325,00	65,83	32.203.458.561,54
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	10.000.000,00	144.156.027,00	1.441,56	122.620.733,47
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	30.000.000.000,00	38.937.601.268,00	129,79	45.855.078.565,00
	<b>Jumlah</b>	<b>135.000.000.000,00</b>	<b>104.203.008.649,00</b>	<b>77,19</b>	<b>115.682.278.908,33</b>

#### 5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp218.210.099.940,00 terealisasi sebesar Rp159.344.909.348,00 atau 73,02%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya sebesar Rp165.045.908.212,70 maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.700.998.864,70 atau turun 3,45%. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

**Tabel 5.25. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LRA**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	29.018.028.490,00	8.817.781.348,00	30,39	164.969.440.975,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	189.192.071.450,00	150.527.128.000,00	79,56	76.467.237,70
	<b>Jumlah</b>	<b>218.210.099.940,00</b>	<b>159.344.909.348,00</b>	<b>73,02</b>	<b>165.045.908.212,70</b>

##### 1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah sebesar Rp8.817.781.348,00 ini merupakan dana *Reimbursement* IPDMIP yang terbagi dalam tiga OPD yaitu Bappeda sebesar Rp393.660.190,00, Dinas Pengairan sebesar Rp6.526.043.992,00 dan Dinas Pertanian sebesar

Rp1.898.077.166,00. Pendapatan Hibah dari Pemerintah hanya terealisasi sebesar 30,39% disebabkan karena, kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana Hibah dari Pusat pada awalnya di biyai dari dana APBD lalu baru di-*Reimburse* ke pusat, pencairan dari Pusat lambat, sehingga kegiatan untuk tahap selanjutnya terlambat yang mengakibatkan realisasi rendah.

- 2) Hibah dana BOS merupakan penerimaan dana BOS dari pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Lampung, yang ditransfer ke masing-masing sekolah.

### 5.1.2. BELANJA DAN TRANSFER - LRA

Belanja dan Transfer merupakan salah satu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.833.897.326.813,00 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp2.546.800.514.903,95 atau 89,87% yang terbagi dalam:

**Tabel 5.26. Belanja Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.851.965.760.013,00	1.709.448.587.852,85	92,30	1.751.804.973.672,78
2	Belanja Modal	456.031.748.580,00	355.715.743.166,02	78,00	215.187.156.758,22
3	Belanja Tak Terduga	59.000.000.000,00	15.693.913.480,08	26,60	37.695.401.411,00
4	Belanja Transfer	466.899.818.220,00	465.942.270.405,00	99,79	465.288.862.578,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.833.897.326.813,00</b>	<b>2.546.800.514.903,95</b>	<b>89,87</b>	<b>2.469.976.394.420,00</b>

Berdasarkan rincian Belanja dan Transfer di atas diketahui bahwa secara umum Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp76.824.120.483,95 atau 3.11 % dibandingkan Tahun 2020.

Komposisi Belanja dan Transfer pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

#### 5.1.2.1. Belanja Operasi - LRA

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi belanja operasi dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021 sebesar Rp1.709.448.587.852,85,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.27. Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.232.872.697.588,00	1.182.712.688.859,00	95,93	1.179.969.542.945,00
2	Belanja Barang dan Jasa	536.702.907.099,00	451.814.621.700,70	84,18	444.002.558.337,78
3	Belanja Subsidi	147.600.000,00	141.600.000,00	95,93	0,00
4	Belanja Hibah	82.242.555.326,00	74.779.677.293,15	90,93	127.832.872.390,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.851.965.760.013,00</b>	<b>1.709.448.587.852,85</b>	<b>92,30</b>	<b>1.751.804.973.672,78</b>

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp1.751.804.973.672,78 maka realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp42.356.385.819,93 atau 2,42%. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.232.872.697.588,00 terealisasi sebesar Rp1.182.712.688.859,00 atau 95,93%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.179.969.542.945,00 maka realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.743.145.914,00 atau 0,23 % yang disebabkan karena adanya penambahan Pegawai PPPK, Belanja Pegawai terdiri dari:

**Tabel 5.28. Belanja Pegawai**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	733.326.901.379,00	725.647.651.496,00	98,95	726.045.639.358,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	82.944.692.355,00	80.193.482.497,00	96,68	70.323.640.254,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	318.978.264.942,00	297.535.887.410,00	93,28	311.613.290.617,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.148.604.900,00	26.429.988.518,00	93,89	21.027.432.624,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.917.392,00	133.218.882,00	78,87	75.381.852,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	963.120.000,00	96,98	672.000.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	64.991.971.620,00	49.708.305.056,00	76,48	48.709.390.740,00
8	Belanja Pegawai BLUD	3.320.225.000,00	2.101.035.000,00	63,28	1.502.767.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.232.872.697.588,00</b>	<b>1.182.712.688.859,00</b>	<b>95,93</b>	<b>1.179.969.542.945,00</b>

Dari uraian diatas, lebih lanjut dapat dijelaskan rincian objek Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 sebesar Rp1.182.712.688.859,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp725.647.651.496,00 dengan rincian dibawah ini:

**Tabel 5.29. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Gaji Pokok ASN	559.479.642.906,00	557.897.994.392,00	99,72	560.698.785.638,00
2	Tunjangan Keluarga ASN	53.941.375.728,00	52.553.939.822,00	97,43	53.275.621.574,00
3	Tunjangan Jabatan ASN	9.608.090.608,00	9.556.839.950,00	99,47	10.167.228.747,00
4	Tunjangan Fungsional ASN	41.585.043.050,00	40.381.030.000,00	97,10	40.394.855.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.347.278.000,00	6.170.355.000,00	97,21	5.817.207.000,00
6	Tunjangan Beras ASN	31.599.728.014,00	30.793.925.632,00	97,45	26.292.587.940,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	901.651.818,00	862.374.356,00	95,64	1.524.131.335,00
8	Pembulatan Gaji ASN	7.675.602,00	7.494.551,00	97,64	6.702.570,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.283.395.281,00	22.878.117.024,00	90,49	27.868.519.554,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.143.255.096,00	1.134.926.379,00	99,27	0,00
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	3.429.765.276,00	3.410.654.390,00	99,44	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>733.326.901.379,00</b>	<b>725.647.651.496,00</b>	<b>98,95</b>	<b>726.045.639.358,00</b>

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN  
 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp80.193.482.497,00 dengan rincian dibawah ini:

**Tabel 5.30. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan PNS**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	77.350.461.975,00	74.601.350.062,00	96,45	65.443.868.016,00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.436.500.000,00	3.434.560.000,00	99,94	3.020.440.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN	2.157.730.380,00	2.157.572.435,00	99,99	1.859.332.238,00
	<b>Jumlah</b>	<b>82.944.692.355,00</b>	<b>80.193.482.497,00</b>	<b>96,68</b>	<b>70.323.640.254,00</b>

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

**Tabel 5.31. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.698.086.510,00	4.591.682.438,00	97,74	3.869.464.230,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	575.475.000,00	341.189.953,00	59,29	421.235.800,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	236.068.364.209,00	226.878.436.980,00	96,11	206.917.569.220,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	19.012.800,00	0,00	0,00	59.628.300,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.153.750.000,00	3.118.500.000,00	98,88	1.943.967.995,00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	57.655.824.423,00	46.862.642.287,00	81,28	0,00
7	Belanja Honorarium	16.807.752.000,00	15.743.435.752,00	93,67	0,00
8	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	28.381.500.623,00
9	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	69.309.792.850,00
10	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100.728.599,00
11	Belanja Lauk Pauk dan Uang Piket	0,00	0,00	0,00	609.403.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>318.978.264.942,00</b>	<b>297.535.887.410,00</b>	<b>93,28</b>	<b>311.613.290.617,00</b>

- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD mengalami kenaikan sebesar Rp19.960.867.760,00 atau sebesar 9,65% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp206.917.569.220,00 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji pokok karena kenaikan pangkat, ada pegawai yang lulus sertifikasi guru baru dan adanya mutasi pegawai yang masuk ke Lampung Tengah.
- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD mengalami kenaikan sebesar Rp1.174.532.005,00 atau sebesar 60,42% hal ini disebabkan karena adanya CPNS baru, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) baru, dan ada guru yang baru lulus Sarjana Strata 1 (S1).
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada tahun 2021 ada perbedaan kode rekening dengan tahun 2020 yang masuk ke dalam belanja jasa kantor.

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami kenaikan sebesar Rp5.402.555.894,00 atau sebesar 25,69% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp26.429.988.518,00 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan kemampuan keuangan daerah dari tingkat sedang ke tingkat tinggi, sehingga belanja tunjangan jabatan, Komunikasi, Reses dan transportasi mengalami kenaikan.

**Tabel 5.32. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.109.535.000,00	99,58	955.080.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	164.000.000,00	125.193.600,00	76,34	106.822.800,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.500.000,00	130.066.320,00	80,04	129.486.960,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.035.500,00	99,51	95.508.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.500.271.500,00	1.608.825.750,00	107,24	1.384.866.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200,00	148.991.850,00	97,55	0,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	39.463.200,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.775.900.000,00	99,50	6.300.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.192.505.000,00	99,43	1.575.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	98.000.000,00	785.498,00	0,80	812.664,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.768.000.000,00	5.683.500.000,00	83,98	0,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.592.800.000,00	6.556.500.000,00	99,45	4.581.600.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	436.065.000,00	3.150.000,00	0,72	0,00
14	Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00	30.145.500,00
15	Tunjangan Komisi	0,00	0,00	0,00	61.387.200,00
16	Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	0,00	31.241.700,00
17	Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	0,00	7.856.100,00
18	Tunjangan Badan Pembentukan Perda	0,00	0,00	0,00	16.625.700,00
19	Tunjangan Perumahan	0,00	0,00	0,00	5.751.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.148.604.900,00</b>	<b>26.429.988.518,00</b>	<b>93,89</b>	<b>21.027.432.624,00</b>

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami kenaikan sebesar Rp57.837.030,00 atau sebesar 76,73% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp75.381.852,00 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan kemampuan keuangan daerah dari tingkat sedang ke tingkat tinggi, sehingga gaji dan tunjangan KDH/WKDH mengalami kenaikan.

**Tabel 5.33. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	43.200.000,00	79,12	25.200.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	5.880.000,00	76,92	2.520.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	77.760.000,00	79,12	45.360.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	6.083.280,00	75,00	1.738.080,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	281.232,00	294.722,00	104,80	563.052,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	880,00	78,57	720,00
	<b>Jumlah</b>	<b>168.917.392,00</b>	<b>133.218.882,00</b>	<b>78,87</b>	<b>75.381.852,00</b>

- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  
Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp963.120.000,00 dengan rincian dibawah ini:

**Tabel 5.34. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	252.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	570.000.000,00	95,00	420.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>993.120.000,00</b>	<b>963.120.000,00</b>	<b>96,98</b>	<b>672.000.000,00</b>

- (7) Belanja Pegawai BOS  
Realisasi belanja pegawai BOS Tahun 2021 sebesar Rp49.708.305.056,00 mengalami kenaikan sebesar Rp998.914.316,00 dari tahun 2020 sebesar Rp48.709.390.740,00 dengan rincian dibawah ini:

**Tabel 5.35. Belanja Pegawai BOS**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021(Rp)	%	Realisasi TA 2020(Rp)
1	Belanja Pegawai BOS	64.991.971.620,00	49.708.305.056,00	76,48	48.709.390.740,00
	<b>Jumlah</b>	<b>64.991.971.620,00</b>	<b>49.708.305.056,00</b>	<b>76,48</b>	<b>48.709.390.740,00</b>

- (8) Belanja Pegawai BLUD  
Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp3.320.225.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.101.035.000,00

**Tabel 5.36. Belanja Pegawai BLUD**

Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021(Rp)	%	Realisasi TA 2020(Rp)
Belanja Pegawai BLUD	3.320.225.000,00	2.101.035.000,00	63,28	1.502.767.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.320.225.000,00</b>	<b>2.101.035.000,00</b>	<b>63,28</b>	<b>1.502.767.500,00</b>

### 5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa - LRA

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp536.702.907.099,00 terealisasi sebesar Rp451.814.621.700,70 atau 84,18%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp444.002.558.337,78 maka realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.812.063.362,92 atau 1,76%, dengan rincian dibawah ini:

**Tabel 5.37. Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Barang	95.183.377.416,00	73.074.984.726,30	76,77	129.124.153.968,90
2	Belanja Jasa	222.210.225.437,00	194.504.016.513,20	87,53	126.224.143.433,48
3	Belanja Pemeliharaan	48.159.706.233,00	42.082.848.594,20	87,38	37.440.753.286,40
4	Belana Perjalanan Dinas	39.291.215.000,00	26.575.184.827,00	67,64	33.440.264.412,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.133.006.000,00	4.459.252.100,00	86,87	28.879.883.893,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	93.719.516.914,00	78.572.843.183,00	83,84	88.893.359.344,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.005.860.099,00	32.545.491.757,00	98,61	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>536.702.907.099,00</b>	<b>451.814.621.700,70</b>	<b>84,18</b>	<b>444.002.558.337,78</b>

#### 1) Belanja Barang

Belanja Barang Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp95.183.377.416,00 dan terealisasi sebesar Rp73.074.984.726,30 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.38. Belanja Barang**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	95.145.412.016,00	73.052.356.661,30	76,78	129.124.153.968,90
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	37.965.400,00	22.628.065,00	59,60	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>95.183.377.416,00</b>	<b>73.074.984.726,30</b>	<b>76,77</b>	<b>129.124.153.968,90</b>

Dari Rincian Objek belanja barang pakai habis tersebut diatas maka dapat dikelompokkan dalam beberapa sub rincian objek belanja sebagai berikut:

##### a) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi belanja barang pakai habis sebesar Rp73.052.356.661,30 terdiri dari:

**Tabel 5.39. Belanja Barang Pakai Habis**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.966.126.460,00	2.810.275.250,00	94,75	0,00
2	Belanja Bahan Kimia	306.681.190,00	277.356.830,00	90,44	168.687.910,00
3	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1.309.149.713,00	730.087.828,00	55,77	2.044.411.110,00
4	Belanja Bahan Baku	3.378.343.460,00	2.502.218.510,00	74,07	490.329.985,00
5	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	121.827.500,00	109.355.000,00	89,76	335.552.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	60.024.000,00	4.157.000,00	6,93	6.980.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	126.551.000,00	53.179.000,00	42,02	64.050.900,00
8	Belanja Perlengkapan Promosi dan Pameran	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00
9	Belanja Barang Persediaan/Stock	0,00	0,00	0,00	2.561.793.200,00
10	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	443.678.199,00
11	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	4.227.702.860,00
12	Belanja Cinderamata/Souvenir/Vandle, Piala Bentuk Penghargaan	0,00	0,00	0,00	198.451.500,00
13	Belanja alat dan perlengkapan pertan, bun, ternak, ikan, tambang, ESDM dan hut pakai habis	0,00	0,00	0,00	11.150.000,00
14	Belanja Bahan Praktek Pertanian/ Perikanan/Perkebunan/Kehutanan	0,00	0,00	0,00	825.257.400,00
15	Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	77.635.000,00	77.621.140,00	99,98	0,00
16	Belanja Bahan dan Peralatan Inseminasi Buatan (IB)	0,00	0,00	0,00	107.250.000,00
17	Belanja Bahan Logistik	0,00	0,00	0,00	102.223.000,00
18	Belanja Bahan Praktek Kesehatan	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
19	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.328.330.241,00	677.304.525,00	29,09	1.866.067.931,00
20	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	810.520.000,00	766.350.151,00	94,55	0,00
21	Belanja Suku Cadang Alat Besar	2.238.805.000,00	1.231.744.445,00	55,02	0,00
22	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	1.675.800.000,00	1.017.908.700,00	60,74	0,00
23	Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium	12.000.000,00	11.880.000,00	99,00	0,00
24	Belanja Suku Cadang Alat Pertanian	21.455.000,00	20.828.800,00	97,08	0,00
25	Belanja Suku Cadang Alat Bengkel	13.567.500,00	13.437.500,00	99,04	0,00
26	Belanja Suku Cadang Lainnya	10.000.000,00	9.988.000,00	99,88	0,00
27	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	16.166.272.163,40
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	13.835.765.939,00	12.735.083.060,00	92,04	8.912.996.824,00
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.438.424.333,00	15.416.051.131,00	83,61	14.070.422.450,00
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	448.188.000,00	414.454.000,00	92,47	335.028.400,00
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	57.900.000,00	42.234.800,00	72,94	472.369.600,00
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.247.527.980,00	2.042.378.000,00	90,87	0,00
33	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.940.000,00	12.337.140,00	88,50	0,00
34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	783.842.619,00	760.070.318,30	96,97	895.231.643,00
35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	53.200.000,00	52.668.000,00	99,00	0,00
36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	32.566.200,00	32.502.000,00	99,80	20.992.400,00
37	Belanja Bahan Pemeliharaan Jalan	0,00	0,00	0,00	2.684.199.385,00
	Jumlah	51.368.171.135,00	41.821.471.128,30	81,42	57.049.998.860,40

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
	<b>Saldo Pindahan</b>	<b>51.368.171.135,00</b>	<b>41.821.471.128,30</b>	<b>81,42</b>	<b>57.049.998.860,40</b>
38	Belanja Bahan Pameran	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
39	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera	246.900.000,00	246.468.500,00	99,83	0,00
40	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.085.931.050,00	853.251.885,00	78,57	0,00
41	Belanja Obat-Obatan	5.246.787.388,00	3.158.473.363,00	60,20	7.948.046.527,00
42	Belanja Obat-Obatan Lainnya	7.501.070.943,00	5.701.003.502,00	76,00	0,00
43	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	279.485.000,00	278.490.449,00	99,64	46.470.875.081,50
44	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	134.000.000,00	133.467.200,00	99,60	0,00
45	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0,00	1.438.671.620,50
46	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.566.230.000,00	12.687.897.445,00	68,34	5.767.978.715,00
47	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.888.650.000,00	2.738.420.850,00	94,80	1.433.924.217,50
48	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	240.000.000,00	228.004.600,00	95,00	0,00
49	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.710.445.000,00	149.630.300,00	8,75	656.572.637,00
50	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.588.790.000,00	1.241.440.000,00	78,14	5.556.790.825,00
51	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/wakil KDH	0,00	0,00	0,00	339.763.985,00
52	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	209.000.000,00	208.676.600,00	99,85	7.994.800,00
53	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	100.000.000,00	97.020.000,00	97,02	10.500.000,00
54	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	356.800.000,00	333.839.000,00	93,56	309.936.000,00
55	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	61.075.000,00	60.656.200,00	99,31	170.737.600,00
56	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	482.361.500,00	464.721.380,00	96,34	116.497.000,00
57	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	111.600.000,00	110.613.000,00	99,12	55.440.000,00
58	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	160.000.000,00	146.338.500,00	91,46	156.750.000,00
59	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	68.750.000,00	68.200.000,00	99,20	0,00
60	Belanja Pakaian Penyelamatan	35.000.000,00	34.893.100,00	99,69	0,00
61	Belanja Pakaian Siaga	10.350.000,00	6.345.740,00	61,31	0,00
62	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.139.750.000,00	946.043.260,00	83,00	0,00
63	Belanja Pakaian KORPRI	7.500.000,00	7.499.250,00	99,99	9.250.000,00
64	Belanja Pakaian Adat Daerah	364.000.000,00	296.956.000,00	81,58	347.875.000,00
65	Belanja Pakaian Batik Tradisional	329.280.000,00	264.875.700,00	80,44	142.102.825,00
66	Belanja Pakaian Olahraga	853.485.000,00	767.659.709,00	89,94	631.977.900,00
67	Belanja Pakaian dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	129.535.200,00
68	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00	0,00	324.589.800,00
69	Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00	0,00	38.545.375,00
	<b>Jumlah</b>	<b>95.145.412.016,00</b>	<b>73.052.356.661,30</b>	<b>76,78</b>	<b>129.124.153.968,90</b>

Belanja Makan dan Minuman KDH/Wakil KDH pada tahun 2021 masuk ke kategori belanja Makan dan Minuman Rapat dan Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan.

**b) Belanja Barang Tak Habis Pakai**

Belanja Barang Tak Habis Pakai terealisasi sebesar Rp22.628.065,00 terdiri dari:

**Tabel 5.40. Belanja Barang Tak Habis Pakai**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	21.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)	16.965.400,00	16.628.065,00	98,01	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.965.400,00</b>	<b>22.628.065,00</b>	<b>59,60</b>	<b>0,00</b>

**2) Belanja Jasa**

Realisasi belanja jasa pada Tahun 2021 sebesar Rp194.504.016.513,20 mengalami kenaikan sebesar Rp68.279.873.079,72 atau sebesar 54,09% dari Tahun 2020 sebesar Rp126.224.143.433,48. Kenaikan ini diantaranya disebabkan karena pada tahun 2021 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan bukan hanya untuk Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN tetapi juga untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, PBI, Peserta PBPB dan BP kelas 3 dan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN. Belanja Jasa terdiri dari:

**Tabel 5.41. Belanja Jasa**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	169.030.433.099,00	145.702.470.343,20	86,20	110.303.441.243,48
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.440.891.704,00	22.242.329.974,00	94,89	332.663.163,00
3	Belanja Sewa Tanah	48.000.000,00	43.000.000,00	89,58	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.489.759.650,00	2.224.189.600,00	89,33	1.517.929.610,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.499.005.500,00	1.115.095.270,00	74,39	686.598.500,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	61.000.000,00	60.898.200,00	99,83	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.377.131.251,00	19.062.448.626,00	93,55	10.887.896.550,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.812.700.000,00	1.797.242.500,00	99,15	0,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	96.000.000,00	96,00	292.300.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.349.304.233,00	2.160.342.000,00	64,50	2.203.314.367,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>222.210.225.437,00</b>	<b>194.504.016.513,20</b>	<b>87,53</b>	<b>126.224.143.433,48</b>

Dari Rincian Objek belanja Jasa tersebut diatas maka dapat dikelompokkan dalam beberapa sub rincian objek belanja sebagai berikut:

**a) Belanja Jasa Kantor**

Realisasi belanja jasa kantor sebesar Rp145.702.470.343,20 terdiri dari:

**Tabel 5.42. Belanja Jasa Kantor**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.160.000,00	0,00	-	0,00
2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	172.750.000,00	172.500.000,00	99,86	0,00
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.959.375.000,00	6.470.504.500,00	81,29	0,00
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.442.330.800,00	15.585.754.950,00	89,36	0,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.358.800.000,00	3.282.800.000,00	97,74	0,00
6	Honorarium Rohaniwan	332.500.000,00	308.900.000,00	92,90	0,00
7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	339.090.000,00	307.400.000,00	90,65	0,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.354.100.000,00	4.318.725.000,00	99,19	181.582.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	685.650.000,00	441.500.000,00	64,39	0,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	19.686.900.000,00	19.633.500.000,00	99,73	0,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.261.192.185,00	10.518.372.761,00	73,76	24.056.309.962,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	231.588.850,00	225.081.650,00	97,19	205.064.091,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	694.200.000,00	691.537.500,00	99,62	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.560.400.000,00	1.547.350.000,00	99,16	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	996.000.000,00	988.000.000,00	99,20	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.047.000.000,00	6.016.000.000,00	99,49	0,00
18	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.767.600.000,00	2.735.900.000,00	98,85	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.408.200.000,00	4.408.125.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Ahli	865.720.000,00	725.448.350,00	83,80	4.864.426.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.766.400.000,00	5.638.543.008,00	97,78	253.955.930,00
22	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.023.000.000,00	6.814.268.000,00	97,03	0,00
23	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.142.950.000,00	982.150.000,00	85,93	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	114.600.000,00	108.600.000,00	94,76	0,00
25	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	312.000.000,00	276.000.000,00	88,46	1.007.800.526,00
26	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	0,00
27	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.118.000.000,00	1.962.867.700,00	92,68	0,00
28	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	101.990.000,00	54.250.762,20	53,19	7.198.000,00
29	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	7.370.083,00	1.145.500,00	15,54	2.991.500,00
30	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	236.200.000,00	208.076.000,00	88,09	50.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>103.176.066.918,00</b>	<b>94.611.300.681,20</b>	<b>91,70</b>	<b>30.629.328.009,00</b>

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
	Saldo Pindahan	103.176.066.918,00	<b>94.611.300.681,20</b>	91,70	<b>30.629.328.009,00</b>
31	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	272.140.000,00	247.680.000,00	91,01	137.570.000,00
32	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
33	Belanja Jasa Kalibrasi	99.100.000,00	97.912.084,00	98,80	0,00
34	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.892.995.000,00	1.785.894.170,00	94,34	178.114.585,00
35	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	380.400.000,00	380.348.010,00	99,99	0,00
36	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	74.350.000,00	65.000.000,00	87,42	9.620.366.024,00
37	Belanja Jasa Penyelaman	12.610.100.000,00	5.177.430.000,00	41,06	0,00
38	Belanja Tagihan Telepon	160.200.000,00	66.078.653,00	41,25	582.066.694,00
39	Belanja Tagihan Listrik	33.235.102.881,00	28.997.195.858,00	87,25	29.682.096.495,00
40	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.989.739.500,00	11.079.163.901,00	85,29	2.295.677.000,00
41	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.743.658.800,00	3.007.218.740,00	80,33	1.922.097.476,00
42	Belanja Paket/Pengiriman	170.380.000,00	51.961.500,00	30,50	904.900,00
43	Belanja Penambahan Daya	48.000.000,00	10.352.000,00	21,57	0,00
44	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.800.000,00	3.604.746,00	21,46	0,00
45	Belanja Lembur	118.400.000,00	91.050.000,00	76,90	0,00
46	Belanja Medical Check Up	40.000.000,00	27.280.000,00	68,20	0,00
47	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	184.620.000,00
48	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	109.737.255,00
49	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	3.785.000,00
50	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	31.625.000,00
51	Belanja Jasa Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.341.893.525,07
52	Belanja Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	10.226.471.580,41
53	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	334.140.700,00
54	Belanja Premi Peserta PBI Daerah ke BPJS	0,00	0,00	0,00	16.918.787.000,00
55	Belanja Beasiswa Bagi Pendidik	0,00	0,00	0,00	104.160.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>169.030.433.099,00</b>	<b>145.702.470.343,20</b>	<b>86,20</b>	<b>110.303.441.243,48</b>

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp22.242.329.974,00 terdiri dari:

**Tabel 5.43. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	364.645.704,00	237.200.000,00	65,05	0,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	19.364.412.800,00	18.915.934.500,00	97,68	0,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	1.535.587.200,00	1.535.587.200,00	100,00	0,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	418.848.000,00	76.132.791,00	18,18	0,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.757.398.000,00	1.477.475.483,00	84,07	332.663.163,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.440.891.704,00</b>	<b>22.242.329.974,00</b>	<b>94,89</b>	<b>332.663.163,00</b>

c) Belanja Sewa Tanah

Realisasi belanja sewa tanah sebesar Rp43.000.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.44. Belanja Sewa Tanah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Tanah Kering	30.000.000,00	25.000.000,00	83,33	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>89,58</b>	0,00

- Belanja Sewa Tanah ada pada 3 (tiga) OPD yaitu Dinas PP & PA sebesar Rp12.000.000,00 dipergunakan untuk sewa kantor UPTD dan Rumah Aman, Dinas Pendidikan sebesar Rp6.000.000,00 dipergunakan untuk sewa gedung pertemuan dan Dinas Perdagangan sebesar Rp25.000.000,00 untuk Tempat Pembuangan Akhir.

d) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.224.189.600,00 terdiri dari:

**Tabel 5.45. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	690.500.000,00	621.932.600,00	90,07	607.144.110,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	470.100.000,00	429.466.400,00	91,36	0,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	28.000.000,00	9.000.000,00	32,14	0,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	862.270.000,00	785.565.600,00	91,10	381.295.000,00
7	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	78.985.000,00	51.745.000,00	65,51	0,00
8	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	237.705.000,00	224.719.000,00	94,54	132.372.000,00
9	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	55.199.650,00	51.095.000,00	92,56	0,00
10	Belanja Sewa Lemari dan Arsip Pejabat	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Sewa System/Power Supply	44.000.000,00	36.666.000,00	83,33	0,00
12	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	397.118.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.489.759.650,00</b>	<b>2.224.189.600,00</b>	<b>89,33</b>	<b>1.517.929.610,00</b>

- Belanja Sewa Meja, Kursi Pejabat, Kursi Tamu dilaksanakan untuk kegiatan pada Bagian Umum Setdakab Lampung Tengah, kegiatan ini dilaksanakan dengan pertimbangan jika dilakukan pengadaan akan timbul kebutuhan yang lainnya seperti Gudang untuk tempat penyimpanan, Sarung Kursi, Kendaraan Angkutan, Tenaga Kuli Angkutan, Biaya Pemeliharaan sehingga Belanja Sewa dipandang lebih efektif dan efisien.

e) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.115.095.270,00 terdiri dari:

**Tabel 5.46. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gudang	6.600.000,00	6.600.000,00		0,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.492.405.500,00	1.108.495.270,00		456.826.000,00
3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00		199.772.500,00
4	Belanja Sewa Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	0,00	0,00		30.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.499.005.500,00</b>	<b>1.115.095.270,00</b>	<b>74,39</b>	<b>686.598.500,00</b>

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp60.898.200,00 terdiri dari:

**Tabel 5.47. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	61.000.000,00	60.898.200,00	99,83	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>60.898.200,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp19.062.448.626,00 terdiri dari:

**Tabel 5.48. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	26.000.000,00	25.850.000,00	99,42	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	502.093.750,00	498.159.600,00	99,22	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	28.462.500,00	28.376.000,00	99,70	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.307.468.731,00	1.274.599.000,00	97,49	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	285.000.000,00	283.570.000,00	99,50	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	360.000.000,00	359.350.000,00	99,82	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	98.600.000,00	98,60	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.250.000,00	0,00	-	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.371.756.250,00	1.327.647.100,00	96,78	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	255.000.000,00	252.786.000,00	99,13	0,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	52.000.000,00	49.643.088,00	95,47	0,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	240.000.000,00	215.965.400,00	89,99	0,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	15.844.600.020,00	14.647.902.438,00	92,45	0,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	8.230.014.350,00
17	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	1.096.361.200,00
18	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	661.804.000,00
19	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan	0,00	0,00	0,00	67.969.000,00
20	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	686.748.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.377.131.251,00</b>	<b>19.062.448.626,00</b>	<b>93,55</b>	<b>10.887.896.550,00</b>

h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp1.797.242.500,00 terdiri dari:

**Tabel 5.49. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	322.700.000,00	321.100.000,00	99,50	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	95.000.000,00	94.369.100,00	99,34	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	145.000.000,00	144.928.000,00	99,95	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	252.000.000,00	250.531.300,00	99,42	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	49.270.000,00	98,54	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	340.000.000,00	339.000.000,00	99,71	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	70.000.000,00	69.373.600,00	99,11	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	538.000.000,00	528.670.500,00	98,27	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.812.700.000,00</b>	<b>1.797.242.500,00</b>	<b>99,15</b>	<b>0,00</b>

i) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Realisasi belanja beasiswa pendidikan PNS pada TA 2021 sebesar Rp96.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau 96,00%.

**Tabel 5.50. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	192.300.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	96.000.000,00	<b>96,00</b>	100.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96,00</b>	<b>292.300.000,00</b>

j) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.160.342.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.51. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	1.439.304.233,00	698.342.000,00	48,52	1.378.150.000,00
2	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	30.978.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	1.910.000.000,00	1.462.000.000,00	76,54	74.146.367,00
4	Belanja pendidikan penjenjangan	0,00	0,00	0,00	208.500.000,00
5	Belanja Kontribusi Peserta	0,00	0,00	0,00	99.890.000,00
6	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	411.650.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.349.304.233,00</b>	<b>2.160.342.000,00</b>	<b>64,50</b>	<b>2.203.314.367,00</b>

- k) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah  
Realisasi Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah pada TA 2021 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau 0%.

**Tabel 5.52. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

### 3) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja Pemeliharaan sebesar Rp42.082.848.594,20 terdiri dari:

**Tabel 5.53. Belanja Pemeliharaan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	41.215.000,00	41.215.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.087.567.385,00	13.978.297.409,00	86,89	1.568.001.808,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.736.696.999,00	5.972.862.292,00	61,34	8.499.509.807,40
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.289.906.849,00	22.086.153.893,20	99,09	27.373.241.671,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.159.706.233,00</b>	<b>42.082.848.594,20</b>	<b>87,38</b>	<b>37.440.753.286,40</b>

### 4) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp26.575.184.827,00 terdiri dari:

**Tabel 5.54. Belanja Perjalanan Dinas**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.064.125.000,00	21.856.199.134,00	70,36	19.827.044.102,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.624.763.000,00	3.810.469.500,00	57,52	13.613.220.310,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	171.810.000,00	107.040.000,00	62,30	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.430.517.000,00	801.476.193,00	56,03	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39.291.215.000,00</b>	<b>26.575.184.827,00</b>	<b>67,64</b>	<b>33.440.264.412,00</b>

**5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.55. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.188.076.000,00	3.990.952.100,00	95,29	28.879.883.893,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	944.930.000,00	468.300.000,00	49,56	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.133.006.000,00</b>	<b>4.459.252.100,00</b>	<b>86,87</b>	<b>28.879.883.893,00</b>

Dari Belanja diatas dapat diuraikan sebagai Berikut:

- Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.990.952.100,00 diberikan untuk hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp242.472.100,00, Beasiswa untuk mahasiswa jurusan bahasa lampung bekerja sama dengan Universitas Lampung sebesar Rp96.800.000,00, dan Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp3.651.680.000,00
- Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp468.300.000,00 diberikan dalam bentuk jasa konsultasi hukum, jasa pengolah data dan pemantauan alur distribusi pangan, jasa Pemantau harga pangan, jasa Uji Sampel SHK (Skrining Hipertiroid Kongenital) yaitu pengambilan darah pada balita kemudian dikirim ke RS Cipto Mangun Kusumo untuk di cek di lab, dan penyediaan perbekalan kesehatan untuk paket perbekalan anak terlantar, lansia, disabilitas, dan orang dalam gangguan jiwa.

**6) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS**

Realisasi belanja barang dan jasa dana BOS pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp78.572.843.183,00 dari anggaran sebesar Rp93.719.516.914,00 atau 83,84%.

**Tabel 5.56. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	93.719.516.914,00	78.572.843.183,00	83,84	88.893.359.344,00
	<b>Jumlah</b>	<b>93.719.516.914,00</b>	<b>78.572.843.183,00</b>	<b>83,84</b>	<b>88.893.359.344,00</b>

## 7) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp32.545.491.757,00 atau sebesar 98,61% dari anggaran sebesar Rp33.005.860.099,00.

**Tabel 5.57. Belanja Barang dan Jasa BLUD**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.005.860.099,00	32.545.491.757,00	98,61	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.005.860.099,00</b>	<b>32.545.491.757,00</b>	<b>98,61</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.2.1.c. Belanja Subsidi -LRA

Realisasi Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp141.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp147.600.000,00 atau 95,93%.

**Tabel 5.58. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	147.600.000,00	141.600.000,00	95,93	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>147.600.000,00</b>	<b>141.600.000,00</b>	<b>95,93</b>	<b>0,00</b>

Belanja Subsidi merupakan kegiatan Pasar Murah berupa beras pada Dinas Ketahanan Pangan, yang bekerjasama dengan Gapoktan Manunggal.

### 5.1.2.1.d. Belanja Hibah - LRA

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021 belanja hibah terealisasi sebesar Rp74.779.677.293,15 atau 90,93% dari anggaran sebesar Rp82.242.555.326,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja hibah Tahun 2020 sebesar Rp127.832.872.390,00 maka realisasi belanja hibah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp53.053.195.096,85 atau turun 41,50%.

Pengelolaan dana hibah ini diatur dengan Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Lampung. Dalam pengelolaan dana hibah pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan pemerintahan daerah terhadap instansi vertikal, penyelenggaraan pendidikan di swasta, organisasi keagamaan dan organisasi lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun rincian realisasi belanja hibah selama TA 2021 sebagai berikut :

**Tabel 5.59. Belanja Hibah**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.400.000.000,00	7.174.419.186,00	96,95	86.074.014.250,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	73.668.287.928,00	66.430.990.709,15	90,18	28.953.858.140,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.174.267.398,00	1.174.267.398,00	100,00	0,00
4	Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	12.805.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>82.242.555.326,00</b>	<b>74.779.677.293,15</b>	<b>90,93</b>	<b>127.832.872.390,00</b>

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka realisasi belanja hibah lebih rinci dapat kami sajikan sebagai berikut:

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp7.174.419.186,00 atau 96,95% dari anggaran sebesar Rp7.400.000.000,00. Belanja hibah kepada pemerintah pusat terdiri dari:

**Tabel 5.60. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.884.000.000,00	6.769.939.000,00	86.074.014.250,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	516.000.000,00	404.480.186,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.400.000.000,00</b>	<b>7.174.419.186,00</b>	<b>86.074.014.250,00</b>

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat terdiri dari:

a) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

**Tabel 5.61. Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Komando Distrik 0411/Lampung Tengah	2.150.000.000,00	3.250.000.000,00
2	Kepolisian Resor Daerah Lam-Teng	3.800.000.000,00	6.574.014.250,00
3	Polinela Kampus 2 Kab. Lampung Tengah	385.939.000,00	-
4	Brimob Polda Lampung	300.000.000,00	-
5	Penyelenggaraan Pendidikan S1 di UGM	134.000.000,00	-
6	Akademi Komunitas Negeri Lampung Tengah (AKNEL)	-	500.000.000,00
7	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lampung Tengah	-	56.250.000.000,00
8	BAWASLU Kab. Lampung Tengah	-	19.500.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.769.939.000,00</b>	<b>86.074.014.250,00</b>

b) Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp404.480.186,00 merupakan belanja Retensi pemeliharaan jalan provinsi sebesar Rp388.640.186,00 dan Hibah barang berupa Al-Quran untuk MTQ Tingkat Provinsi sebesar Rp15.840.000,00.

2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp73.668.287.928,00 dan terealisasi sebesar Rp66.430.990.709,15.

**Tabel 5.62. Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.998.695.786,00	1.675.407.549,52	83,83	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	37.336.678.701,00	32.564.326.225,00	87,22	28.953.858.140,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	34.332.913.441,00	32.191.256.934,63	93,76	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>73.668.287.928,00</b>	<b>66.430.990.709,15</b>	<b>90,18</b>	<b>28.953.858.140,00</b>

3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp1.174.267.398,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.174.267.398,00 terdiri dari:

**Tabel 5.63 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Partai Amanat Nasional	40.699.750,00	40.699.750,00	100,00	40.699.750,00
2	Partai Golongan Karya	212.992.973,00	212.992.973,00	100,00	212.992.973,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P)	249.347.242,00	249.347.242,00	100,00	249.347.242,00
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	101.135.748,00	101.135.748,00	100,00	101.135.748,00
5	Partai Gerindra	158.124.343,00	158.124.343,00	100,00	158.124.343,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	135.287.758,00	135.287.758,00	100,00	135.287.758,00
7	Partai Demokrat	117.462.162,00	117.462.162,00	100,00	117.462.162,00
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	116.161.559,00	116.161.559,00	100,00	116.161.559,00
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	43.055.863,00	43.055.863,00	100,00	43.055.863,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.174.267.398,00</b>	<b>1.174.267.398,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.174.267.398,00</b>

**5.1.2.2. BELANJA MODAL - LRA**

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan dalam pelaksanaan APBD TA 2021 sebesar Rp355.715.743.166,02 terdiri dari:

**Tabel 5.64. Belanja Modal - LRA**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.261.437.881,00	59.812.652.966,20	71,84	48.621.694.404,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.196.012.965,00	29.532.011.364,76	88,96	56.129.630.343,15
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	335.874.262.734,00	265.962.869.887,06	79,19	109.551.116.514,07
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	700.035.000,00	408.208.948,00	58,31	884.715.497,00
	<b>Jumlah</b>	<b>456.031.748.580,00</b>	<b>355.715.743.166,02</b>	<b>78,00</b>	<b>215.187.156.758,22</b>

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2020 maka realisasi Belanja Modal Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp140.528.586.407,80 atau 65,31%. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1.2.2.a Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 tetapi tidak ada realisasi.

**Tabel 5.65. Belanja Modal Tanah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.1.2.2.b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp83.261.437.881,00 terealisasi sebesar Rp59.812.652.966,20 atau 71,84%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp48.621.694.404,00 maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp11.190.958.562,20 atau sebesar 23,02%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:

**Tabel 5.66. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	151.444.225,00	32.485.000,00	21,45	38.447.750,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.235.710.000,00	2.644.535.271,00	81,73	8.979.878.496,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	467.351.200,00	455.770.804,00	97,52	1.888.866.095,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	18.450.000,00	18.298.500,00	99,18	2.038.875.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.976.874.842,00	6.002.197.125,00	66,86	28.258.166.206,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	891.541.000,00	852.749.346,00	95,65	709.096.078,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.939.908.694,00	3.469.426.402,00	31,71	4.110.533.711,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	50.684.160.106,00	40.940.666.309,20	80,78	0,00
9	Belanja Modal Komputer	7.548.692.814,00	5.232.642.197,00	69,32	2.505.261.568,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	196.500.000,00	20.000.000,00	10,18	0,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	105.000.000,00	104.890.000,00	99,90	12.421.500,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	39.600.000,00	38.067.012,00	96,13	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.205.000,00	925.000,00	14,91	56.848.000,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>83.261.437.881,00</b>	<b>59.812.652.966,20</b>	<b>71,84</b>	<b>48.621.694.404,00</b>

Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

##### (1) Belanja Modal Alat Besar

Realisasi belanja modal alat besar dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp32.485.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.67. Belanja Modal Alat Besar**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Apung	22.000.000,00	21.989.000,00	99,95	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	129.444.225,00	10.496.000,00	8,11	38.447.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>151.444.225,00</b>	<b>32.485.000,00</b>	<b>21,45</b>	<b>38.447.750,00</b>

## (2) Belanja Modal Alat Angkutan

Realisasi belanja modal alat angkutan dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp2.644.535.271,00 terdiri dari:

**Tabel 5.68. Belanja Modal alat Angkutan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.235.710.000,00	2.644.535.271,00	81,73	8.979.878.496,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.235.710.000,00</b>	<b>2.644.535.271,00</b>	<b>81,73</b>	<b>8.979.878.496,00</b>

## (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Realisasi belanja modal alat bengkel dan alat ukur dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp455.770.804,00 terdiri dari:

**Tabel 5.69. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	65.000.000,00	57.910.000,00	89,09	1.888.866.095,00
2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	56.000.000,00	54.999.604,00	98,21	0,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	346.351.200,00	342.861.200,00	98,99	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>467.351.200,00</b>	<b>455.770.804,00</b>	<b>97,52</b>	<b>1.888.866.095,00</b>

## (4) Belanja Modal Alat Pertanian

Realisasi belanja modal alat pertanian dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp18.298.500,00 terdiri dari:

**Tabel 5.70. Belanja Modal Alat Pertanian**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan	18.450.000,00	18.298.500,00	99,18	2.038.875.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.450.000,00</b>	<b>18.298.500,00</b>	<b>99,18</b>	<b>2.038.875.000,00</b>

## (5) Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi belanja modal pengadaan alat kantor dan rumah tangga dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp6.002.197.125,00 terdiri dari:

**Tabel 5.71. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	2.935.884.152,00	1.107.404.809,00	37,72	25.139.882.279,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.193.864.460,00	4.069.151.066,00	78,35	3.027.539.427,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	847.126.230,00	825.641.250,00	97,46	90.744.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.976.874.842,00</b>	<b>6.002.197.125,00</b>	<b>66,86</b>	<b>28.258.166.206,00</b>

- (6) Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar  
Realisasi belanja modal pengadaan alat studio komunikasi, dan pemancar dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp852.749.346,00 terdiri dari:

**Tabel 5.72. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Studio	606.041.000,00	572.704.350,00	94,50	127.397.125,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	285.500.000,00	280.044.996,00	98,09	187.623.953,00
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	394.075.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>891.541.000,00</b>	<b>852.749.346,00</b>	<b>95,65</b>	<b>709.096.078,00</b>

- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan  
Realisasi belanja alat kedokteran dan kesehatan dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp3.469.426.402,00 terdiri dari:

**Tabel 5.73. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.379.459.675,00	1.406.828.658,00	16,79	4.084.760.961,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.560.449.019,00	2.062.597.744,00	80,56	25.772.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.939.908.694,00</b>	<b>3.469.426.402,00</b>	<b>31,71</b>	<b>4.110.533.711,00</b>

Belanja Modal Alat Kedokteran terdapat pada kegiatan di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya (BLUD) hanya terealisasi sebesar 16,79% hal ini disebabkan karena pendapatan yang direncanakan untuk belanja modal mengalami penurunan sehingga belanja tidak dapat terealisasi.

- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium  
Belanja modal alat laboratorium dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp50.684.160.106,00 dan terealisasi sebesar Rp40.940.666.309,20 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.74. Belanja Modal Alat Laboratorium**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	32.121.260.106,00	23.890.175.309,20	74,37	0,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	15.737.640.000,00	15.614.123.500,00	99,22	0,00
3	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	69.810.000,00	23.946.000,00	34,30	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.700.000.000,00	1.357.416.500,00	50,27	0,00
5	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	55.450.000,00	55.005.000,00	99,20	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.684.160.106,00</b>	<b>40.940.666.309,20</b>	<b>80,78</b>	<b>0,00</b>

- (9) Belanja Modal Komputer  
Realisasi belanja modal komputer dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp5.232.642.197,00 terdiri dari:

**Tabel 5.75. Belanja Modal Komputer**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Pengadaan Komputer Unit Jaringan	755.000.000,00	149.798.000,00	19,84	165.580.000,00
2	Pengadaan Personal Komputer	1.304.101.290,00	286.188.451,00	21,95	1.928.469.130,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	4.919.292.520,00	4.449.938.389,00	90,46	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan peralatan komputer mainframe	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	224.435.000,00	70.736.717,00	31,52	392.402.438,00
6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	35.000.000,00	0,00	-	14.300.000,00
7	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	310.864.004,00	275.980.640,00	88,78	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.548.692.814,00</b>	<b>5.232.642.197,00</b>	<b>69,32</b>	<b>2.505.261.568,00</b>

Realisasi Belanja Modal Komputer Pengadaan Computer Unit Jaringan dan Pengadaan *Personal Computer* pada Puskesmas realisasinya rendah karena Pendapatan Kapitasi Rendah sehingga belanja modal komputer tidak dapat direalisasikan.

(10) Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja modal alat eksplorasi dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00.

**Tabel 5.76. Belanja Modal Alat Eksplorasi**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	196.500.000,00	20.000.000,00	10,18	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>196.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>

(11) Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Belanja modal pengadaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 terealisasi sebesar Rp104.890.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.77. Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Sumur	105.000.000,00	104.890.000,00	99,90	12.421.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>104.890.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>12.421.500,00</b>

Belanja Modal Sumur merupakan belanja pembangunan sumur bor pada Dinas Perdagangan yaitu pada 3 UPTD Pasar Kalirejo, Pasar Wates dan Pasar Trimurjo.

(12) Belanja Modal Rambu-Rambu

Belanja modal Rambu-Rambu tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp39.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp38.067.012,00.

**Tabel 5.78. Belanja Modal Rambu-Rambu**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	39.600.000,00	38.067.012,00	96,13	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>38.067.012,00</b>	<b>96,13</b>	<b>0,00</b>

## (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja modal Peralatan Olahraga tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp6.205.000,00 dan terealisasi sebesar Rp925.000,00

**Tabel 5.79. Belanja Modal Peralatan Olahraga**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.205.000,00	925.000,00	14,91	56.848.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>14,91</b>	<b>56.848.000,00</b>

Belanja Modal Peralatan Olah Raga hanya terealisasi sebesar Rp925.000,00 disebabkan karena adanya kesalahan dalam penganggaran pada Puskesmas Rama Indra yang seharusnya belanja Pakaian Olah Raga dianggarkan pada Belanja Modal Alat Olah Raga.

## (14) Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

Belanja modal pengadaan alat keamanan dan perlindungan tahun 2021 tidak dianggarkan.

**Tabel 5.80. Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300.000,00</b>

**5.1.2.2.c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp33.196.012.965,00 dan terealisasi sebesar Rp29.532.011.364,76,00 atau 88,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp56.129.630.343,15 maka realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp26.597.618.978,39 atau sebesar 47,39%. Belanja modal gedung dan bangunan terdiri dari:

**Tabel 5.81. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
<b>I. Belanja Modal Bangunan Gedung</b>					
	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>29.603.012.965,00</b>	<b>26.322.237.794,76</b>	<b>88,92</b>	<b>56.129.630.343,15</b>
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.403.128.074,00	4.978.861.535,92	92,15	24.071.428.370,55
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.602.840.000,00	8.618.303.032,90	89,75	4.226.077.394,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	250.000.000,00	224.046.000,00	89,62	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.799.829.000,00	10.031.515.581,00	92,89	17.142.000.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	305.632.000,00	300.103.706,44	98,19	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Terbuka	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.608.233.891,00	651.812.095,00	40,53	783.443.800,00
8	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.523.350.000,00	1.418.215.543,50	93,10	0,00
9	Belanja Modal Taman	100.000.000,00	99.380.300,00	99,38	0,00
10	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	44.914.000,00
11	Belanja Modal Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.846.545.028,60
12	Belanja Modal bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	15.221.750,00
	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>	<b>1.580.000.000,00</b>	<b>1.414.970.100,00</b>	<b>89,56</b>	<b>0,00</b>
1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.580.000.000,00	1.414.970.100,00	89,56	0,00
<b>II. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>					
	<b>Belanja Modal Tugu/Tanda Batas</b>	<b>2.013.000.000,00</b>	<b>1.794.803.470,00</b>	<b>89,16</b>	<b>0,00</b>
1	Belanja Modal Pagar	1.950.000.000,00	1.731.803.470,00	88,81	0,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.196.012.965,00</b>	<b>29.532.011.364,76</b>	<b>88,96</b>	<b>56.129.630.343,15</b>

#### 5.1.2.2.d Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dianggarkan sebesar Rp335.874.262.734,00 terealisasi sebesar Rp265.962.869.887,06 atau 79,19%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp109.551.116.514,07 maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp156.411.753.372,99 atau sebesar 142,78%. Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

**Tabel 5.82. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	261.414.692.074,00	199.923.662.507,00	76,48	52.558.071.414,00
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.104.500.000,00	1.007.827.916,50	91,25	0,00
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	36.339.425.500,00	32.384.850.547,04	89,12	27.841.437.270,00
4	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	267.000.000,00	233.960.580,17	87,63	2.010.027.118,49
5	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	583.006.123,00	465.816.714,54	79,90	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	317.000.000,00	286.203.100,00	90,28	1.187.341.174,25
7	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	2.186.480.897,00	1.965.181.903,30	89,88	3.412.103.656,09
8	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	1.000.000.000,00	937.780.291,99	93,78	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	26.486.425.500,00	23.041.551.460,52	86,99	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	5.267.617.063,73
11	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.100.000.000,00	984.105.000,00	89,46	13.497.751.744,52
12	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.488.781.000,00	3.488.781.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Modal Instalasi Lain	710.264.000,00	482.681.400,00	67,96	0,00
14	Belanja Modal Jaringan Listrik	876.687.640,00	760.467.466,00	86,74	0,00
15	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	505.266.364,00
16	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	3.271.500.708,99
17	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>335.874.262.734,00</b>	<b>265.962.869.887,06</b>	<b>79,19</b>	<b>109.551.116.514,07</b>

#### 5.1.2.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp700.035.000,00 terealisasi sebesar Rp408.208.948,00 atau 58,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp884.715.497,00 maka realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp476.506.549,00 atau 53,86%. Belanja Modal aset tetap lainnya terdiri dari:

**Tabel 5.83. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Anggaran TA 2021(Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	551.735.000,00	260.800.950,00	47,27	35.081.300,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	45.400.000,00	45.308.000,00	99,80	39.972.900,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	102.900.000,00	102.099.998,00	99,22	0,00
4	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	809.661.297,00
	<b>Jumlah</b>	<b>700.035.000,00</b>	<b>408.208.948,00</b>	<b>58,31</b>	<b>884.715.497,00</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

##### 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja modal bahan perpustakaan dianggarkan sebesar Rp551.735.000,00 terealisasi sebesar Rp260.800.950,00 atau 47,27%.

**Tabel 5.84. Belanja Modal Bahan Perpustakaan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020(Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	51.530.000,00	43.505.000,00	84,43	21.860.000,00
2	Belanja Modal Buku Filsafat	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	2.000.000,00
3	Belanja Modal Buku Agama	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	2.000.000,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	2.000.000,00
5	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	2.000.000,00
6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	26.450.000,00	26.234.700,00	99,19	0,00
7	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	102.000.000,00	100.980.000,00	99,00	2.471.300,00
8	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	9.000.000,00	8.950.000,00	99,44	750.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10	Belanja Modal Audio Visual	328.505.000,00	46.881.250,00	14,27	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>551.735.000,00</b>	<b>260.800.950,00</b>	<b>47,27</b>	<b>35.081.300,00</b>

- 2) Belanja Modal Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga  
Realisasi belanja modal belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebesar Rp45.308.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.85. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	44.400.000,00	44.308.000,00	99,79	39.972.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>45.400.000,00</b>	<b>45.308.000,00</b>	<b>99,80</b>	<b>39.972.900,00</b>

- 3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud  
Belanja modal Aset Tidak Berwujud dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.86. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Software	102.900.000,00	102.099.998,00	99,22	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>102.900.000,00</b>	<b>102.099.998,00</b>	<b>99,22</b>	<b>0,00</b>

- 4) Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi  
Belanja modal pengadaan aset tetap renovasi pada TA 2021 tidak dianggarkan.

**Tabel 5.87. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	-	-	-	809.661.297,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>809.661.297,00</b>

### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp15.693.913.480,08 dari anggaran sebesar Rp59.000.000.000,00. Adapun Rincian belanja tak terduga sebagai berikut:

**Tabel 5.88. Belanja Tidak Terduga**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
	<b>Belanja Tak Terduga sebagai berikut:</b>	<b>59.000.000.000,00</b>	<b>15.693.913.480,08</b>	<b>26,60</b>	<b>37.695.401.411,00</b>
1	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan COVID-19	-	12.049.351.480,08	-	35.396.062.979,00
2	Belanja Tidak Terduga Untuk Bencana Alam Angin Putting Beliuang	-	441.960.500,00	-	247.886.500,00
3	Belanja Tidak Terduga Untuk Perbaikan Jembatan Darurat	-	2.962.343.000,00	-	1.395.063.000,00
4	Belanja Tidak Terduga Untuk Korban Bencana Kebakaran	-	57.603.500,00	-	67.074.000,00
5	Belanja Tidak Terduga Untuk Keg. Operasi Penyekatan Arus Balik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H.	-	182.655.000,00	-	-
6	Belanja Tidak Terduga Untuk Rehab Gedung Dinas Pendidikan	-	-	-	161.334.932,00
7	Belanja Tidak Terduga Untuk Perbaikan Badan Jalan Darurat	-	-	-	427.980.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>59.000.000.000,00</b>	<b>15.693.913.480,08</b>	<b>26,60</b>	<b>37.695.401.411,00</b>

### 5.1.2.4. Belanja Transfer - LRA

Realisasi belanja transfer sebesar Rp465.942.270.405,00 terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Rincian belanja transfer sebagai berikut:

#### 5.1.2.4.a. Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp10.551.873.020,00 terealisasi sebesar Rp9.734.373.020,00 atau 92,25%. Belanja bagi hasil pajak dan retribusi ini telah dialokasikan ke 301 kampung yang terdapat di 28 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.89. Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.396.173.020,00	8.796.173.020,00	93,61	6.750.449.980,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.155.700.000,00	938.200.000,00	81,18	1.016.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.551.873.020,00</b>	<b>9.734.373.020,00</b>	<b>92,25</b>	<b>7.766.649.980,00</b>

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa  
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp8.796.173.020,00 berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021.
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa  
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa terealisasi sebesar Rp938.200.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021.

#### 5.1.2.4.b. Belanja Transfer Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp456.347.945.200,00 terealisasi sebesar Rp456.207.897.385,00 atau 99,97% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.90. Belanja Transfer Bantuan Keuangan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	142.961.244.200,00	142.960.314.185,00	100,00	146.170.968.200,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	313.386.701.000,00	313.247.583.200,00	99,96	310.176.977.000,00
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.174.267.398,00
	<b>Jumlah</b>	<b>456.347.945.200,00</b>	<b>456.207.897.385,00</b>	<b>99,97</b>	<b>457.522.212.598,00</b>

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari:

**Tabel 5.91. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	142.961.244.200,00	142.960.314.185,00	100,00	146.170.968.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>142.961.244.200,00</b>	<b>142.960.314.185,00</b>	<b>100,00</b>	<b>146.170.968.200,00</b>

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan belanja bantuan keuangan operasional rutin kelurahan yaitu bantuan keuangan kepada desa yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Penetapan besaran alokasi dana desa tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah TA 2021.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, porsi pemenuhan alokasi dana desa telah tercapai 10% dari yang dipersyaratkan.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari:

**Tabel 5.92. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	313.386.701.000,00	313.247.583.200,00	99,96	310.176.977.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>313.386.701.000,00</b>	<b>313.247.583.200,00</b>	<b>99,96</b>	<b>310.176.977.000,00</b>

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat (APBN) yang kemudian diteruskan kepada masing-masing desa/kampung. Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021.

### 5.1.3. Surplus/Defisit

Surplus/Defisit Tahun 2021 sebagai berikut.

**Tabel 5.93. Surplus/Defisit**

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan - LRA	2.538.461.534.978,00	2.485.893.332.630,19	97,93	2.431.332.258.820,89
2	Belanja - LRA	2.833.897.326.813,00	2.546.800.514.903,95	89,87	2.469.976.394.420,00
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(295.435.791.835,00)</b>	<b>(60.907.182.273,76)</b>	<b>20,62</b>	<b>(38.644.135.599,11)</b>

### 5.1.4. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan salah satu pos yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

**Tabel 5.94. Pembiayaan Netto**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	303.670.970.014,00	257.110.970.014,44	84,67	200.010.842.976,16
2	Pengeluaran Pembiayaan	8.235.178.179,00	4.721.346.711,00	57,33	12.895.737.362,61
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>295.435.791.835,00</b>	<b>252.389.623.303,44</b>	<b>85,43</b>	<b>187.115.105.613,55</b>

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan terdiri dari:

**Tabel 5.95. Penerimaan Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	148.470.970.014,00	148.470.970.014,44	100,00	200.010.842.976,16
2	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	155.200.000.000,00	108.640.000.000,00	70,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>303.670.970.014,00</b>	<b>257.110.970.014,44</b>	<b>84,67</b>	<b>200.010.842.976,16</b>

Penerimaan Pinjaman Daerah Sebesar Rp108.640.000.000,00 merupakan Pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PERSERO) berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor: PERJ-142/SMI/0921 dan Nomor: 900/881/B.a.VII.02/2021.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.96. Pengeluaran Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	9.444.031.942,61
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	4.735.178.179,00	1.221.346.711,00	25,79	3.451.705.420,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.235.178.179,00</b>	<b>4.721.346.711,00</b>	<b>57,33</b>	<b>12.895.737.362,61</b>

Pengeluaran Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal pada BUMD merupakan penyertaan modal pada PT. Bank Lampung sebesar Rp3.500.000.000,00 berdasarkan surat PT. Bank Lampung No: B.1618/KC-BDJ/12/2021 Tgl. 20/12/2021 dan ND-BPKAD No: 059/ND-BPKAD/B.a.VII.02/2021 Tgl. 22/12/2021. Serta Persetujuan BUPATI.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang terdiri dari:
  - a. Pembayaran Pembiayaan Pengelolaan Pinjaman Daerah Kepada PT. SMI (Persero). Berdasarkan Surat PT. SMI (Persero) No: S-845/SMI/DPI/1021 Tgl. 13/10/2021 dan ND-BPKAD No :051/ND-BPKAD/B.a.VII.02/2021 Tgl.25-10-2021. Serta Persetujuan Bupati Tgl.27-10-2021 sebesar Rp287.120.000,00;
  - b. Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Kepada PT. SMI (Persero). Berdasarkan Surat PT. SMI (Persero) No: S-241/SMI/DPI/DPPU/1221 Tgl. 22/12/2021 dan ND-BPKAD No :058/ND-BPKAD/B.a.VII.02/2021 Tgl.22-12-2021. Serta Persetujuan Bupati sebesar Rp184.226.711,00;
  - c. Pembayaran Pembiayaan Pokok Hutang Jatuh Tempo Kepada PT. RADITA AUTOPRIMA. Berdasarkan Surat DINAS KESEHATAN NO: 900/3078/D.a.IV.02/XI/2021 Tgl. 9/11/2021 dan ND-BPKAD No :056/ND-BPKAD/B.a.VII.02/2021 Tgl.19-11-2021. Serta Persetujuan Bupati sebesar Rp750.000.000,00

**5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 5.97. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

No	Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Surplus/Defisit	(60.907.182.273,76)	(38.644.135.599,11)
2	Pembiayaan Netto	252.389.623.303,44	187.115.105.613,55
	<b>SILPA</b>	<b>191.482.441.029,68</b>	<b>148.470.970.014,44</b>

## 5.2. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

### 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan saldo hubungan antara saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo anggaran lebih awal Tahun 2021 sebesar Rp148.470.970.014,44 atau turun 25,77% yaitu sebesar Rp51.539.872.961,72 dari Tahun 2020 sebesar Rp200.010.842.976,16.

### 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2021 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp148.470.970.014,44 atau turun 25,77% yaitu sebesar Rp51.539.872.961,72 dari Tahun 2020 sebesar Rp200.010.842.976,16.

### 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2021 sebesar Rp191.482.441.029,68 atau naik 28,97% yaitu sebesar Rp43.011.471.015,24 dari Tahun 2020 sebesar Rp148.470.970.014,44.

#### 1) Surplus/Defisit – LRA

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/defisit-LRA Tahun 2021 sebesar (Rp60.907.182.273,76) atau naik 57,61% atau sebesar Rp22.263.046.674,65 dari Tahun 2020 sebesar (Rp38.644.135.599,11).

#### 2) Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan netto Tahun 2021 sebesar Rp252.389.623.303,44 atau naik 34,88% yaitu sebesar Rp65.274.517.689,89 dari Tahun 2020 sebesar Rp187.115.105.613,55.

### 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2021 dan 2020 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan dari tahun sebelumnya.

### 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp191.482.441.029,68 yang terdiri dari:

Tabel 5.98. Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Kas di BUD	146.860.040.289,39	134.820.060.390,15
2	Kas PFK	-	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	665.754.211,00
4	Kas di Bendahara Dana JKN FKTP	5.409.983.241,00	11.270.459.192,00
5	Kas di Bendahara BLUD	39.131.261.499,29	1.643.506.221,29
6	Kas di BOS	81.156.000,00	71.190.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>191.482.441.029,68</b>	<b>148.470.970.014,44</b>

### 5.3. Penjelasan Pos - Pos Neraca Per 31 Desember 2021 dan 2020

#### 5.3.1. Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Posisi aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.939.857.062.930,29 mengalami kenaikan sebesar Rp709.278.801.155,16 atau sebesar 21,96% dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.230.578.261.775,13.

Rincian aset dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.99. Aset**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Aset Lancar	268.313.241.502,86	218.421.366.774,95	49.891.874.727,91
2	Investasi Jangka Panjang	40.764.289.568,81	36.445.105.417,66	4.319.184.151,15
3	Aset Tetap	3.472.472.600.254,59	2.856.982.999.175,49	615.489.601.079,10
4	Aset Lainnya	158.306.931.604,03	118.728.790.407,03	39.578.141.197,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.939.857.062.930,29</b>	<b>3.230.578.261.775,13</b>	<b>709.278.801.155,16</b>

Dari tabel diatas, posisi aset per 31 Desember 2021 lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Posisi aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp268.313.241.502,86 atau mengalami kenaikan sebesar Rp49.891.874.727,91 atau sebesar 22,84% dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp218.421.366.774,95. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

**Tabel 5.100. Aset Lancar**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Kas di Kas Daerah	146.860.040.289,39	134.820.060.390,15	12.039.979.899,24
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	665.754.211,00	(665.754.211,00)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara BLUD	39.131.261.499,29	1.643.506.221,29	37.487.755.278,00
5	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	5.409.983.241,00	11.270.459.192,00	(5.860.475.951,00)
6	Kas di Bendahara Dana BOS	81.156.000,00	71.190.000,00	9.966.000,00
7	Kas Lainnya - Bendahara BOS	495.220.249,00	774.432.873,80	
8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	-
9	Piutang Pajak Daerah	32.614.582.438,81	29.082.650.376,51	3.531.932.062,30
10	Piutang Retribusi Daerah	42.288.000,00	132.518.400,00	
11	Piutang Lainnya	52.868.359.323,00	45.938.214.486,00	
12	Penyisihan Piutang Pajak	(23.781.714.998,33)	(21.974.965.086,87)	(1.806.749.911,46)
13	Penyisihan Piutang Lainnya	(430.296.395,12)	(382.066.502,43)	(48.229.892,69)
14	Persediaan	15.022.361.855,82	16.379.612.213,50	(1.357.250.357,68)
	<b>Jumlah</b>	<b>268.313.241.502,86</b>	<b>218.421.366.774,95</b>	<b>49.891.874.727,91</b>

Dari penjelasan diatas, rincian aset lancar dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah sebesar Rp146.860.040.289,39 merupakan saldo kas yang ada di dua rekening koran BUD yaitu rekening Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan nomor rekening 385.00.09.00xxx.x sebesar Rp41.966.821.013,31 dan rekening Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya dengan nomor rekening 035701001443xxx sebesar Rp104.893.219.276,08. Posisi Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp146.860.040.289,39 mengalami kenaikan sebesar Rp12.039.979.899,24 atau 8,93% dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp134.820.060.390,15.

**Tabel 5.101. Kas di Kas Daerah**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan nomor rekening 385.00.09.00xxx.x	41.966.821.013,31	63.015.636.736,09
2	Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandar Jaya dengan nomor rekening 035701001443xxx	104.893.219.276,08	71.804.423.654,06
	<b>Jumlah</b>	<b>146.860.040.289,39</b>	<b>134.820.060.390,15</b>

Dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp146.860.040.289,39 tersebut, terdapat pembatasan penggunaan kas di Kas Daerah sebesar Rp41.036.455.842,00 yang terdiri dari:

**Tabel 5.102. Pembatasan Penggunaan Kas**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana DAK Fisik	4.858.946.715,00
2	Dana DAK Non Fisik	33.890.755.872,00
3	Dana Non Kapitasi JKN	309.372.188,00
4	Dana Pemulihan Ekonomi Nasional	1.977.381.067,00
	<b>Jumlah</b>	<b>41.036.455.842,00</b>

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pada Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp0,00.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak ada saldo kas di bendahara penerimaan.

d) Kas di Bendahara BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Demang Sepulau Raya sebesar Rp39.131.261.499,29 yang berasal dari penerimaan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari:

**Tabel 5.103. Kas di Bendahara BLUD**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Rekening Bank Lampung Nomor 385.00.05.01xxx.x	39.131.261.499,29	1.643.506.221,29
	<b>Jumlah</b>	<b>39.131.261.499,29</b>	<b>1.643.506.221,29</b>

Kas di Bendahara BLUD pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena adanya Dana Covid 19 yang di transfer di akhir tahun oleh BPJS.

e) Kas di Bendahara Dana JKN

Kas di Bendahara Dana JKN sebesar Rp5.409.983.241,00 merupakan sisa kas pada rekening giro yang berada pada 39 puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Rincian pada **lampiran 1**.

**Tabel 5.104. Kas di Bendahara Dana JKN**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Rekening giro 39 puskesmas	5.409.983.241,00	11.270.459.192,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.409.983.241,00</b>	<b>11.270.459.192,00</b>

Kas di Bendahara BLUD pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat oleh Kementerian Sosial Pada tahun 2021, sehingga mempengaruhi Pendapatan Kapitasi Puskesmas, sebab Pendapatan Kapitasi diperoleh berdasarkan jumlah Peserta JKN di wilayah Faskes.

f) Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp81.156.000,00 merupakan sisa kas Bendahara BOS pada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Rincian pada **lampiran 2**.

**Tabel 5.105. Kas di Bendahara Dana BOS**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>1</b>	<b>Kas di Bendahara BOS pada SD</b>		
-	Saldo Rekening giro	4.196.000,00	1.190.000,00
-	Saldo Tunai	70.000.000,00	70.000.000,00
<b>2</b>	<b>Kas di Bendahara BOS pada SMP</b>		
-	Saldo Rekening giro	6.960.000,00	-
-	Saldo Tunai	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>81.156.000,00</b>	<b>71.190.000,00</b>

Selain Kas tersebut, terdapat Kas BOS yang belum tercatat senilai Rp115.026.723,00 per 31 Desember 2021 pada:

1. SDN 2 Indra Putra Subing senilai Rp34.500.000,00;
2. SMPN 1 Kalirejo senilai Rp34.122.933,00;
3. SDN 5 Lempuyang Bandar senilai Rp30.000.000,00;
4. SMPN 6 Terbanggi Besar senilai Rp6.801.790,00;

5. SMPN 5 Terbanggi Besar senilai Rp9.602.000,00.

Kas tersebut merupakan setoran pengembalian ke Rekening Kas BOS masing-masing sekolah berdasarkan rekomendasi pada LHP LKPD TA 2020 yang tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk uang tunai, SPj, ataupun saldo rekening bank oleh pihak sekolah.

g) Kas lainnya

Kas Lainnya sebesar Rp495.220.249,00 merupakan saldo kas pada Bendahara BOS atas pajak tahun 2021 yang belum disetor oleh sekolah per 31 Desember 2021. Rincian Kas Lainnya sebaga berikut:

**Tabel 5.106. Kas Lainnya**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021
1	SD	371.344.268,00
2	SMP	123.875.981,00
	<b>Jumlah</b>	<b>495.220.249,00</b>

h) Investasi Jangka Pendek

Tidak terdapat saldo pada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020.

i) Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah merupakan pos untuk menampung saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

**Tabel 5.107. Piutang Pajak Daerah**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	153.839.347,00	-	153.839.347,00
2	Piutang Pajak Rumah Makan	62.689.000,00	-	62.689.000,00
3	Piutang Pajak Hiburan	19.599.957,00	-	19.599.957,00
4	Piutang Pajak Parkir	105.930.639,00	-	105.930.639,00
5	Piutang Pajak PBB-P2	32.272.523.495,81	29.082.650.376,51	3.189.873.119,30
	<b>Jumlah</b>	<b>32.614.582.438,81</b>	<b>29.082.650.376,51</b>	<b>3.531.932.062,30</b>

Dari Tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2021 sebesar Rp153.839.347,00

2. Piutang Pajak Rumah Makan

Piutang Pajak Rumah Makan per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.689.000,00

3. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.599.957,00

4. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2021 sebesar Rp105.930.639,00

5. Piutang pajak PBB-P2.

Posisi piutang pajak PBB-P2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.272.523.495,81 mengalami kenaikan sebesar Rp3.189.873.119,30 atau 10,97% dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.082.650.376,51. Selama Tahun Anggaran 2021 terdapat penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dari tahun 2009-2021 dari Kampung/Kelurahan sebanyak 2.118 Objek Pajak sebesar Rp257.869.611,00 yang diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 47/KPTS/B.aVII.03/2021 tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Rincian Piutang Pajak sebagai berikut:

**Tabel 5.108. Piutang Pajak PBB-P2**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Tahun 2009	3.015.360.323,00	3.040.437.717,00	(25.077.394,00)
2	Tahun 2010	3.463.779.646,00	3.497.812.971,00	(34.033.325,00)
3	Tahun 2011	3.615.290.940,00	3.643.188.899,00	(27.897.959,00)
4	Tahun 2012	2.595.450.895,00	2.641.278.547,00	(45.827.652,00)
5	Tahun 2013	1.170.241.797,00	1.192.312.157,00	(22.070.360,00)
6	Tahun 2014	2.172.323.815,00	2.192.764.733,00	(20.440.918,00)
7	Tahun 2015	2.835.007.571,00	2.894.617.099,00	(59.609.528,00)
8	Tahun 2016	1.797.527.220,00	1.818.320.709,00	(20.793.489,00)
9	Tahun 2017	1.762.711.498,51	1.801.820.257,51	(39.108.759,00)
10	Tahun 2018	1.498.403.491,00	1.536.007.416,00	(37.603.925,00)
11	Tahun 2019	2.453.176.168,00	2.505.932.908,00	(52.756.740,00)
12	Tahun 2020	2.027.767.156,00	2.318.156.963,00	(290.389.807,00)
13	Tahun 2021	3.865.482.975,30	-	3.865.482.975,30
	<b>Jumlah</b>	<b>32.272.523.495,81</b>	<b>29.082.650.376,51</b>	<b>(675.609.856,00)</b>

j) Piutang Retribusi Daerah

Posisi piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.288.000,00 yang merupakan piutang PDAM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.109. Piutang Retribusi Daerah**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Piutang Retribusi IMB Satu Pintu	-	93.701.300,00	(93.701.300,00)
2	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	42.288.000,00	38.817.100,00	3.470.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>42.288.000,00</b>	<b>132.518.400,00</b>	<b>(90.230.400,00)</b>

k) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan dalam Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Pos Piutang Lainnya terdiri atas:

**Tabel 5.110. Piutang Lainnya**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	50.670.689.664,00	30.326.625.212,00	20.344.064.452,00
2	Piutang BLUD	1.312.654.359,00	15.131.450.274,00	(13.818.795.915,00)
3	Bagian Lancar TGR	14.501.300,00	24.000.000,00	(9.498.700,00)
4	Piutang Kemitraan Pihak Ketiga	825.100.000,00	410.725.000,00	414.375.000,00
5	Piutang lain-lain	45.414.000,00	45.414.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>52.868.359.323,00</b>	<b>45.938.214.486,00</b>	<b>6.930.144.837,00</b>

Dari tabel di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Piutang bagi hasil pajak Provinsi merupakan pos untuk menampung bagi hasil pajak dari Provinsi yang telah diterbitkan ketetapannya berupa Surat Keputusan Gubernur Lampung sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima oleh Kabupaten Lampung Tengah. Dasar Pencatatan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp50.670.689.664,00 sebagai berikut:

- Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/665/VI.03/HK/2021 Tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp20.169.752.496,00
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/183/VI.03?HK/2022 Tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp21.528.239.958,00
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/735/VI.03/HK/2021 Tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp8.972.697.210,00

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi terdiri dari:

**Tabel 5.111. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.475.978.292,00	11.383.394.409,00	2.092.583.883,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.829.389.283,00	4.586.408.547,00	4.242.980.736,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.296.595.324,00	14.297.655.090,00	4.998.940.234,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	96.029.555,00	59.167.166,00	36.862.389,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	8.972.697.210,00	-	8.972.697.210,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.670.689.664,00</b>	<b>30.326.625.212,00</b>	<b>20.344.064.452,00</b>

2. Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan pos untuk menampung piutang BLUD RSUD Demang Sepulau Raya yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021. Piutang BLUD RSUD Demang Sepulau Raya terdiri dari:

**Tabel 5.112. Piutang BLUD**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Piutang Obat Kronis	20.997.559,00	-	-
2	Klaim Jasa BPJS	1.291.656.800,00	2.062.850.000,00	(771.193.200,00)
3	Klaim Jasa Jampersal 2020	-	268.600.274,00	(268.600.274,00)
4	Klaim Covid 19 Bulan Maret sd Desember 2020	-	12.800.000.000,00	(12.800.000.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.312.654.359,00</b>	<b>15.131.450.274,00</b>	<b>(13.818.795.915,00)</b>

- Piutang BLUD, Piutang Obat Kronis sebesar Rp20.997.559,00 di catat berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor: 5070/BA/XIII-07/2021 Tanggal 01 Desember 2021 bulan pelayanan Juli 2021 sebesar Rp960.704,00, Nomor: 5071/BA/XIII-07/2021 Tanggal 01 Desember 2021 bulan pelayanan September 2021 sebesar Rp847.447,00, Nomor: 5072/BA/XIII-07/2021 Tanggal 01 Desember 2021 bulan pelayanan Oktober 2021 sebesar Rp1.674.917,00, Nomor: 855/BA/XIII-07/0322 Tanggal 09 Maret 2022 bulan pelayanan November 2021 sebesar Rp8.841.098,00, Nomor: 1155/BA/XIII-07/0422 Tanggal 06 April 2022 bulan pelayanan Desember 2021 sebesar Rp8.673.393,00
- Piutang BLUD Klaim Jasa BPJS sebesar Rp1.291.656.800,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor: 5525/BA/XIII-07/1221 bulan pelayanan November 2021 sebesar Rp662.881.400,00 dan Nomor: 702/BA/XIII-07/0222 bulan pelayanan Desember 2021 sebesar Rp628.775.400,00.

### 3. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian lancar tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan pos untuk menampung piutang atas TGR (bukan bendahara) yang jatuh tempo dan diharapkan dapat diterima kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal Neraca. Nilai sebesar Rp14.501.300,00 merupakan TGR yang telah diterbitkan surat keputusan atau memiliki ketetapan hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 02 November 2018, a.n A bersedia mengangsur TGR dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.000.000,00 yang dipotong dari gaji per bulan. Bagian lancar TGR untuk TA 2021 adalah sebesar Rp14.501.300,00 yang akan diterima pada TA 2022.

### 4. Piutang Kemitraan Pihak Ketiga

Piutang kemitraan pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp825.100.000,00 merupakan pos untuk menampung piutang kemitraan pihak ketiga yang jatuh tempo namun belum terbayar. Nilai piutang tersebut terdiri dari:

**Tabel 5.113. Piutang Kemitraan Pihak Ketiga**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	PT Pandu Jaya Buana	656.800.000,00	242.425.000,00	414.375.000,00
2	PT Sai Bumi Mandiri	168.300.000,00	168.300.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>825.100.000,00</b>	<b>410.725.000,00</b>	<b>414.375.000,00</b>

- a. Piutang PT Pandu Jaya Buana per 31 Desember 2021 sebesar Rp656.800.000,00 merupakan Piutang Pokok dan Denda. Pada Tanggal 6 Mei 2021 telah dilakukan pemutusan kontrak pengelolaan pasar daerah Bandar Jaya antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT. Pandu Jaya Buana dengan Nomor Surat 551.2/96/Setda.I.04/2021, karena telah melanggar Perjanjian Kerjasama (PKS) yang terakhir diatur dengan Adendum Nomor 75/ADD-PKS/Setda.1.01/2019 dan Nomor 014/PJB/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah Bandar Jaya Plaza Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Piutang PT Sai Bumi Mandiri per 31 Desember 2021 sebesar Rp168.300.000,00 merupakan tagihan atas kontribusi pengelolaan Pasar Rumbia berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT Sai Bumi Mandiri tentang Pengelolaan Pasar Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Nomor 045/ADD-PKS/Setda.1.01/2017 dan Nomor 01/ADD-SBM/XI/2017 PT Sai Bumi Mandiri. Dalam perjanjian kerjasama tersebut ditetapkan kontribusi sebesar Rp15.300.000,00 per bulan sampai dengan masa kerjasama berakhir yaitu 20 bulan sejak PKS ditandatangani. Piutang sebesar Rp137.700.000,00 merupakan sisa Piutang Tahun 2017 dan Piutang sebesar Rp30.600.000,00 merupakan sisa piutang Tahun 2018 yang belum terbayar.
5. Piutang Lain-Lain  
Saldo Piutang lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.414.000,00

**Tabel 5.114. Piutang Lain-Lain**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif & BPO DPRD Tahun 1996	45.414.000,00	45.414.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>45.414.000,00</b>	<b>45.414.000,00</b>	-

- 1) Penyisihan Piutang Pendapatan  
Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.781.714.998,33 terdiri dari:

**Tabel 5.115. Penyisihan Piutang Pendapatan**

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak			
	Piutang Pajak Parkir	105.930.639,00	0,50%	529.653,20
	Piutang Pajak Hotel			-
	- Umur Piutang < 1 Tahun	129.426.901,00	0,50%	647.134,51
	- Umur Piutang 1- 2 Tahun	24.412.446,00	10%	2.441.244,60
	Piutang Pajak Rumah Makan	62.689.000,00	0,50%	313.445,00
	Piutang Pajak Hiburan	19.599.957,00	0,50%	97.999,79
	Piutang Pajak PBB-P2	32.272.523.495,81		23.744.231.916,23
2	Penyisihan Piutang Retribusi	42.288.000,00		33.453.605,00
	<b>Jumlah</b>	<b>32.656.870.438,81</b>		<b>23.781.714.998,33</b>

Dari Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2

Penyisihan piutang pajak merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih pada saat penyusunan laporan keuangan. Besaran penyisihan piutang tersebut telah diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp23.744.231.916,23 merupakan penyisihan atas piutang PBB-P2.

**Tabel 5.116. Penyisihan Piutang Pajak**

No	Uraian	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2009	3.015.360.323,00	100%	3.015.360.323,00
2	2010	3.463.779.646,00	100%	3.463.779.646,00
3	2011	3.615.290.940,00	100%	3.615.290.940,00
4	2012	2.595.450.895,00	100%	2.595.450.895,00
5	2013	1.170.241.797,00	100%	1.170.241.797,00
6	2014	2.172.323.815,00	100%	2.172.323.815,00
7	2015	2.835.007.571,00	100%	2.835.007.571,00
8	2016	1.797.527.220,00	100%	1.797.527.220,00
9	2017	1.762.711.498,51	50%	881.355.749,25
10	2018	1.498.403.491,00	50%	749.201.745,50
11	2019	2.453.176.168,00	50%	1.226.588.084,00
12	2020	2.027.767.156,00	10%	202.776.715,600
13	2021	3.865.482.975,30	0,5%	19.327.414,88
	<b>Jumlah</b>	<b>32.272.523.495,81</b>		<b>23.744.231.916,23</b>

**Tabel 5.117. Tabel Umur Piutang Pajak**

No	Klasifikasi	Umur Piutang	%
1	lancar	< 1 tahun	0,5
2	kurang lancar	1 -2 tahun	10
3	diragukan	2-5 tahun	50
4	macet	> 5 tahun	100

2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Penyisihan piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.453.605,00, terdiri dari:

**Tabel 5.118. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

No	uraian	Nilai Piutang (Rp)	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Piutang Retribusi Penjualan Produksi			
-	Umur Piutang < 1 bulan	1.931.000,00	0,50%	9.655,00
-	Umur Piutang 1 - 3 bulan	4.877.000,00	10%	487.700,00
-	Umur Piutang 3 - 12 bulan	5.047.500,00	50%	2.523.750,00
-	Umur Piutang > 12 bulan	30.432.500,00	100%	30.432.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>42.288.000,00</b>		<b>33.453.605,00</b>

**Tabel 5.119. Tabel Umur Piutang Retribusi**

No	Klasifikasi	Umur Piutang	%
1	lancar	< 1 bln	0,5
2	kurang lancar	1 -3 bln	10
3	diragukan	3-12 bln	50
4	macet	> 12 bln	100

m) Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tak tertagih-piutang lainnya sebesar Rp430.296.395,12 merupakan penyisihan atas piutang lainnya yang dicatat pada Neraca per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.120. Penyisihan Piutang Lainnya**

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi (DBH) TA 2020	50.670.689.664,00	0,50%	253.353.448,32
2	Piutang BLUD	1.312.654.359,00	0,50%	6.563.271,80
3	Piutang TGR	14.501.300,00	100%	14.501.300,00
4	Piutang Kemitraan Pihak Ketiga PT.Pandu Jaya Buana			-
	- Umur Piutang < 1 Tahun	414.375.000,00	0,50%	2.071.875,00
	- Umur Piutang 1- 2 Tahun	242.425.000,00	10%	24.242.500,00
5	Piutang Kemitraan Pihak Ketiga PT Sai Bumi Mandiri	168.300.000,00	50%	84.150.000,00
6	Piutang Lain - Lain	45.414.000,00	100%	45.414.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>52.868.359.323,00</b>		<b>430.296.395,12</b>

n) Beban Dibayar Dimuka

Tidak terdapat saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020.

o) Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau barang yang akan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lampung Tengah, pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan harga terakhir. Posisi persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.022.361.855,82 atau turun sebesar Rp1.357.250.357,68 atau sebesar 8,29% dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.379.612.213,50 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.121. Persediaan**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Alat Tulis Kantor	946.724.830,00	836.268.145,00	110.456.685,00
2	Barang Cetak	1.582.383.155,00	2.473.822.150,00	(891.438.995,00)
3	Persediaan Vaksin	91.287.930,00	-	-
4	Kartu KIR	379.750.000,00	-	-
5	Persediaan Obat	7.588.983.528,00	8.940.066.073,68	(1.351.082.545,68)
6	Bahan Medis Pakai Habis	1.398.855.916,50	1.125.576.557,50	273.279.359,00
7	Bahan Medis Habis Reagen	272.728.609,00	-	272.728.609,00
8	Alat Listrik	-	1.265.000,00	(1.265.000,00)
9	Kartu Pintar	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
10	Barang yang akan di serahkan ke masyarakat	2.635.626.637,32	2.919.327.037,32	(283.700.400,00)
11	Bibit Ternak	38.151.250,00	40.551.250,00	(2.400.000,00)
12	Bibit Pertanian	-	2.736.000,00	(2.736.000,00)
13	Peti Jenazah	87.870.000,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>15.022.361.855,82</b>	<b>16.379.612.213,50</b>	<b>(1.357.250.357,68)</b>

Rincian persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- 1) Persediaan Barang yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp2.635.626.637,32 merupakan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) per 31 Desember 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- 2) Saldo persediaan di atas tidak termasuk persediaan obat yang sudah rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa yang terdapat pada:
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp1.101.055.832,00 tahun 2020, dan Tahun 2021 sebesar Rp78.086.342,00
  - RSUD Demang Sepulau Raya sebesar Rp79.355.791,00 terdiri dari perolehan Tahun 2018 Rp33.565.542,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp17.146.015,00 serta tahun 2020 sebesar Rp28.644.234,00
 Pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pemusnahan persediaan kadaluwarsa/rusak.
- 3) Persediaan dari Bantuan dari Pihak Ketiga, bantuan penanganan Covid-19 tidak menyebutkan nilai perolehan barang, saldo persediaan sebanyak 20.152 barang terdiri pada RSUD Demang Sepulau Raya sebanyak 10.184 Barang Pakai Habis.

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri dari:

**Tabel 5.122. Investasi Jangka Panjang**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	40.764.289.568,81	36.445.105.417,66	4.319.184.151,15
	<b>Jumlah</b>	<b>40.764.289.568,81</b>	<b>36.445.105.417,66</b>	<b>4.319.184.151,15</b>

- a) **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**  
Tidak terdapat saldo investasi Jangka Panjang non permanen per 31 Desember 2021 dan 2020.
- b) **Investasi Jangka Panjang permanen**  
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

**Tabel 5.123. Investasi Permanen**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	PT Bank Lampung	24.847.231.942,61	21.347.231.942,61	3.500.000.000,00
2	PT BPR Syariah Rajasa	15.917.057.626,20	15.097.873.475,05	819.184.151,15
	<b>Jumlah</b>	<b>40.764.289.568,81</b>	<b>36.445.105.417,66</b>	<b>4.319.184.151,15</b>

- Saldo penyertaan modal pada PT. Bank Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.847.231.942,61. Nilai penyertaan modal ke PT. Bank Lampung disajikan dengan metode biaya, yaitu nilai berdasarkan nilai penyertaan modalnya. Prosentase kepemilikan Saham Kabupaten Lampung Tengah pada Bank Lampung sebesar 5,61% berdasarkan Laporan Keuangan Auditeed per tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Rincian penyertaan modal pada PT. Bank Lampung sebagai berikut:

**Tabel 5.124. Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung**

No	Akun	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Keterangan
1	Modal Disetor Tahun 2000	2.710.170.000,00	2.710.170.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
2	Modal Disetor Tahun 2001	463.190.000,00	463.190.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
3	Modal Disetor Tahun 2003	1.510.360.000,00	1.510.360.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
4	Modal Disetor Tahun 2004	3.063.920.000,00	3.063.920.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
5	Modal Disetor Tahun 2005	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
6	Modal Disetor Tahun 2006	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
7	Modal Disetor Tahun 2007	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
8	Modal Disetor Tahun 2008	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
9	Modal Disetor Tahun 2009	1.655.560.000,00	1.655.560.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
10	Modal Disetor Tahun 2020	5.944.031.942,61	5.944.031.942,61	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
11	Modal Disetor Tahun 2021	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00	Belum Terbit Sertifikat Saham
	<b>Jumlah</b>	<b>24.847.231.942,61</b>	<b>21.347.231.942,61</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	

- Rincian Pengeluaran Pembiayaan pada PD BPR Syariah Rajasa sampai dengan Tahun 2021 dapat di jelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.125. Pengeluaran Pembiayaan pada PD BPR Syariah Rajasa**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Keterangan
1	Modal Disetor 21 Agustus 2008	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
2	Modal Disetor 13 Oktober 2008	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
3	Modal Disetor 28 April 2009	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
4	Modal Disetor 10 Juni 2010	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
5	Modal Disetor 18 Mei 2018	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
6	Modal Disetor 19 September 2019	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
7	Modal Disetor 29 April 2020	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	Telah Terbit Sertifikat Saham
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	-	

Saldo penyertaan modal pada PT BPR Syariah Rajasa per 31 Desember 2021 berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp15.917.057.626,20. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Syariah Rajasa adalah sebesar 99,295%. Laporan Keuangan PT BPR Syariah Rajasa telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro dan Rekan, Nomor 00012/2.0658/AU.2/07/1558-2/1/I/2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian tanggal 20 Januari 2022. Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas, yaitu nilai penyertaan modal disesuaikan dengan laba/rugi perusahaan sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Syariah Rajasa sebesar Rp15.917.057.626,20 (99,295% x Rp16.030.069.617,00).

### 5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Posisi aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.472.472.600.254,59 mengalami kenaikan sebesar Rp615.489.601.079,10 dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.856.982.999.175,49 atau sebesar 21,54% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.126. Aset Tetap**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	641.816.049.556,57	237.447.572.614,57	404.368.476.942,00
2	Peralatan dan Mesin	669.421.072.513,50	618.925.077.890,50	50.495.994.623,00
3	Gedung dan Bangunan	1.098.356.679.752,36	1.027.111.102.616,92	71.245.577.135,44
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.519.377.437.158,19	3.116.249.144.381,92	403.128.292.776,27
5	Aset Tetap Lainnya	12.190.237.401,28	12.053.844.021,28	136.393.380,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	29.317.954.606,89	34.211.089.997,03	(4.893.135.390,14)
7	Akumulasi Penyusutan	(2.498.006.830.734,20)	(2.189.014.832.346,73)	(308.991.998.387,47)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.472.472.600.254,59</b>	<b>2.856.982.999.175,49</b>	<b>615.489.601.079,10</b>

Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah termasuk Aset Tanah Eks PDAM Way Irang sebanyak 12 Bidang Tanah dari 20 Bidang Tanah, sedangkan 8 Bidang

Tanah belum dilakukan pencatatan dikarenakan sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia perlu dilakukan konfirmasi ke Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Belanja Modal Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengalami kenaikan sebesar Rp140.528.586.407,80 atau sebesar 65,31% dari tahun 2020. Perhitungan penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Metode Garis Lurus (*straight line method*), penambahan dan pengurangan Aset Tetap dapat dilihat pada **Rincian lampiran 4**

### 5.3.1.3.a Tanah

Posisi nilai aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp641.816.049.556,57 dan mengalami kenaikan sebesar Rp404.368.476.942,00 dari tahun lalu sebesar Rp237.477.572.614,57. Posisi aset tanah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengamanan atas tanah dengan meningkatkan status kepemilikan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021, dengan melakukan Kerangka Acuan Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Lampung Tengah Nomor **02/PKS/B.a.02/2021** dan Nomor **01/Memo-18.02/I/2021**, tanggal 04 Januari 2021, dan telah terbit atas hak pakai sertifikat tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal neraca berjumlah 231 sertifikat tanah dengan rincian:

1. Dinas Kesehatan sebanyak 47 sertifikat tanah
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 176 sertifikat tanah
3. Dinas Pertanian dan TPH sebanyak 6 sertifikat tanah, dan
4. Kantor Pemerintahan sebanyak 2 sertifikat tanah.

Percepatan pensertifikatan tanah adalah salah satu program *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Tanah Milik Kabupaten Lampung Tengah yang beralas hak bersertifikat dengan tertanggal neraca luas tanah 3.844.961,00 M<sup>2</sup>.

**Tabel 5.127 Tanah**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Saldo Awal 1 Januari 2021	237.447.572.614,57	165.695.363.534,57
2	Hibah Tanah dari Pihak Ketiga/ Masyarakat	262.340.000,00	209.952.000,00
3	Perencanaan Pengadaan Tanah dari Barjas	99.700.000,00	
4	Reklas Tanah Menjadi KDP	(99.700.000,00)	-
5	Reklasifikasi ke Aset Tetap Bangunan Gedung	-	(2.181.763.920,00)
6	Reklasifikasi ke Aset lainnya	(34.985.407.058,00)	(180.000.000,00)
7	Aset Tanah di Bawah Jalan	439.091.544.000,00	73.904.021.000,00
	<b>Saldo akhir</b>	<b>641.816.049.556,57</b>	<b>237.447.572.614,57</b>

## Mutasi Tanah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	<b>237.447.572.614,57</b>
2	Mutasi Tambah	
	- Hibah dari Pihak Ketiga	262.340.000,00
	- Penilaian Tanah dibawah Jalan	439.091.544.000,00
	- Perencanaan Pengadaan Tanah	99.700.000,00
	Jumlah	<b>439.453.584.000,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	- Reklas Aset Tetap Lainnya	34.985.407.058,00
	- Reklas ke Konstruksi dalam Pengerjaan	99.700.000,00
	Jumlah	<b>35.085.107.058,00</b>
	<b>Saldo Akhir (1+2-3)</b>	<b>641.816.049.556,57</b>

- (1) Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat Belanja Modal Tanah.
- (2) Mutasi Tambah Tanah merupakan Hibah dari Pihak Ketiga/Masyarakat, yang belum tercatat Aset Tanah pada Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan Luas Tanah 11.956 M<sup>2</sup> dengan Nilai Perolehan sebesar Rp262.340.000,00 dengan rincian :
  1. Tanah Pasos TPU Perumahan Griya Bandar Sari Utama dengan luas 300 M<sup>2</sup> dengan nilai perolehan sebesar Rp105.000.000,00
  2. Inventaris Tanah Ex PDAM Way Irang sebanyak 12 bidang tanah dengan luas 11.656 M<sup>2</sup> dengan nilai perolehan sebesar Rp157.340.000,00
- (3) Mutasi Tambah Penilaian Tanah di Bawah Jalan pada Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro dengan nilai perolehan sebesar Rp439.091.544.000,00 sebanyak 69 ruang jalan dengan dua tahap penilaian sebagai berikut :
  1. Penilaian berdasarkan nomor Surat S-713/WKN.05/KNL.04/2021 tanggal 13 Oktober 2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah ruang jalan sebanyak 24 ruas jalan dengan luas jalan 831.500 M<sup>2</sup> dengan nilai wajar Rp316.933.291.000,00
  2. Penilaian berdasarkan nomor Surat S-1013/WKN.05/KNL.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah ruang jalan sebanyak 45 ruas jalan dengan luas jalan 1.314.342 M<sup>2</sup> dengan nilai wajar Rp122.158.253.000,00
- (4) Perencanaan Pengadaan Tanah dari belanja jasa pada Dinas Pengairan sebesar Rp99.700.000,00
- (5) Mutasi kurang pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan Aset Tetap Dobel Catat, Hibah Tanah dan KDP Perencanaan Tanah sebesar Rp34.985.407.058,00 terdiri dari:
  1. Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp992.906.438,00 terdiri dari
    - 1.1. Hibah Tanah ke Kemenag sebesar Rp40.563.438,00
    - 1.2. Hibah Tanah ke Mako Brimob sebesar Rp952.343.000,00

- 2 Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada Dinas Sosial atas Aset Dobel Catat dengan Provinsi Lampung Tanah BLK di Metro sebesar Rp21.066.060,00
- 3 Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada Dinas Bina Marga atas Aset Dobel Catat dengan Balai Besar Mesuji sekampung sebesar Rp33.971.434.560,00
- 4 Reklasifikasi ke KDP Perencanaan Pengadaan Tanah pada Dinas Pengairan sebesar Rp99.700.000,00

Dari total aset tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp641.816.049.556,57 dengan luas 11.231.413,94 M<sup>2</sup> belum termasuk aset tanah :

1. Koreksi Pencatatan Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkena Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar masih dalam proses di BPN Lampung Tengah, Surat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Nomor KU.02.06/015415-AQ/09-033 tanggal 04 Februari 2021, Pengantian Tanah Masih Hak Pakai Atas Nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
2. Tanah Ex PDAM Way Irang sebanyak 8 Bidang Tanah Hak Pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, sebelum dilakukan pencatatan dilakukan konfirmasi ke Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Kepala Balai Prasarana Perumahan Wilyah Lampung Nomor UM 0201-Cb10/352 tanggal 15 Oktober 2021.

#### 5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin

Merupakan pos untuk mencatat alat besar, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

**Tabel 5.128. Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Alat Besar	22.286.133.304,00	22.220.599.804,00	65.533.500,00
2	Alat Angkutan	139.260.828.219,60	137.607.532.201,60	1.653.296.018,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.436.907.045,00	3.155.482.845,00	281.424.200,00
4	Alat Pertanian	9.798.852.935,00	9.609.912.934,99	188.940.000,01
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	198.642.959.156,19	185.529.926.682,19	13.113.032.473,99
6	Alat Studio Dan Alat Komunikasi dan Pemancar	19.565.216.921,74	18.831.406.861,74	733.810.060,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	76.569.217.648,68	73.746.814.165,68	2.822.403.483,00
8	Alat Laboratorium	105.427.610.987,00	99.680.412.745,00	5.747.198.242,00
9	Alat Persenjataan	2.840.941.120,00	2.694.228.620,00	146.712.500,00
10	Komputer	87.250.325.796,01	61.601.354.663,02	25.648.971.132,99
11	Alat Keselamatan Kerja	42.445.001,00	-	42.445.001,00
12	Rambu- Rambu	3.441.647.407,00	3.403.580.395,00	38.067.012,00
13	Peralata Olah Raga	857.986.972,28	843.825.972,28	14.161.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>669.421.072.513,50</b>	<b>618.925.077.890,50</b>	<b>50.495.994.623,00</b>

## Mutasi Peralatan dan Mesin

	Uraian	Nilai
	Saldo Awal	<b>618.925.077.890,50</b>
	Mutasi Tambah	
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.812.652.966,20
-	Hibah Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga	3.988.604.558,00
-	Belanja Modal dari Barang Jasa	66.545.000,00
-	Reklas Dari Aset Tetap lainnya	46.881.250,00
-	Penambahan dari Belanja Jasa	14.920.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>63.929.603.774,20</b>
	Mutasi Kurang	
-	Aset Extra Komptabel Peralatan dan Mesin	338.304.751,00
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menjadi Barang Pakai Habis	2.443.998.689,20
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menjadi Barang Serah Masyarakat/ pihak ketiga	307.821.900,00
-	Hibah Kendaraan Dinas Dinas	719.409.250,00
-	Reklas ke Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya	9.155.942.561,00
-	Reklas ke Aset Lainnya Kendaraan Hilang, DUM	468.132.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.433.609.151,20</b>
	Saldo Akhir (1+2-3)	<b>669.421.072.513,50</b>

Nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp618.925.077.890,50 terdiri dari mutasi:

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp59.812.652.966,20
- (2) Mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.868.450.808,00 terdiri dari:

(a) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 mendapatkan hibah dari Masyarakat / Pihak Ketiga sebagai berikut :

- Hibah Peralatan dan Mesin untuk Dinas Kesehatan Rp3.248.909.258,00 terdiri dari :

1. CSR dari Bank Lampung 2 Unit Kendaraan Ambulance Naskah Perjanjian Hibah Nomor 05/PKS/DIU/DUM/09/2021 dan Nomor 024/914/B.a.VII.01/09/2021 Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 03/BA/DIU/DUM/09/2021 dan 024/913.B.a.VII.01/09/2021 tanggal 20 September 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp472.000.000,00
2. Hibah Kendaraan Ambulance dari PT Gula Putih Mataram Naskah Perjanjian Hibah Nomor 900/251/B.a.VII.02/2021 dan 001/B.a.N/GPM/III.a/2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang 900/252/B.a.VII.02/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp201.820.000,00
3. Hibah Peralatan dan Mesin Peralatan PCR dari Gula Putih Mataram Naskah Hibah Nomor 01/GGP-CA/IV/2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/GGP-A/IV/2021 tanggal 7 April 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.740.059.258,00
4. Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah berupa Pendingin Vaksin (Refigator) 14 unit, Naskah Perjanjian Hibah Barang Nomor 800/067/V.03.1/IX/2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Daerah Nomor 068/V.03.1/IX/2021 tanggal 29 September 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp586.530.000,00

5. Hibah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupa tabung oksigen 6M3 sebanyak 85 tabung, Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor B.5847/KC-XIX/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp248.500.000,00
    - Hibah dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4262/C4/KP/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara 4262/c4/hp/2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp723.280.000,00
    - Hibah dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Komputer, Printer dan Perangkat Koneksi Internet dalam rangka Implementasi OSS berbasis Risiko di Daerah pada Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai perolehan sebesar Rp16.415.300,00  
Naskah Hibah Nomor 135/XI/PH-KOMPUTER DEARAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021 dan Nomor 900/315.b/D.b.VI.18/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021
  - (b) Penambahan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp66.645.000,00 pada Perangkat Daerah :
    - Inspektorat pembelian sound system, scanner, sofa sebesar Rp50.620.000,00
    - Kecamatan Gunung Sugih pembelian sound system sebesar Rp15.925.000,00
  - (c) Penambahan reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp46.881.250,00
  - (d) Penambahan perencanaan jasa Dinas Perdagangan sebesar Rp14.920.000,00
- (3) Mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp4.101.226.221,00 terdiri dari:
- (a) Aset ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp338.304.751,00 pada Perangkat Daerah :
    1. Dinas Pendidikan sebesar Rp53.418.400,00
    2. Dinas Kesehatan sebesar Rp213.286.051,00
    3. Dinas Bina Marga sebesar Rp12.474.000,00
    4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.750.000,00
    5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp3.500.000,00
    6. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp597.300,00
    7. Dinas Perhubungan sebesar Rp2.046.000,00
    8. Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp3.190.000,00
    9. Dinas Perindustrian sebesar Rp11.600.000,00
    10. Dinas Perdagangan sebesar Rp15.345.000,00

11. Kecamatan Gunung Sugih sebesar Rp19.998.000,00  
 12. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1.100.000,00  
 Daftar rincian aset ekstra komptabel peralatan dan mesin pada TA 2021 untuk peralatan dan mesin sebesar Rp338.304.751,00 terdiri dari:

**Tabel 5.129. Rincian Aset *Extra Comptabel* Peralatan dan Mesin**

Kode	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1067	283.249.470,00
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	102	32.161.812,00
2.08	Alat Laboratorium	51	21.793.469,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	5	1.100.000,00
<b>Total</b>			<b>338.304.751,00</b>

- (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Barang Persediaan Pakai Habis sebesar Rp2.443.998.689,20 terdiri dari Perangkat Daerah :
- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.931.619.514,00
  - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp208.339.327,00
  - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp14.946.648,20
  - d. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp417.000,00
  - e. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.100.000,00
  - f. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp23.946.000,00
  - g. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp925.000,00
  - h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp27.111.000,00
  - i. Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp18.298.500,00
  - j. Sekretariat DPRD sebesar Rp11.010.000,00
  - k. Kecamatan Gunung Sugih sebesar Rp4.000.000,00
  - l. Kecamatan Terbanggi Besar sebesar Rp3.260.000,00
  - m. Inspektorat sebesar Rp4.580.000,00
  - n. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp18.803.000,00
  - o. Dinas Perdagangan sebesar Rp2.250.000,00
  - p. Sekretariat Daerah sebesar Rp173.392.700,00 terdiri dari:
    - Belanja modal menjadi pemeliharaan bangunan sebesar Rp 23.400.000,00 dan penambahan daya listrik sebesar Rp149.992.700,00
- (c) Belanja modal peralatan dan mesin Menjadi Barang Serah Masyarakat/ pihak ketiga sebesar Rp307.821.900,00 terdiri dari :
- Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi sebesar Rp21.376.900,00
  - Sekretariat Daerah sebesar Rp109.975.000,00
  - Dinas Pariwisata sebesar Rp176.470.000,00
- (d) Pemerintah Lampung Tengah Hibah Kendaraan Dinas ke Mako Brimob dengan nilai perolehan sebesar Rp719.409.250,00  
 Naskah Perjanjian Hibah Nomor 024/997.A/Setda.III.10/2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/998.A/BA/Setda.III.10/2021 tanggal 1 Oktober 2021.

- (e) Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp409.200.000,00
- (f) Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp224.581.900,00 terdiri dari :
  - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp104.771.900,00
  - Dinas Perdagangan sebesar Rp119.810.000,00
- (g) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.371.995.016,00 terdiri dari :
  - Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp26.400.000,00
  - Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.345.595.016,00
- (h) Reklasifikasi ke Aset Lainnya Aset Rusak Berat sebesar Rp1.150.165.645,00 terdiri dari Perangkat Daerah :
  1. Dinas Kesehatan sebesar Rp345.000.000,00
  2. Dinas Pengairan sebesar Rp2.420.000,00
  3. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp48.500.000,00
  4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp4.268.000,00
  5. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp235.033.000,00
  6. Dinas Koperasi dan Usaha Menengah sebesar Rp249.879.200,00
  7. Sekretariat Daerah sebesar Rp70.445.279,00
  8. Kecamatan Gunung Sugih sebesar Rp58.500.000,00
  9. Kecamatan Bangunrejo sebesar Rp11.000.000,00
  10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp44.700.000,00
  11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp58.720.166,00
  12. Dinas Perdagangan sebesar Rp19.950.000,00
  13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.750.000,00
- (i) Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Kendaraan DUM pada Dinas Perhubungan sebesar Rp410.520.000,00  
Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 9 September 2021 perihal usulan penghapusan barang inventaris.
- (j) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Kendaraan Dinas Hilang dengan nilai perolehan sebesar Rp57.612.000,00.

Dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.130. Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan yang Hilang**

No	Jenis Kendaraan	No Pol	Keterangan Hilang	Nilai (Rp)
1	Honda Tiger 2000	BE 5816 GZ	TBL/226/VI/2021/SPKT/SEKT EBAS/RESLT/POLDALPG	25.000.000,00
2	Yamaha/Jupiter MX	BE 5123 GZ	POI LP/B/1408/III/2007 SPK/TABES BALAM	14.750.000,00
2	Honda/ Vario 125 CBS ISS	BE 3097 HZ	TBL/736-B/VII/2019/LPG/RESTA BALAM/ SEKTOR SKM	17.862.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>57.612.000,00</b>

### 5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan

Merupakan pos untuk mencatat Aset Tetap Bangunan Gedung dan Bangunan Monumen per 31 Desember 2021.

**Tabel 5.131. Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Bangunan Gedung	1.065.870.701.914,00	995.046.604.516,66	70.824.097.397,34
2	Monumen	31.541.489.032,37	31.640.989.032,38	(99.500.000,01)
3	Bangunan Menara	190.292.600,88	190.292.600,88	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	754.196.205,11	233.216.467,00	520.979.738,11
	<b>Jumlah</b>	<b>1.098.356.679.752,36</b>	<b>1.027.111.102.616,92</b>	<b>71.245.577.135,44</b>

### Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai
1	Saldo Awal	<b>1.027.111.102.616,92</b>
2	Mutasi Tambah	
	- Belanja Modal Bangunan dan Gedung	29.532.011.364,76
	- Retensi 2021 yang Akan dibayar di tahun 2022	2.244.051.060,73
	- Belanja dari Barang Jasa Perencanaan dan Pengawasan	2.591.862.028,19
	- Reklas Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Ke Gedung dan Bangunan	409.200.000,00
	- Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan,	153.741.251,97
	KDP Menjadi Aset Gedung dan Bangunan	5.879.760.477,97
	Belanja Barang Jasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.901.713.500,00
	- Pendapatan Hibah Atas Pusus dan Fasos	41.622.230.540,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.334.570.223,62</b>
3	Mutasi Kurang	
	- Retensi Tahun 2020 yang dibayar tahun 2021	2.875.943.637,82
	- Aset Extra Komptabel Gedung dan Bangunan	430.653.805,36
	- Reklas Aset Gedung dan Bangunan Ke Aset Lainnya	476.119.095,00
	- Gedung dan Bangunan Menjadi KDP Perencanaan	49.750.000,00
	- Hibah Gedung dan Bangunan Ke Pihak Ketiga / Masyarakat	8.774.926.550,00
	- Penghapusan Gedung dan Bangunan	481.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.088.993.088,18</b>
4	Saldo Akhir (1+2-3)	<b>1.098.356.679.752,36</b>

Nilai Aset Tetap Bangunan dan Gedung sebesar Rp1.098.359.861.358,73 terdiri dari:

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp29.532.011.364,76 terdapat antara lain:
  - a. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp74.207.900,00
  - b. Belanja Jasa Pengawasan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp59.670.000,00
  - c. Pembayaran Retensi tahun 2020 sebesar Rp2.875.943.637,82
  - d. Belanja Fisik sebesar Rp26.552.189.826,94

- (2) Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp54.095.547.658,86 terdiri dari :
- 2.1. Penambahan dari retensi sebesar Rp2.244.051.060,73 terdiri dari:
    - (a) Penambahan dari retensi gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp921.364.650,00.
    - (b) Penambahan dari retensi gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp766.197.666,76.
    - (c) Penambahan dari retensi gedung dan bangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp28.514.240,44.
    - (d) Penambahan dari retensi gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp527.974.504,00.
  - 2.2. Penambahan dari Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan (5.1.2) sebesar Rp2.591.862.028,19 terdiri dari :
    - (a) Perencanaan dan pengawasan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp653.914.000,00;
    - (b) Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.201.913.488,19.
    - (c) Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp21.010.000,00 dan
    - (d) Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan sebesar Rp137.120.840,00
    - (e) Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp667.903.700,00
  - 2.3. Penambahan dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp409.200.000,00.
  - 2.4. Penambahan dari Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan, sebesar Rp153.741.251,97. terdiri dari :
    - (a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp74.353.451,97
    - (b) Dinas Perdagangan sebesar Rp79.387.800,00
  - 2.5. Reklas dari KDP menjadi Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp5.879.760.477,97
  - 2.6. Penambahan dari Belanja Barang Jasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.901.713.500,00 terdiri dari :
    - (a) Dinas Perindustrian yang melaksanakan Rehab Dinas Perdagangan sebesar Rp126.500.000,00
    - (b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp595.706.000,00 dan
    - (c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.179.507.500,00
  - 2.7. Penambahan Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.622.230.540,00 terdiri dari :

- (a) Hibah atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp23.841.846.540,00  
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.  
Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman oleh Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Program Pencegahan Korupsi (MCP KPK) RI.
- (b) Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rehab bangunan sekolah Milik Pemerintah Kab. Lampung Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp17.780.384.000,00  
Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) 900/556/B.a.VII.02/2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara 414.1/BA/DC/2021 pada tanggal 17 Mei 2021.
- (3) Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.088.993.088,18 terdiri dari:
- a) Pembayaran Retensi TA 2020 sebesar Rp2.875.943.637,82 terdiri dari Perangkat Daerah :
1. Dinas Kesehatan sebesar Rp191.224.756,00
  2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.603.873.018,82
  3. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp74.871.363,00
  4. Dinas Pengairan sebesar Rp5.974.500,00
- b) Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp430.653.805,36
- c) Reklas Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya sebesar Rp476.119.095,00 terdiri dari
1. Proses Lelang atas Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp436.119.095,00
  2. Aset double catat atas Bangunan dan Gedung BLK di Metro dengan Provinsi Lampung pada Dinas Sosial sebesar Rp40.000.000,00
- d) Reklasifikasi Belanja Jasa Perencanaan Gedung dan Bangunan menjadi Kontruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pengairan sebesar Rp49.750.000,00
- e) Hibah Gedung dan Bangunan kepada ketiga dan atau tidak dikuasai, namun masih tercatat di neraca dan belanja modal menjadi barang serah masyarakat/ pihak ketiga sebesar Rp8.774.926.550,00 terdiri dari :
1. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.931.477.000,00

Hibah Gedung dan Bangunan ke Mako Brimob Anak Tuha dengan nilai perolehan Rp5.931.477.000.00, Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/320/Setwan.VI.I/DPRD/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Dengan Kepolisian Daerah Lampung Nomor 900/670/B.a.VII.02/2021 dan Nomor NPHD/B-5/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021, Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 655/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Penghapusan Aset Gedung Bangunan Hibah Aset Gedung dan Bangunan Kepada Pihak Ketiga nilai perolehan sebesar Rp748.484.000.00, Surat Persetujuan Bupati Nomor 900/1452/B.a.VII.02/2021 Tanggal 27 Desember 2021, Surat Keputusan Sekretaris Daerah 116/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 10 Desember 2021.

2. Pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp481.600.000,00

Penghapusan aset gedung bangunan rumah potong hewan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar, surat persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/84/B.a.VII.02/2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 102/KPTTS/B.a.VII.02/2021 Tanggal 18 Oktober 2021.

3. Belanja Modal TA 2021 menjadi belanja barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.843.449.550,00

#### 5.3.1.3.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp3.519.377.437.158,19 terdiri dari:

**Tabel 5.132. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Jalan dan Jembatan	2.944.665.708.739,26	2.603.905.846.125,43	340.759.862.613,83
2	Bangunan Air	534.867.261.759,44	473.421.540.497,00	61.445.721.262,44
3	Instalasi	23.224.201.737,84	22.406.264.737,84	817.937.000,00
4	Jaringan	16.620.264.921,65	16.515.493.021,65	104.771.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.519.377.437.158,19</b>	<b>3.116.249.144.381,92</b>	<b>403.128.292.776,27</b>

### Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Uraian	Nilai
Saldo Awal		<b>3.116.249.144.381,92</b>
Mutasi Tambah		
-	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	265.962.869.887,06
-	Retensi 2021 yang akan dibayar di tahun 2022	55.156.572.858,24
-	Penambahan dari Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perencanaan serta Pengawasan	30.522.954.100,00
-	KDP menjadi Jalan , Irigasi dan Jaringan	6.443.391.381,82
-	Hibah atas Pusus dan Pasum	66.957.779.110,00
-	Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.581.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>425.268.149.237,12</b>
Mutasi Kurang		
-	Aset Ekstra Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.226.790,00
-	Retensi Tahun 2020 yang dibayar tahun 2021	8.239.083.582,92
-	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi belanja jasa, Serah Masyarakat/ Pihak Ketiga	4.514.579.414,03
-	Pengembalian atas Kelebihan Volume Atas Pekerjaan	1.952.337.695,61
-	Reklas Belanja Barang Jasa Perencanaan menjadi KDP	7.136.887.726,32
-	Reklas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan	153.741.251,97
	<b>Jumlah</b>	<b>22.139.856.460,85</b>
Saldo Akhir (1+2-3)		<b>3.519.377.437.158,19</b>

Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp3.519.377.437.158,19 terdiri dari mutasi:

- (1) Belanja Modal Tahun 2021 Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp265.962.869.887,06 terdapat antara lain:
  - a. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp7.336.512.000,00
  - b. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp5.114.882.443,00
  - c. Pembayaran Retensi Tahun 2020 sebesar Rp8.239.083.582,92
  - d. Belanja Fisik sebesar Rp245.272.391.861,14
  
- (2) Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp159.305.279.350,06 terdiri dari:
  - 2.1 Penambahan dari Retensi 2021 sebesar Rp55.156.572.858,24 pada Perangkat Daerah :
    - a. Dinas Bina Marga Retensi Tahun 2021 sebesar Rp54.326.915.126,88.
    - b. Dinas Pengairan Retensi Tahun 2021 sebesar Rp632.675.481,36.
    - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Retensi Tahun 2021 sebesar Rp196.982.250,00
  - 2.2 Penambahan Belanja Barang Jasa Pemeliharaan, Perencanaan dan Pengawasan (5.2.2) menjadi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp30.522.954.100,00 terdiri dari :
    - a. Pemeliharaan dan Perencanaan serta Pengawasan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp29.994.278.500,00.

- Pemeliharaan sebesar Rp17.466.309.000,00
- Perencanaan sebesar Rp8.136.833.426,00
- Pengawasan sebesar Rp4.391.136.073,60
- b. Perencanaan Dinas Pengairan sebesar Rp295.246.400,00
- c. Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp233.429.200,00
  - Perencanaan sebesar Rp94.068.200,00
  - Pengawasan sebesar Rp139.361.000,00
- 2.3 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan menjadi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.443.391.381,82 terdiri dari :
  - a. Dinas Bina Marga sebesar Rp5.813.923.500,00
  - b. Dinas Pengairan sebesar Rp329.507.881,82
  - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp995.80.000,00
  - d. Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp200.380.000,00
- 2.4 Penambahan dari Hibah atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp66.957.779.110,00 terdiri dari :
  - Jalan sebesar Rp48.900.025.064,00
  - Bangunan Air/ Irigasi sebesar Rp18.057.754.046,00
- 2.5 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin menjadi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kontruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp224.581.900,00 terdiri dari :
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin menjadi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp104.771.900,00
  - b. Perencanaan pada Dinas Perdagangan sebesar Rp119.810.000,00
- (3) Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.139.856.460,85 terdiri dari:
  - 1.1 Aset Ekstra Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp143.226.790,00 pada Perangkat Daerah :
    - i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp23.416.790,00
    - ii. Dinas Perdagangan sebesar Rp119.810.000,00
  - 1.2 Pembayaran Retensi Tahun 2020 yang dibayar tahun 2021 sebesar Rp8.239.083.582,92 pada Perangkat Daerah :
    - 1. Dinas Bina Marga sebesar Rp7.106.075.700,00
    - 2. Dinas Pengairan sebesar Rp646.356.631,59
    - 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp486.651.251,33
  - 1.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi belanja jasa pemasangan, menaikkan daya listrik sebesar Rp116.901.466,00 pada Perangkat Daerah :
    - 1. Dinas Bina Marga sebesar Rp15.586.780,00

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp26.735.786,00
3. Dinas Sosial sebesar Rp24.748.900,00
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp49.830.000,00
- 1.4 Barang yang diserahkan kepihak ketiga/ masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp4.397.677.948,03
- 1.5 Pengembalian atas Kelebihan Volume Atas Pekerjaan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp1.952.337.695,61
- 1.6 Reklasifikasi Belanja Barang Jasa Perencanaan menjadi Kontruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp7.136.887.726,32 terdiri dari Perangkat Daerah:
  - a. Dinas Bina Marga sebesar Rp6.862.462.000,00.
  - b. Dinas Pengairan sebesar Rp274.425.726,32.
- 1.7 Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp153.741.251,97 pada Perangkat Daerah :
  1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp74.353.451,97
  2. Dinas Perdagangan sebesar Rp79.387.800,00

#### 5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya

Merupakan pos untuk mencatat aset berupa buku, barang bercorak seni budaya, hewan ternak dan tanaman.

**Tabel 5.133. Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Bahan Perpustakaan	7.229.356.146,28	7.233.295.266,28	(3.939.120,00)
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2.966.372.274,00	2.826.039.774,00	140.332.500,00
3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	-
5	Tanaman	1.994.508.981,00	1.994.508.981,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>12.190.237.401,28</b>	<b>12.053.844.021,28</b>	<b>136.393.380,00</b>

**Mutasi Aset Tetap Lainnya:**

No	Uraian	Nilai
1	Saldo Awal	<b>12.053.844.021,28</b>
2	Mutasi Tambah	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	408.208.948,00
	- Reklas Dari Belanja Modal Peralatan Mesin	7.371.995.016,00
	- Reklas dari KDP Ke Aset Tetap Lainnya	69.440.000,00
	- Belanja Barang jasa Menjadi Modal	13.981.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.863.624.964,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	- Aset Ekstra Comptabel Aset Lainnya	7.373.853.716,00
	- Reklas Ke Aset Lainnya	194.536.618,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	46.881.250,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menjadi Barang jasa	111.960.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.727.231.584,00</b>
4	Saldo Akhir (1+2-3)	<b>12.190.237.401,28</b>

Aset Tetap Lainnya belum termasuk Pengadaan Buku Teks, Pengadaan Buku Teks Utama Kelas VII bagi Sekolah Penggerak Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021 dan Bantuan Pencegahan Perundungan kurang lebih 61 Sekolah tertanggal Neraca belum mendapatkan rincian barang aset tetap dan atau barang pakai habis dari Kementerian Pendidikan dengan nilai Perolehan Sebesar Rp3.422.236.412,00.

Aset tetap lainnya sebesar Rp12.190.237.401,28 terdiri dari mutasi:

- a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp408.208.948,00.
- b) Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.455.416.016,00 terdiri dari:
  - (a) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp7.371.995.016,00 pada Perangkat Daerah :
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.345.595.016,00 dan
    - Sekretariat Daerah sebesar Rp26.400.000,00
  - (b) Reklasifikasi dari KDP menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp69.440.000,00
  - (c) Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.981.000,00
- c) Mutasi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp7.727.231.584,00 terdiri dari:
  - (a) Ekstra komptabel aset tetap lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp7.373.853.716,00 pada Perangkat Daerah :
    - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp5.600.000,00
    - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp67.600.000,00
    - Sekretariat DPRD sebesar Rp9.425.000,00
    - Sekretariat Daerah sebesar Rp277.200,00
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp7.290.951.516,00
  - (b) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Rusak Berat ke Aset Lainnya sebesar Rp194.536.618,00 terdiri dari:

- Sekretariat Daerah belanja modal software sebesar Rp84.499.998,00
  - Badan Penelitian dan Pengembangan belanja modal software sebesar Rp17.600.000,00
  - Sekretariat Daerah aset rusak berat sebesar Rp92.436.620,00
- (c) Reklasifikasi dari Belanja Modal aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp46.881.250,00
- (d) Belanja modal aset tetap lainnya menjadi barang dan jasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp111.960.000,00

### 5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pos untuk menampung Aset Tetap serta perencanaan yang sedang dalam proses pembangunan, sedangkan Konstruksi dalam pengerjaan perencanaan ditahun yang akan dilaksanakan rencana pembangunan disebabkan oleh kegiatan-kegiatan untuk memperoleh aset tetap yang pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, termasuk perencanaan ditahun yang akan datang.

**Tabel 5.134. Konstruksi dalam Pengerjaan**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Konstruksi dalam Pengerjaan	29.317.954.606,89	34.211.089.997,03	(4.893.135.390,14)
	<b>Jumlah</b>	<b>29.317.954.606,89</b>	<b>34.211.089.997,03</b>	<b>(4.893.135.390,14)</b>

### Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan

	Uraian	Nilai
	Saldo Awal	<b>34.211.089.997,03</b>
	Mutasi Tambah	
-	Reklas Belanja Jasa Perencanaan Jalan dan Jaringan Menjadi KDP :	7.136.887.726,32
-	Reklas Belanja Jasa Perencanaan Menjadi KDP Gedung dan Bangunan :	656.120.600,00
-	Reklas Belanja Jasa Tanah Menjadi KDP	99.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.892.708.326,32</b>
	Mutasi Kurang	
-	Reklas dari KDP menjadi Gedung dan Bangunan	5.879.760.477,97
-	Reklas dari KDP Menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.443.391.381,82
-	KDP tidak Menjadi Aset Tetap, Melainkan Belanja Barang Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga, Pemeliharaan	393.251.856,67
-	Mutasi KDP Menjadi Aset Tetap , Buku Peta Dinas Bina Marga	69.440.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.785.843.716,46</b>
	Saldo Akhir (1+2-3)	<b>29.317.954.606,89</b>

Saldo awal Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2021 sebesar Rp34.211.089.997,03 mengalami penurunan sebesar Rp4.893.135.390,14 terdiri dari konstruksi dalam pengerjaan rencana pengadaan Tanah, Gedung dan Bangunan, Rehabilitasi atau Peningkatan Talud sebesar perencanaan jalan jaringan dengan rincian sebagai berikut :

1.1 Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp7.892.708.326,32 terdiri dari

1. Reklasifikasi Belanja Jasa Perencanaan Jalan dan Jaringan menjadi Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp7.136.887.726,32 terdiri dari :
  - Konstruksi Dalam Pekerjaan Jalan dan Jaringan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp6.862.462.000,00
  - Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pengairan sebesar Rp274.425.726,32
2. Reklas Belanja Jasa Perencanaan menjadi Konstruksi Dalam Pekerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp656.120.600,00 terdiri dari :
  - Perencanaan Bangunan dan Gedung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp606.370.600,00
  - Dina Pengairan sebesar Rp49.750.000,00
3. Reklas Belanja Jasa Perencanaan Tanah pada Dinas Pengairan sebesar Rp99.700.000,00

1.2 Mutasi Kurang Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pekerjaan menjadi Aset Tetap sebesar Rp12.392.591.859,79 terdiri dari :

1. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp6.443.391.381,82 pada Perangkat Daerah :
  - Dinas Bina Marga sebesar Rp5.813.923.500,00
  - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.580.000,00
  - Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp200.380.000,00
  - Dinas Pengairan sebesar Rp329.507.881,82
2. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan menjadi Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.879.760.477,97,00
3. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pekerjaan menjadi Aset Tetap Lainnya, Buku Peta pada Dinas Bina Marga sebesar Rp69.440.000,00

1.3 Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pekerjaan tidak menjadi belanja modal sebesar Rp393.251.856,67 terdiri dari :

- Konstruksi Dalam Pekerjaan menjadi belanja barang yang diserahkan ke Masyarakat / Pihak Ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp94.550.000,00 dan
  - Konstruksi Dalam Pekerjaan menjadi pemeliharaan berkala normalisasi atau pengedukan embung pada Dinas Pengairan sebesar Rp298.701.856,67
- Rincian pada **Lampiran 5**.

### 5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2020 Nomor 57 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi, penyusutan aset tetap mempergunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*)

Akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp2.497.994.405.772,20 merupakan akumulasi penyusutan untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang nilai buku aset tetap.

**Tabel 5.135. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Uraian	Nilai Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan Sampai dengan 31 Desember 2020 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2021(Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	641.816.049.556,57	-	-	-	641.816.049.556,57
2	Peralatan dan Mesin	669.172.572.513,50	(465.078.024.776,18)	(46.809.066.933,02)	(511.887.091.709,20)	157.533.980.804,30
3	Gedung dan Bangunan	1.098.356.679.752,36	(251.340.976.749,76)	(19.448.695.477,00)	(270.789.672.226,76)	827.567.007.525,60
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.519.377.437.158,19	(1.472.595.830.820,79)	(242.734.235.977,45)	(1.715.330.066.798,24)	1.804.047.370.359,95
5	Aset Tetap Lainnya	12.190.237.401,28	-	-	-	12.190.237.401,28
6	Konstruksi dalam pengerjaan	29.317.954.606,89	-	-	-	29.317.954.606,89
	<b>Total</b>	<b>5.970.230.930.988,79</b>	<b>(2.189.014.832.346,73)</b>	<b>(308.991.998.387,47)</b>	<b>(2.498.006.830.734,20)</b>	<b>3.472.472.600.254,59</b>

### 5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari:

**Tabel 5.136. Aset Lainnya**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Tagihan Jangka Panjang	91.491.935,00	105.993.235,00	(14.501.300,00)
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	51.906.327.000,00	2.782.556.000,00	49.123.771.000,00
3	Aset Tak Berwujud	1.156.567.198,00	1.054.467.200,00	102.099.998,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(575.689.833,00)	368.550.327,00	(207.139.506,00)
5	Aset Lain-Lain	105.728.235.304,03	115.154.324.299,03	(9.426.088.995,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>158.306.931.604,03</b>	<b>118.728.790.407,03</b>	<b>39.578.141.197,00</b>

#### 5.3.1.4.a Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang yang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp91.491.935,00 terdiri dari:

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah a.n. Sdri. A (bukan bendahara) yang pada TA 2021 masih tersisa sebesar Rp14.501.300,00 telah di reklas ke Aset Lancar.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp91.491.935,00 merupakan tagihan TGR berdasarkan SKTJM a.n. Sdra BIB (bukan bendahara), yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021. Ahli waris ybs telah memberikan surat keterangan miskin yang ditandatangani Camat Padang

Ratu tertanggal 29 Maret 2017 untuk dipergunakan dalam proses penyelesaian TGR.

#### 5.3.1.4.b Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp51.906.327.000,00, merupakan nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada pihak ketiga, diantaranya dalam kerjasama bangun guna serah (BGS), terdiri dari:

**Tabel 5.137. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

No	Uraian	Keterangan	Nilai Aset (Rp)
1	PT Mega Cipta Graha	Pembangunan Pasar Daerah Seputih Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah	152.931.000,00
2	PT Sai Bumi Mandiri	Pembangunan Pasar Daerah Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah	53.922.000,00
3	PT Ekalia Karya Multi	Pasar Kota Gajah	152.931.000,00
4	PT GAP	Pasar Seputih Banyak	217.797.000,00
5	PT. Tauhid Lambang Jaya Abadi	Pembangunan Pasar Gaya Baru 1 Kabupaten Lampung Tengah	180.000.000,00
6	PT Pandu Jaya Buana	Pembangunan Pasar Daerah Bandar Jaya Plaza, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah	2.024.975.000,00
		Penilaian Atas Bangunan dan Gedung Pasar Daerah Bandar Jaya Plaza, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah	49.123.771.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>51.906.327.000,00</b>

- (1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT Mega Cipta Graha Nomor 28/PKS/02/2013 dan Nomor 03/MCG-Exs/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pembangunan Pasar Daerah Seputih Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, diatas tanah seluas 26.830 M<sup>2</sup> dengan nilai tanah Rp152.931.000,00 dengan jangka waktu perjanjian selama 14 (empat belas) bulan dan telah beberapa kali melakukan Addendum : Nomor 42/ADD-PKS/D.8/2014 dan Nomor 015/MCG-Exs/X/2014 jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan dan Nomor 047/ADD/-PKS/D.8/2015 dan 106/MCG-Exs/X/2015 selama 28 (dua puluh delapan) bulan serta Addendum kembali yang ke tiga Nomor 037A.1/ADD-PKS/D.8/2016 dan Nomor 023/MCG-Exs/X/2016 tanggal 20 Februari 2016 selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT Sai Bumi Mandiri Nomor 041/PKS/01/2016 dan Nomor 01/SBM/IV/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pembangunan Pasar Daerah Rumbia, Kecamatan Rumbia di atas tanah milik pemerintah sebagai pihak pertama seluas 38.210 M<sup>2</sup> dengan nilai tanah sebesar Rp53.922.000,00 yang terletak di Kecamatan Rumbia dengan jangka waktu perjanjian selama 18 (delapan belas ) bulan melakukan beberapa

- kali addendum dengan nomor 073/ADD-PKS/01/2016 dan nomor 02 /SBM/IV/2016 perubahan pembangunan pasar dan addendum nomor 45/ADD-PKS/Setda.1.0/2017 dan nomor 01/ADD-SBM/XI/2017 tanggal 28 Oktober 2017 dengan perubahan waktu 20 (dua puluh) bulan.
- (3) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT Ekalia Karya Multi Nomor 01/PKS/02/2009 dan Nomor 09/EKM-Eks/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Bagian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk menjadi Hak Guna Bangunan diatas tanah milik pemerintah daerah seluas 10.350 m<sup>2</sup> dengan nilai tanah sebesar Rp152.931.000,00. Diatas tanah tersebut telah dibangun Pasar Kota Gajah. Jangka waktu HGB selama 20 tahun yang berakhir pada tahun 2029.
  - (4) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT GAP Nomor 22/PKS/02/2011 dan Nomor 01/GAP-Eks/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pembangunan Pasar Daerah SEputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak, diatas tanah milik pemerintah daerah seluas 32.170 m<sup>2</sup> dengan nilai tanah sebesar Rp217.797.000,00. Jangka waktu perjanjian selama 20 tahun, tetapi HGB atas bangunan diatas tanah pasar tersebut belum terbit.
  - (5) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT. Tauhid Lambang Jaya Abadi Nomor 13/PKS/setda.I.04/2020 dan Nomor 02/TLJA/III – 2020 tentang Pembangunan Pasar Daerah Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah diatas Tanah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah seluas 6.686 m<sup>2</sup> Dengan Nilai Perolehan Rp180.000.000,00. Jangka waktu perjanjian selama 25 tahun sejak selesainya pelaksanaan pembangunan Pasar Gaya Baru, yaitu 10 (sepuluh) Bulan.
  - (6) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT Pandu Jaya Buana Nomor 039/PKS/01/2016 dan Nomor 060/PJB/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Pengelolaan Pasar Daerah Bandar Jaya Plaza, Kabupaten Lampung Tengah, di atas tanah milik pemerintah sebagai pihak pertama seluas 22.546 M<sup>2</sup> dengan nilai tanah sebesar Rp2.024.975.000,00 yang terletak di Kecamatan Terbanggi Besar dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 31 Desember 2017. Pada tahun 2019 melakukan addendum ketiga dengan nomor 075/ADD-PKS/Sekda.1.01/2019 dan Nomor 014/ADD-PJB/XII/2019 tentang pengelolaan Pasar Daerah Bandar jaya Plaza Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berakhir Hak Guna Bangunan /HGB (14 juli 2041) dan akan dilakukan evaluasi dua tahun sekali. Pada Tanggal 30 Desember 2019 dilakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT. Pandu Jaya Buana Nomor 76/PKS/Setda.I.01/2019 dan Nomor 15/PJB/XII/2019 tentang Pembangunan Lantai 2 (Dua) dan 3 (Tiga) pasar daerah Bandar Jaya Plaza Kabupaten Lampung Tengah seluas 1000 M<sup>2</sup> untuk membangun Mall PTSP, namun dalam perjalanan tahun 2021 PT. Pandu Jaya Buana telah terjadi wanprestasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

melakukan Pemutusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Daerah Bandar Jaya Plaza berdasarkan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 551.2/96/Setda.I.04/2021 tanggal 6 Mei 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pengelolaan Pasar Bandar Jaya Plaza Kabupaten Lampung Tengah dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 551.2/98/Setda.I.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 Perihal Tindaklanjut Pemutusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Bandar Jaya Plaza. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan penilaian atas Bangunan dan Gedung Plaza Bandar Jaya dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro dengan Surat Nomor S-815/WKN.05/KNL.04/2021 tanggal 12 November 2021 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai perolehan sebesar Rp49.123.771.000,00 dengan Bangunan sebanyak 1.774 Unit dengan rincian :

1. Kios Plaza Bandar Jaya : 491 Unit
2. Los Plaza Bandar Jaya : 885 Unit
3. Toko Toko Bandar Jaya : 364 Unit
4. Ruko Plaza Bandar Jaya : 33 Unit
5. Bangunan Lantai 2 Plaza Bandar Jaya : 1 Unit

Pada saat ini masih dalam tahapan praperadilan.

#### **5.3.1.4.c. Aset Tidak Berwujud**

Merupakan nilai atas aset tidak berwujud, yang terdiri dari *database* Jalan, *Software database* Musrenbang Bappeda, *Software* Evaluasi RKPD, *Software database* Jembatan, *Software database* Pertanian Pangan dan *Software* Lapak Berjaya serta *Software Security* SPSE,

Saldo awal *software* sebesar Rp1.156.567.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp102.099.998,00, dikarenakan adanya mutasi penambahan aset tidak berwujud pada tahun 2021 yang terdiri dari:

- a. *Software* Lapak Berjaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp17.600.000,00.
- b. *Software Security* SPSE pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp84.499.998,00.

Saldo akhir Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.156.567.198,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.138 Aset Tidak Berwujud**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Software SQL Server 2017 BPKAD	43.092.500,00	43.092.500,00
2	Software Database Musreimbang Pada BAPPEDA	94.050.000,00	94.050.000,00
3	Software Pengembangan Sistem Evaluasi RKPd pada BAPPEDA	99.986.700,00	99.986.700,00
4	Software database Jalan Dinas Bina Marga	27.278.000,00	27.278.000,00
5	SoftwareDatabase Jembatan Section I Wilayah Tengah Dinas Bina Marga	99.370.000,00	99.370.000,00
6	Software Database Jembatan Section II WilayahTengah Dinas Bina Marga	99.400.000,00	99.400.000,00
7	Software Database Jembatan Section II Wilayah Timur Dinas Bina Marga	99.390.000,00	99.390.000,00
8	Software Database Jembatan Section I Wilayah Barat Dinas Bina Marga	99.250.000,00	99.250.000,00
9	SoftwareDatabase Jembatan Section II Wilayah Barat Dinas Bina Marga	99.260.000,00	99.260.000,00
10	SoftwareDatabase Jembatan Section I Wilayah Timur Dinas Bina Marga	99.240.000,00	99.240.000,00
11	Software Database Pertanian Pangan dalam Rangka Menunjang Data Statistik	194.150.000,00	194.150.000,00
12	Software Lapak Berjaya	17.600.000,00	0,00
13	Software Security SPSE	84.499.998,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.156.567.198,00</b>	<b>1.054.467.200,00</b>

**5.3.1.4.d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp575.689.833,00. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun. Rincian Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud sebagai berikut:

**Tabel 5.139. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

No	Uraian	Akumulasi Amortisasi 2021	Akumulasi Amortisasi 2020
1	Software SQL Server 2017 BPKAD	17.955.208,00	9.336.708,00
2	Software Database Musreimbang Pada BAPPEDA	73.672.500,00	54.862.500,00
3	Software Pengembangan Sistem Evaluasi RKPd pada BAPPEDA	46.660.460,00	26.663.120,00
4	Software database Jalan Dinas Bina Marga	27.278.000,00	27.278.000,00
5	SoftwareDatabase Jembatan Section I Wilayah Tengah Dinas Bina Marga	52.997.333,00	33.123.333,00
6	Software Database Jembatan Section II WilayahTengah Dinas Bina Marga	53.013.333,00	33.133.333,00

No	Uraian	Akumulasi Amortisasi 2021	Akumulasi Amortisasi 2020
7	Software Database Jembatan Section II Wilayah Timur Dinas Bina Marga	53.008.000,00	33.130.000,00
8	Software Database Jembatan Section I Wilayah Barat Dinas Bina Marga	52.933.333,00	33.083.333,00
9	Software Database Jembatan Section II Wilayah Barat Dinas Bina Marga	52.938.667,00	33.086.667,00
10	Software Database Jembatan Section I Wilayah Timur Dinas Bina Marga	52.928.000,00	33.080.000,00
11	Software Database Pertanian Pangan dalam Rangka Menunjang Data Statistik	90.603.333,00	51.773.333,00
12	Software Lapak Berjaya	293.333,00	0,00
13	Software Security SPSE	1.408.333,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>575.689.833,00</b>	<b>368.550.327,00</b>

#### 5.3.1.4.e. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain terdiri dari:

**Tabel 5.140. Aset Lain - Lain**

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Tetap Rusak Berat	66.326.625.993,32	71.989.648.390,88	(5.663.022.397,56)
2	Aset Tetap Diserahkan ke Masyarakat	11.147.609.310,71	14.910.675.908,15	(3.763.066.597,44)
3	Deposito BPR Tripanca Dalam Likuidasi	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	-
4	Utang PFK TA 2008	254.000.000,00	254.000.000,00	-
5	Investasi Non Permanent (Dana Bergulir)	-	-	-
6	Piutang Pendapatan Bunga dari Dana Bergulir	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>105.728.235.304,03</b>	<b>115.154.324.299,03</b>	<b>(6.450.805.675,00)</b>

#### (1) Aset Tetap Rusak Berat

Merupakan nilai aset tetap dalam kondisi rusak berat yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah yang akan dihapuskan. Nilai saldo awal berdasarkan nilai buku netto aset rusak berat sebesar Rp71.989.648.390,88 mengalami penurunan sebesar Rp5.663.022.397,56 dari nilai akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.326.625.993,32. penurunan dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dan penghapusan aset rusak berat sebesar dari nilai perolehan 31 Desember 2021 sebesar Rp167.709.102.617,04 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.141. Nilai Perolehan Aset Rusak Berat**

Nilai Perolehan 2021 (Rp)	Nilai Perolehan 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
167.709.102.617,04	171.803.642.110,92	(4.094.539.493,88 )

**Mutasi Aset Rusak Berat**

Saldo awal aset rusak berat dari nilai perolehan 31 Desember 2020 sebesar Rp171.803.642.110,92 mengalami penurunan sebesar Rp4.094.539.493,88 dengan mutasi sebagai berikut :

Mutasi Tambah Aset Lainnya sebesar Rp37.172.260.418,00, dikarenakan adanya Reklasifikasi dari Tanah Dobel Catat, Peralatan dan Mesin serta Bangunan dan Gedung sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin aset rusak berat sebesar Rp897.602.265,00 terdiri dari Perangkat Daerah :
  1. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Dinas Pengairan dengan nilai perolehan sebesar Rp2.420.000,00  
Berita Acara Penelusuran Barang Milik Daerah Nomor 610/656/b.a.VI.04/2021 tanggal 23 November 2021
  2. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai perolehan sebesar Rp48.500.000,00  
Berita Acara Penelusuran Barang Milik Daerah Nomor 900/353/D.a.VI.06/2021 tanggal 6 Desember 2021
  3. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nilai perolehan sebesar Rp4.268.000,00  
Berita Acara Inventaris Barang Milik Daerah nomor 800/448/D.a.VI.08/2021 tanggal 30 November 2021
  4. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Badan Ketahanan Pangan dengan nilai perolehan sebesar Rp235.033.000,00  
Berita Acara Penelusuran Barang Milik Daerah nomor 800/416.f/D.a.VI.II/2021 tanggal 6 Oktober 2021
  5. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dengan nilai perolehan sebesar Rp249.879.200,00  
Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 900/1044/B/D.a.VII.17/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal Usulan Penghapusan Inventaris Barang Milik Daerah
  6. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Dinas Perdagangan dengan nilai perolehan sebesar Rp19.950.000,00  
Berita Acara Inventaris Barang Milik Daerah nomor 900/656/D.a.IV.26/IX/2021 tanggal 23 November 2021.
  7. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Sekretariat Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp162.881.899,00

Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Sekratriis Daerah Kabupaten Lampung Tengah 18 Juni Perihal Usulan Penghapusan Barang Inventaris Bagian Hukum Sekdakab Lampung Tengah dalam kondisi rusak berat dan atau hilang dari Kartu Inventaris Barang bagian Hukum Sekdakab Lampung Tengah.

8. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Kecamatan Gunung Sugih dengan nilai perolehan sebesar Rp58.500.000,00  
Berita Acara Penelusuran Barang Milik Daerah nomor 900/1207.A/B.a.VII.02/2021 tanggal 3 November 2021
  9. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Kecamatan Bangunrejo dengan nilai perolehan sebesar Rp11.000.000,00  
Berita Acara Penelusuran Barang Milik Daerah nomor 024/234/Kc.a.VII.06/2021 tanggal 25 November 2021
  10. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp44.700.000,00  
Berita Acara Penelusuran Barang Milik Daerah nomor 900/4667/B.a.VII.01/2021 tanggal 1 Desember 2021
  11. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada BPKAD dengan nilai perolehan sebesar Rp58.720.166,00  
Berita Acara Penelusuran Barang Milik Daerah nomor 900/1206/Ba.VII.02/2021 tanggal 23 November 2021
  12. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin rusak berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.750.000,00  
Berita Acara Penelusuran Barang Milik Daerah nomor 900/6667/D.a.VII.01/2021 tanggal 30 November 2021
- 2) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya, kendaraan DUM sebesar Rp755.520.000,00 terdiri Perangkat Daerah:
1. Reklasifikasi kendaran DUM namun belum dilakukan proses penghapusan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp345.000.000,00
  2. Reklasifikasi kendaran DUM namun belum dilakukan proses penghapusan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp410.520.000,00
- 3) Reklasifikasi Aset Tanah ke Aset Lainnya, aset dobel catat dan hibah tanah sebesar Rp34.985.407.058,00 terdiri dari :
1. Pada Kartu Inventaris Barang Dinas Bina Marga dobel catat aset tanah dengan Balai Besar Mesuji Sekampung dengan nilai perolehan sebesar Rp33.971.434.560,00
  2. Pada Kartu Inventaris Barang Dinas Sosial atas Aset Dobel Catat dengan Provinsi Lampung Tanah BLK di Metro dengan nilai perolehan sebesar Rp21.066.060,00
  3. Tercatat Kartu Inventaris Barang Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah hibah tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp992.906.438,00 terdiri
    - a. Hibah Tanah ke Kemenag dengan nilai perolehan Rp40.563.438,00

- b. Hibah Tanah ke Mako Brimob dengan nilai perolehan Rp952.343.000,00
- 4) Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya, aset dobel catat dan penghapusan/lelang bangunan sebesar Rp476.119.095,00
  - 1. Dinas Sosial dobel catat Gedung dan Bangunan sebesar dengan nilai perolehan Rp40.000.000,00
  - 2. Dinas Kesehatan lelang Gedung dan Bangunan Puskesmas Kota Gajah dengan nilai perolehan sebesar Rp436.119.095,00
- 5) Reklasifikasi Peralatan dan Mesin kendaraan hilang proses TP-TGR dengan nilai perolehan sebesar Rp57.612.000,00 pada dinas :
  - 1. Dinas Perhubungan dengan nilai perolehan sebesar Rp25.000.000,00 Laporan Kehilangan Nomor TBL/226/VI/2021 SPKT/SEK TEBAS RES LT POLDA LPG kendaraan Dinas Honda Tiger 2000.
  - 2. Sekretariat Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp32.612.000,00
    - Laporan Kehilangan LP/BI/1408/III/2007/SPK/TABES BALAM dengan nilai peolehan kendaraan sebesar Rp14.750.000,00
    - Laporan Kehilangan TBL/736-B/VII/2019/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR SKM nilai perolehan kendaraan sebesar Rp17.862.000,00

Mutasi Kurang Penghapusan Aset Rusak Berat, Hilang Kendaraan Proses TP-TGR, Kendaraan DUM, Aset Tanah Dobel Catat serta Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp52.414.409.224,00 yang terdiri dari :

- 1) Penghapusan Aset Rusak Berat dari Kartu Inventaris Barang dengan nilai perolehan sebesar Rp12.679.025.509,00 pada Perangkat Daerah :
  - 1. Dinas Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan nilai perolehan sebesar Rp325.954.720,00  
Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1480/B.a.VII.02/2021 dan Surat Penghapusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 117/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 Desember 2021
  - 2. Badan Ketahanan Pangan dengan nilai perolehan Rp2.413.034.976,00 diantaranya :  
Surat persetujuan Bupati Lampung Tengah nomor 900/1200/B.a.VII.02 tanggal 22 November 2021 surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 111/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 November 2021, penghapusan aset rusak berat sebesar Rp102.504.176,00 dan  
Surat persetujuan Bupati Lampung Tengah nomor 900/1200/B.a.VII.02/2021 tanggal 22 November 2021 surat Keputusan Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah Nomor 114/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 November 2021 Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan Lumbung Pangan sebesar Rp2.310.530.800,00
  - 3. Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dengan nilai perolehan sebesar Rp459.838.750,00

Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/029/B.a.VII.02/2021 dan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 121/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 Desember 2021

4. Dinas Perikanan dengan nilai perolehan sebesar Rp4.154.463.370,00

Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1479/B.a.VII.02/2021 dan surat keputusan Sekretaris Daerah nomor 125/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 Desember 2021

5. Dinas Pariwisata dengan nilai perolehan sebesar Rp709.937.800,00

Surat persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1198/B.a.VII.02/2021 tanggal 22 November 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 113/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 November 2021

6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan nilai perolehan sebesar Rp343.799.320,00

Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/033/B.a.VII.02/2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 120/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 Desember 2021

7. Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.385.321.330,00

Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1481/B.a.VII.02/2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 122/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 Desember 2021

8. Sekretariat Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.367.535.537,00 yang terdiri dari :

- Penghapusan Hibah ke Mako Brimob sebesar Rp992.906.438,00 :

Surat persetujuan Bupati Lampung Tengah nomor 900/1241/B.a.VII.02 tanggal 26 November 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 109/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 November 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp40.563.438,00

Surat persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1241/B.a.VII.02/2021 tanggal 26 November 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 110/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 November 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp952.343.000,00

- Penghapusan Aset Rusak Berat sebesar Rp362.469.099,00

Surat persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1198/B.a.VII.02/2021 tanggal 22 November 2021 dan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

- Tengah nomor 112/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 November 2021
- Penyelesaian TP-TGR sebesar Rp12.160.000,00  
Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 108/KPTS/B.a.VII.02/2021 tentang Penghapusan Kendaraan Roda 2 (dua) dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 November 2021
9. Kecamatan Seputih Mataram dengan nilai perolehan sebesar Rp313.532.006,00  
Surat persetujuan Bupati Lampung Tengah nomor 900/1198/B.a.VII.02/2021 tanggal 22 November 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 112/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 November 2021
- 2) Penghapusan Peralatan dan Mesin DUM dengan nilai perolehan sebesar Rp1.289.824.000,00 terdiri dari Perangkat Daerah:
1. Dinas Kesehatan dengan nilai perolehan sebesar Rp345.000.000,00  
Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/933/B.a.VII.02/2021 tanggal 10 September 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 103/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 18 Oktober 2021
  2. Dinas Sosial dengan nilai perolehan sebesar Rp203.304.000,00  
Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1198/B.a.VII.02/2020 tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 88/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 7 Juni 2021
  3. Dinas Perhubungan dengan nilai perolehan sebesar Rp410.520.000,00  
Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1240/B.a.VII.02/2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 123/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 Desember 2021
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan nilai perolehan sebesar Rp331.000.000,00  
Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/651/B.a.VII.02/2020 tanggal 17 November 2020 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 76/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 10 Mei 2021
- 3) Penghapusan Kendaraan Dinas Penyelesaian TPTGR pada Dinas Perdagangan dengan nilai perolehan sebesar Rp14.550.000,00  
Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 73 /KPTS/B.a.VII.02/2021 tentang Penghapusan Kendaraan Roda (2) Dua dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Tengah

- 4) Penghapusan Gedung dan Bangunan Dobel Catat dan Lelang dengan nilai perolehan sebesar Rp4.438.509.095,00 terdiri dari :
  1. Dinas Sosial dobel catat dengan Provinsi Lampung BLK di Metro sebesar Rp21.066.060,00  
Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1345/B.a.VII.02/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 115/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 November 2021
  2. Dinas Bina Marga dobel catat dengan Balai Besar Mesuji sekampung sebesar Rp3.962.390.000,00  
Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 495/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 September 2021
  3. Dinas Kesehatan Lelang Bangunan dan Gedung Puskesmas Kotagajah dengan nilai perolehan sebesar Rp436.119.095,10  
Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah nomor 900/15/B.a.VII.02/2021 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 95/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 Oktober 2021
  
- 5) Penghapusan Aset Tanah Dobel Catat dengan nilai perolehan sebesar Rp33.992.500.620,00 terdiri dari :
  1. Dinas Bina Marga dobel catat dengan Balai Besar Mesuji sekampung nilai perolehan sebesar Rp33.971.434.560,00  
Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 488/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 7 September 2021.  
Aset tanah dobel catat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan direktorat jenderal sumber daya air balai besar wilayah sungai mesuji sekampung
  2. Dinas Sosial dengan Provinsi Lampung nilai perolehan sebesar Rp21.066.060,00.  
Surat persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1345/B.a.VII.02/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 115/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 30 November 2021.
  
- (2) Aset Tetap yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.  
Merupakan nilai aset tetap yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang diserahkan kepada masyarakat namun belum ada BAST hibahnya per tanggal neraca. Nilai aset tetap yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.147.609.310,71 terdiri dari:

**Tabel 5.142. Aset Tetap yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.012.913.000,00	2.012.913.000,00
2	Gedung dan Bangunan	9.134.696.310,71	11.963.989.006,15
3	Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi	-	933.773.902,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.147.609.310,71</b>	<b>14.910.675.908,15</b>

Saldo Awal Aset tetap yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat belum ada BAST sebesar Rp14.910.675.908,15 mengalami perubahan penurunan sebesar Rp3.763.066.597,44 menjadi saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.147.609.310,71 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Aset tetap yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat karena reklasifikasi dari aset tetap hasil pengadaan Tahun 2013 sebesar Rp11.147.609.310,71 yang terdiri dari pembangunan perpustakaan, ruang kelas baru, ruang laboratorium dan rehabilitasi ruang kelas sebesar Rp9.134.696.310,71 serta pengadaan peralatan alat laboratorium dan alat peraga pendidikan sebesar Rp2.012.913.000,00 untuk sekolah swasta yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum ada BAST masih dalam proses penyelesaian.
- (b) Penurunan adanya penghapusan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.763.066.597,44 terdiri dari :
  1. penghapusan aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Tengah dari daftar barang milik daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp933.773.902,00 berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor Nomor 900/1455.A/B.a.VII.02/2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 118/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 31 November 2021
  2. Penurunan adanya penghapusan aset Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dari daftar barang milik daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp2.829.292.695,44 berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Lampung Tengah Nomor 900/1260/B.a.VII.02/2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 119/KPTS/B.a.VII.02/2021 tanggal 1 Desember 2021.
- (3) Penempatan deposito pada BPR Tripanca yang dilikuidasi merupakan nilai atas penempatan deposito pada BPR Tripanca yang terkena likuidasi. Nilai sebesar Rp28.000.000.000,00 merupakan tagihan kepada pemegang saham PT BPR Tripanca Setiadana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 88/Pen.PDT.G/2008/PN.TK tanggal 16 Desember 2008 (dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/Pdt/2009/PT.TK tanggal 11 Januari 2011) yang berisi antara lain menghukum PT BPR Tripanca Setiadana untuk

mengembalikan simpanan dana deposito senilai Rp28.000.000.000,00 membayar bunga 12% per tahun sejak bulan November 2008 sampai dengan dilaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, dan menyatakan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagaimana disebut dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 88/Pen.PDT.G/2008/PN.TK tanggal 16 Desember 2008 adalah sah dan berharga. Atas putusan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dengan surat nomor 180/484/02/2016 tanggal 17 Oktober 2016, terbit penetapan kedua pengadilan Negeri Nomor 22/Eks.PTS/2016/PN.Tjk tanggal 06 April 2017 dan ditindalanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Bupati Lampung Tengah ke Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nomor 180/38.a/Sekda.I.02/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Mohon Bantuan Hukum Selaku Pengacara Negara, namun sampai dengan tertanggal neraca belum ada tindak penyelesaian.

TA 2014 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah mencairkan Dana Jaminan sebesar Rp2.000.000.000,00 berdasarkan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 900/0508/LTD.7/2013 perihal Mohon Pencairan Dana Jaminan tanggal 03 Desember 2013 dan Surat Pernyataan Bupati Lampung Tengah Nomor 0510/LTD.07/2013 serta Surat Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S.47/DivPKL/III/2014 perihal Informasi Berakhirnya Hak Klaim 5 Tahun Nasabah Simpanan Layak Bayar PT BPR Tripanca Setiadana (DL) tanggal 20 Maret 2014.

- (4) Utang PFK pada bendahara pengeluaran Tahun 2008 yang belum disetor  
Merupakan utang PFK tahun 2008 di bendahara pengeluaran sebesar Rp254.000.000,00 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp140.000.000,00 serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah sebesar Rp114.000.000,00 yang belum disetor ke kas negara. Atas utang PFK tersebut, telah ada rekomendasi dari Bupati Lampung Tengah agar ditindaklanjuti dalam Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) sesuai surat Nomor 700/295.w/LTD.1a/2016 tanggal 02 Juni 2016, namun belum ada penetapan atau SKTJM yang diterbitkan.
- (5) Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir  
Merupakan saldo investasi non permanen lainnya - dana bergulir yang berasal dari program pola dana bergulir yang dikoordinir oleh Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian, Promosi, Investasi dan Penanaman Modal, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perdagangan Pasar, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang disalurkan kepada masyarakat di Tahun 2005 s.d 2007. Ringkasan dana bergulir adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.143. Investasi Non Permanen**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal	2.204.764.934,60	2.274.766.956,00
Pembayaran	47.521.075,00	70.002.021,40
Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
Jumlah	2.157.243.859,60	2.204.764.934,60
Penyisihan	(2.157.243.859,60)	(2.204.764.934,60)
<b>Saldo Akhir</b>	-	-

Nilai sebesar Rp2.157.243.859,60 merupakan nilai perubahan atas saldo awal Tahun 2020 sebesar Rp2.204.764.934,60 setelah dikurangi pembayaran pokok dana bergulir sebesar Rp47.521.075,00. Investasi non permanen lainnya-dana bergulir sebesar Rp2.157.243.859,60 sampai dengan tertanggal neraca penagihannya masih ditangani oleh KPKNL Metro. Penyerahan Penagihan Piutang Dana Bergulir kepada KPKNL Metro dengan Dokumen Nomor:500/124/05/2016 Tanggal 6 Nopember 2016.

- (6) Piutang Pendapatan Bunga dari Dana Bergulir  
Merupakan pos untuk menampung piutang pendapatan dari bunga dana bergulir dari Tahun 2008 sebesar Rp546.041.671,00. Nilai piutang tersebut digolongkan macet sehingga disisihkan sebesar 100%.

**Tabel 5.144. Piutang Pendapatan Bunga dari Dana Bergulir**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Awal	546.041.671,00	546.041.671,00
Pembayaran	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
Jumlah	546.041.671,00	546.041.671,00
Penyisihan	(546.041.671,00)	(546.041.671,00)
<b>Saldo Akhir</b>	-	-

### 5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban diakui apabila pemda memiliki kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

**Tabel 5.145. Kewajiban**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Kewajiban Jangka Pendek	95.316.608.408,58	48.258.607.854,53	47.058.000.554,05
2	Kewajiban Jangka Panjang	104.115.736.954,77	0,00	104.115.736.954,77
	<b>Jumlah</b>	<b>199.432.345.363,35</b>	<b>48.258.607.854,53</b>	<b>151.173.737.508,82</b>

#### 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk mencatat kewajiban yang akan jatuh tempo 12 bulan dari tanggal Neraca. Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

**Tabel 5.146. Kewajiban Jangka Pendek**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	749.220.249,00	1.028.432.873,80	(279.212.624,80)
2	Utang Bunga	102.483.733,00	0,00	102.483.733,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	20.273.496.042,77	0,00	20.273.496.042,77
4	Pendapatan diterima dimuka	0,00	484.519.695,00	(484.519.695,00)
5	Utang Belanja	74.191.408.383,81	46.745.655.285,73	27.445.753.098,08
	<b>Jumlah</b>	<b>95.316.608.408,58</b>	<b>48.258.607.854,53</b>	<b>47.058.000.554,05</b>

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  
 Utang PFK sebesar Rp749.220.249,00 merupakan potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran OPD yang melewati tahun anggaran belum disetor ke kas negara. Utang PFK ini merupakan utang PFK di bendahara BOS sebesar Rp495.220.249,00 dan Utang PFK tahun 2008 di bendahara pengeluaran Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp140.000.000,00 serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah sebesar Rp114.000.000,00 yang belum disetor ke kas negara. Atas utang PFK tersebut, telah ada rekomendasi dari Bupati Lampung Tengah agar ditindaklanjuti dalam Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) sesuai surat Nomor 700/295.w/LTD.1a/2016 Tanggal 02 Juni 2016, namun belum ada penetapan atau SKTJM yang diterbitkan.
- b) Utang Bunga  
 Utang Bunga sebesar Rp102.483.733,00 merupakan utang bunga pinjaman jangka panjang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur yang jatuh tempo per 31 Desember 2021 (dari tanggal 26 Desember s.d 31 Desember 2021).
- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp20.273.496.042,77 terdiri dari:
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp873.047.114,77 merupakan bagian lancar dari Pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah berdasarkan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka Pengalihan Utang dan Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor: RDA-238/DPB/1996 Tanggal: 16 Februari 1996 yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Lampung Tengah dengan Nomor: RPD – 339/Eks. RDA-238/DP3/2021 Tanggal 29 Desember 2021. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pinjaman Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 821.24/82/BA/Setda.II.05/2021 dan Nomor: 900/771/B.a.VII.02/2021 Tanggal 9 Agustus 2021, menerima penyerahan utang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Lampung Tengah per *Cut-off Date* 3 Desember 2020 sebesar Rp15.749.232.997,54. Jumlah Pinjaman

tersebut merupakan kewajiban pokok dan non pokok dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kewajiban Pokok	1.746.094.229,54
2	Kewajiban Non Pokok	
	Biaya Administrasi	5.089.246.367,09
	Denda	8.913.892.400,91
<b>Jumlah</b>		<b>15.749.232.997,54</b>

Melalui surat nomor: 900/823/B.a.VII.02/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengajukan permohonan pengalihan utang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah disetujui dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-1036/MK.05/2021 tanggal 19 Nopember 2021. Pembayaran Kewajiban Pokok sebesar Rp1.746.094.229,54 dijadwalkan selama 2 (dua) tahun dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Pembayaran	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	31 Agustus 2022	873.047.114,77
2	31 Agustus 2023	873.047.114,77
<b>Jumlah</b>		<b>1.746.094.229,54</b>

Pembayaran kewajiban pokok disetorkan ke Rekening Menteri Keuangan atas nama Rek Lain BI Pembangunan Daerah nomor 519000102xxx pada Bank Indonesia. Terdapat selisih sebesar 0,01 dengan nilai yang tercantum di Surat Perjanjian Pinjaman karena adanya pembulatan.

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Sebesar Rp19.400.448.928,00 merupakan bagian lancar dari pinjaman jangka panjang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan cicilan pokok utang dengan cicilan per bulan sebesar Rp2.771.492.704,00 selama 7 (tujuh) bulan (Juni s.d Desember 2022).
- d) Pendapatan diterima dimuka  
Pendapatan diterima dimuka pada TA 2021 sebesar Rp0,00

**Tabel 5.147. Pendapatan Diterima Dimuka**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	-	484.519.695,00	(484.519.695,00)
	<b>Jumlah</b>	-	<b>484.519.695,00</b>	<b>(484.519.695,00)</b>

- e) Utang Belanja  
Utang Belanja yang terdiri dari:

**Tabel 5.148. Utang Belanja**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD	44.541.900,00	18.012.891.700,00	(17.968.349.800,00)
2	Tunggakan Tambahan Penghasilan	55.500.000,00	684.750.000,00	(629.250.000,00)
3	Utang BLUD RSUD Demang Sepulau Raya	14.993.758.154,00	13.633.773.137,99	1.359.985.016,01
4	Utang Beban Barang dan Jasa	1.680.695.031,84	2.646.917.253,28	(966.222.221,44)
5	Utang Belanja Modal	57.416.913.297,97	11.767.323.194,46	45.649.590.103,51
	<b>Jumlah</b>	<b>74.191.408.383,81</b>	<b>46.745.655.285,73</b>	<b>27.445.753.098,08</b>

Rincian pada *Lampiran 6, 6a-6e*

### 5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.115.736.954,77 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.149. Kewajiban Jangka Panjang**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	89.239.551.072,00	-	89.239.551.072,00
2	Utang Kepada Pemerintah Pusat	14.876.185.882,77	-	14.876.185.882,77
	<b>Jumlah</b>	<b>104.115.736.954,77</b>	<b>-</b>	<b>104.115.736.954,77</b>

1) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp89.239.551.072,00 dengan Perjanjian Nomor: PERJ-142/SMI/0921 dan Nomor: 900/881/B.a.VII.02/2021 Tanggal: 10 September 2021. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat dirinci dalam bentuk *schedule* sebagai berikut:

Tabel 5.150. *Schedule* Cicilan Pokok Pinjaman

No	Bulan/Tahun	Pokok Pinjaman	Cicilan/bulan	Saldo Pinjaman
1	Juni 2022	149.660.606.000,00	2.771.492.704,00	146.889.113.296,00
2	Juli 2022		2.771.492.704,00	144.117.620.592,00
3	Agustus 2022		2.771.492.704,00	141.346.127.888,00
4	September 2022		2.771.492.704,00	138.574.635.184,00
5	Oktober 2022		2.771.492.704,00	135.803.142.480,00
6	Nopember 2022		2.771.492.704,00	133.031.649.776,00
7	Desember 2022		2.771.492.704,00	130.260.157.072,00
8	Januari 2023		2.771.492.704,00	127.488.664.368,00
9	Februari 2023		2.771.492.704,00	124.717.171.664,00
10	Maret 2023		2.771.492.704,00	121.945.678.960,00
11	April 2023		2.771.492.704,00	119.174.186.256,00
12	Mei 2023		2.771.492.704,00	116.402.693.552,00
13	Juni 2023		2.771.492.704,00	113.631.200.848,00
14	Juli 2023		2.771.492.704,00	110.859.708.144,00
15	Agustus 2023		2.771.492.704,00	108.088.215.440,00
16	September 2023		2.771.492.704,00	105.316.722.736,00
17	Oktober 2023		2.771.492.704,00	102.545.230.032,00
18	Nopember 2023		2.771.492.704,00	99.773.737.328,00
19	Desember 2023		2.771.492.704,00	97.002.244.624,00
20	Januari 2024		2.771.492.704,00	94.230.751.920,00
21	Februari 2024		2.771.492.704,00	91.459.259.216,00
22	Maret 2024		2.771.492.704,00	88.687.766.512,00
23	April 2024		2.771.492.704,00	85.916.273.808,00
24	Mei 2024		2.771.492.704,00	83.144.781.104,00
25	Juni 2024		2.771.492.704,00	80.373.288.400,00
26	Juli 2024		2.771.492.704,00	77.601.795.696,00
27	Agustus 2024		2.771.492.704,00	74.830.302.992,00
28	September 2024		2.771.492.704,00	72.058.810.288,00
29	Oktober 2024		2.771.492.704,00	69.287.317.584,00
30	Nopember 2024		2.771.492.704,00	66.515.824.880,00
31	Desember 2024		2.771.492.704,00	63.744.332.176,00
32	Januari 2025		2.771.492.704,00	60.972.839.472,00
33	Februari 2025		2.771.492.704,00	58.201.346.768,00
34	Maret 2025		2.771.492.704,00	55.429.854.064,00
35	April 2025		2.771.492.704,00	52.658.361.360,00
36	Mei 2025		2.771.492.704,00	49.886.868.656,00
37	Juni 2025		2.771.492.704,00	47.115.375.952,00
38	Juli 2025		2.771.492.704,00	44.343.883.248,00
39	Agustus 2025		2.771.492.704,00	41.572.390.544,00
40	September 2025		2.771.492.704,00	38.800.897.840,00
41	Oktober 2025		2.771.492.704,00	36.029.405.136,00
42	Nopember 2025		2.771.492.704,00	33.257.912.432,00
43	Desember 2025		2.771.492.704,00	30.486.419.728,00
44	Januari 2026		2.771.492.704,00	27.714.927.024,00
45	Februari 2026		2.771.492.704,00	24.943.434.320,00
46	Maret 2026		2.771.492.704,00	22.171.941.616,00
47	April 2026		2.771.492.704,00	19.400.448.912,00
48	Mei 2026		2.771.492.704,00	16.628.956.208,00
49	Juni 2026		2.771.492.704,00	13.857.463.504,00
50	Juli 2026		2.771.492.704,00	11.085.970.800,00
51	Agustus 2026		2.771.492.704,00	8.314.478.096,00
52	September 2026		2.771.492.704,00	5.542.985.392,00
53	Oktober 2026		2.771.492.704,00	2.771.492.688,00
54	Nopember 2026		2.771.492.688,00	-

Tabel 5.151. *Schedule* Bunga Pinjaman

No	Tanggal Pencairan	Tanggal Bunga	Pokok Pinjaman (Rp)	Persentase (%) / Tahun = 5,66%/360	Jumlah Hari	Jumlah Bunga (Rp)
1	02-Dec-21	25-Dec-21	38.800.000.000,00	0,000157222	23	140.305.111
2	21-Dec-21	25-Dec-21	69.840.000.000,00	0,000157222	4	43.921.600
3		25-Jan-22	108.640.000.000,00	0,000157222	31	529.499.289
4	18-Feb-22	25-Feb-22	41.020.606.000,00	0,000157222	7	45.145.456
5		25-Feb-22	108.640.000.000,00	0,000157222	31	529.499.289
6		25-Mar-22	149.660.606.000,00	0,000157222	28	658.839.246
7		25-Apr-22	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
8		25-May-22	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
9		25-Jun-22	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
10		25-Jul-22	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
11		25-Aug-22	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
12		25-Sep-22	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
13		25-Oct-22	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
14		25-Nov-22	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
15		25-Dec-22	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
16		25-Jan-23	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
17		25-Feb-23	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
18		25-Mar-23	149.660.606.000,00	0,000157222	28	658.839.246
19		25-Apr-23	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
20		25-May-23	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
21		25-Jun-23	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
22		25-Jul-23	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
23		25-Aug-23	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
24		25-Sep-23	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
25		25-Oct-23	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
26		25-Nov-23	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
27		25-Dec-23	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
28		25-Jan-24	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
29		25-Feb-24	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
30		25-Mar-24	149.660.606.000,00	0,000157222	29	682.369.219
31		25-Apr-24	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
32		25-May-24	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
33		25-Jun-24	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
34		25-Jul-24	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
35		25-Aug-24	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
36		25-Sep-24	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
37		25-Oct-24	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
38		25-Nov-24	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
39		25-Dec-24	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
40		25-Jan-25	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
41		25-Feb-25	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
42		25-Mar-25	149.660.606.000,00	0,000157222	28	658.839.246
43		25-Apr-25	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
44		25-May-25	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
45		25-Jun-25	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
46		25-Jul-25	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
47		25-Aug-25	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
48		25-Sep-25	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
49		25-Oct-25	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
50		25-Nov-25	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
51		25-Dec-25	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
52		25-Jan-26	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
53		25-Feb-26	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
54		25-Mar-26	149.660.606.000,00	0,000157222	28	658.839.246
55		25-Apr-26	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
56		25-May-26	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
57		25-Jun-26	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
58		25-Jul-26	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
59		25-Aug-26	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
60		25-Sep-26	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
61		25-Oct-26	149.660.606.000,00	0,000157222	30	705.899.192
62		25-Nov-26	149.660.606.000,00	0,000157222	31	729.429.165
						42.089.344.021

**Tabel 5.152. Schedule Biaya Pengelolaan Pinjaman**

No	Tahun	Pokok Pinjaman Terutang (Rp)	%	Biaya Pengelolaan (Rp)
1	2021	155.200.000.000,00	0,185	287.120.000,00
2	2022	138.574.635.184,00	0,185	256.363.075,09
3	2023	105.316.722.736,00	0,185	194.835.937,06
4	2024	72.058.810.288,00	0,185	133.308.799,03
5	2025	38.800.897.840,00	0,185	71.781.661,00
6	2026	5.542.985.392,00	0,185	10.254.522,98
<b>Jumlah</b>				<b>953.663.995,16</b>

## 2) Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada pemerintah pusat sebesar Rp14.876.185.882,77 merupakan Pinjaman Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang sudah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui persetujuan Menteri Keuangan dengan Nomor: S-1036/MK.05/2021 tanggal 19 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.153. Utang Kepada Pemerintah Pusat**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kewajiban Pokok	873.047.114,770
2	Kewajiban Non Pokok	14.003.138.768,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.876.185.882,77</b>

Untuk penyelesaian Penghapusan tunggakan non pokok sebesar Rp14.003.138.768,00 akan ditetapkan setelah adanya penghapusan mutlak dari Presiden Republik Indonesia.

**5.3.3. Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupa selisih antara aset dan kewajiban. Total ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.740.424.717.566,94 sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp3.182.319.653.920,60 terdapat kenaikan nilai ekuitas sebesar Rp558.105.063.646,34 atau sebesar 17,54%.

## 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional Tahun 2021 dan 2020

### 5.4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.295.161.002.451,03 terdiri dari:

**Tabel 5.154. Pendapatan Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	224.231.498.411,03	188.008.306.217,86
2	Pendapatan Transfer - LO	1.798.753.640.484,00	1.766.655.304.704,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	272.175.863.556,00	168.230.407.252,70
	<b>Jumlah</b>	<b>2.295.161.002.451,03</b>	<b>2.122.894.018.174,56</b>

#### 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan asli daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp224.231.498.411,03 terdiri dari:

**Tabel 5.155. Pendapatan Asli Daerah - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	104.683.322.680,00	87.013.443.232,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.985.578.975,00	9.536.671.009,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	8.530.725.715,69	5.944.035.422,48
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	103.031.871.040,34	85.514.156.554,38
	<b>Jumlah</b>	<b>224.231.498.411,03</b>	<b>188.008.306.217,86</b>

#### 5.4.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp104.683.322.680,00 terdiri dari:

**Tabel 5.156. Pendapatan Pajak Daerah - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	990.833.920,00	395.980.782,00
2	Pajak Restoran - LO	3.654.119.475,00	2.774.082.977,00
3	Pajak Hiburan - LO	291.711.241,00	304.883.769,00
4	Pajak Reklame - LO	1.869.977.825,00	1.133.358.933,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	50.613.340.873,00	47.680.683.424,00
6	Pajak Parkir - LO	649.673.086,00	576.268.535,00
7	Pajak Air Tanah - LO	8.929.856.091,00	4.783.181.741,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	871.134.343,00	707.157.677,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	31.844.391.807,00	22.581.028.017,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	4.968.284.019,00	6.076.817.377,00
	<b>Jumlah</b>	<b>104.683.322.680,00</b>	<b>87.013.443.232,00</b>

Perbedaan antara LO dan LRA pada pajak daerah sebesar Rp3.992.039.220,30 (Rp104.683.322.680,00 – Rp100.691.283.459,70) terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp129.426.901,00, Pajak Restoran sebesar Rp62.689.000,00, Pajak Hiburan sebesar Rp19.599.957,00 dan Pajak Parkir sebesar Rp105.930.548,00 karena adanya penetapan Piutang Pajak Tahun 2021.
- 2) Pajak Reklame sebesar Rp484.519.695,00 karena adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 yang menjadi porsi pendapatan LO Tahun 2021.
- 3) Pajak PBB-P2 sebesar Rp3.189.873.119,30 karena adanya realisasi piutang pajak PBB-P2 tahun 2020 sebesar Rp29.082.650.376,51 dan penetapan Piutang Pajak PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp32.272.523.495,81.

#### 5.4.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.985.578.975,00 Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya sebesar Rp9.536.671.009,00 maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.551.092.034,00 atau turun sebesar 16,26% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.157. Pendapatan Retribusi Daerah- LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	1.221.482.500,00	2.070.007.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	947.208.000,00	844.160.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	120.900.000,00	106.800.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	959.109.900,00	860.708.200,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	266.910.000,00	47.980.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	162.637.500,00	112.157.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	448.845.000,00	433.812.200,00
8	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	-	1.119.718.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	200.425.000,00	-
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	1.436.889.000,00	-
11	Retribusi Terminal-LO	16.260.000,00	-
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	440.000.000,00	14.070.000,00
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	3.260.000,00	2.000.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	137.070.900,00	180.330.600,00
15	Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	-	306.705.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.624.081.175,00	3.437.622.509,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	500.000,00	600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.985.578.975,00</b>	<b>9.536.671.009,00</b>

Perbedaan antara LO dan LRA pada Pendapatan Retribusi daerah sebesar Rp90.230.400,00 (Rp7.985.578.975,00 – Rp8.075.809.375,00) terdiri dari:

- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp3.470.900,00 yang merupakan mutasi tambah karena adanya realisasi piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2020 sebesar Rp38.817.100,00 dan Penetapan Piutang di Tahun 2021 sebesar Rp42.288.000,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp93.701.300,00 yang merupakan mutasi kurang karena adanya realisasi piutang Tahun 2020 yang menjadi porsi di Tahun 2021 sebesar Rp93.701.300,00

#### 5.4.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2021 merupakan bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD, pada:

**Tabel 5.158. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	PT Bank Lampung - LO	6.461.458.068,54	5.944.035.422,48
2	PT BPR Rajasa - LO	2.069.267.647,15	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.530.725.715,69</b>	<b>5.944.035.422,48</b>

Perbedaan antara LO dan LRA pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp819.184.151,15 (Rp8.530.725.715,69 – Rp7.711.541.564,54) karena adanya penambahan ekuitas pada PT. Bank Rajasa sebesar Rp819.184.151,15.

#### 5.4.1.1.d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Lain-lain PAD Yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp103.031.871.040,34 terdiri dari:

**Tabel 5.159. Lain-lain PAD Yang Sah - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	8.046.010,00	1.036.175.998,00
2	Pendapatan Piutang dari Kerjasama dengan Pihak Ketiga	414.375.000,00	1.754.925.000,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	10.552.909.365,38	11.944.394.163,82
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	47.521.075,00	70.002.021,40
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.987.420.658,86	5.834.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	90.085.149,10	8.511.130,00
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	10.928.835,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	29.048.092,00	89.029.051,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	54.207.200,00	485.300,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	799.217.460,00	1.624.734.255,92
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO	1.595.608,00	0,00
12	Pendapatan dari BLUD-LO	59.223.398.120,00	29.781.824.047,24
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	29.813.118.467,00	37.341.004.750,00
14	Pendapatan dari Piutang Pajak Air Tanah	0,00	1.648.841.337,00
15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	35.850.000,00
16	Pendapatan dari Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	172.545.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>103.031.871.040,34</b>	<b>85.514.156.554,38</b>

Perbedaan LRA dan LO sebesar Rp15.380.758.610,61 (Rp103.031.871.040,34–Rp118.412.629.650,95) terdiri dari:

- Pendapatan Piutang dari Kerjasama dengan pihak ketiga sebesar Rp414.375.000,00 disebabkan karena adanya penambahan penetapan piutang pendapatan pihak ketiga Tahun 2021 sebesar Rp414.375.000,00;

- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.976.337.695,61 disebabkan karena adanya mutasi kurang penyesuaian pendapatan TGR sebesar Rp24.000.000,00, pengembalian kelebihan volume atas pekerjaan jalan pada dinas Bina Marga sebesar Rp1.952.337.695,61.
- Pendapatan BLUD RSUD Demang Sepulau Raya selisih sebesar Rp13.818.795.915,00 disebabkan karena adanya pelunasan piutang BLUD Tahun 2020 sebesar Rp15.131.450.274,00 dan adanya penetapan Piutang TA 2021 sebesar Rp1.312.654.359,00;

#### 5.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung yang diterima melalui Kas Daerah, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.798.753.640.484,00 terdiri dari:

**Tabel 5.160. Pendapatan Transfer -LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.674.206.567.383,00	1.660.544.026.774,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	124.547.073.101,00	106.111.277.930,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.798.753.640.484,00</b>	<b>1.766.655.304.704,00</b>

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.1.2.a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.674.206.567.383,00 terdiri dari:

**Tabel 5.161. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Perimbangan - LO	1.664.299.043.383,00	1.625.918.929.774,00
2	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	9.907.524.000,00	34.625.097.000,00
3	Dana Desa - LO	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.674.206.567.383,00</b>	<b>1.660.544.026.774,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat di rinci sebagai berikut:

##### 1) Dana Perimbangan – LO

Dana Perimbangan untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp1.664.299.043.383,00 terdiri dari:

**Tabel 5.162. Dana Perimbangan – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	73.279.957.288,00	33.545.484.116,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.233.414.075.000,00	1.248.686.762.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	92.492.306.802,00	62.547.183.193,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	265.112.704.293,00	281.139.500.465,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.664.299.043.383,00</b>	<b>1.625.918.929.774,00</b>

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) - LO  
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.163. Dana Bagi Hasil (DBH) – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DBH PBB-LO	49.312.125.517,00	69.194.924,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	16.047.415.130,00	14.334.247.083,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	685.316.029,00	0,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau-LO	51.118.605,00	103.399.816,00
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	3.322.393.130,00	5.249.193.048,00
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	262.211.090,00	559.003.599,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	1.487.474.891,00	637.869.386,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	38.345.407,00	0,00
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	491.200.542,00	205.481.722,00
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	224.737.797,00	49.715.350,00
11	DBH SDA Perikanan-LO	1.357.619.150,00	788.276.289,00
12	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan-LO	0,00	3.107.532.244,00
13	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan-LO	0,00	5.539.905.521,00
14	Bagi Hasil Dana Biaya Pungutan PBB Bagian Provinsi dan Kabupaten atau Kota-LO	0,00	190.173.200,00
15	Bagi Hasil Alokasi PBB Bagian Pemerintah Pusat yang di Bagikan Kepada Kabupaten/Kota-LO	0,00	2.711.491.934,00
	<b>Jumlah</b>	<b>73.279.957.288,00</b>	<b>33.545.484.116,00</b>

- b) Dana Alokasi Umum (DAU)  
Dana Alokasi Umum dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.164. Dana Alokasi Umum - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum - LO	1.233.414.075.000,00	1.248.686.762.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.233.414.075.000,00</b>	<b>1.248.686.762.000,00</b>

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.165. Dana Alokasi Khusus Fisik - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan - LO	0,00	20.875.126.900,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	406.010.000,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	25.168.870.407,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	4.746.434.014,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	425.484.000,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	197.185.120,00	0,00
7	DAK Bidang Kesehatan - LO	0,00	28.011.976.666,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	7.939.058.600,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	2.875.988.037,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	3.924.205.294,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	1.357.416.500,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	2.495.850.261,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	39.599.604,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	4.338.000.900,00	1.680.000.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	939.448.750,00	954.903.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	14.148.936.227,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	8.479.303.039,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	8.272.207.973,00	1.035.000.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	3.488.781.000,00	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	3.111.027.076,00	2.791.157.927,00
21	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler-LO	138.500.000,00	
22	DAK Bidang Pariwisata	0,00	3.981.278.700,00
23	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - LO	0,00	3.217.740.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>92.492.306.802,00</b>	<b>62.547.183.193,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 92.492.306.802,00 Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya sebesar Rp 62.547.183.193,00 maka realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 29.945.123,00 atau naik sebesar 47,88%

- d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik  
Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.166. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	233.934.691.000,00	215.562.821.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.848.750.000,00	1.351.750.000,00
3	Tunjangan Khusus Guru - LO	0,00	85.560.000,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	18.554.700.000,00	19.242.000.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	4.846.350.000,00	4.845.600.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.986.587.721,00	2.973.731.000,00
7	Bantuan Operasional Kesehatan - LO	0,00	32.109.664.181,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	376.561.000,00	0,00
9	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi	1.188.503.572,00	4.551.016.284,00
10	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	376.561.000,00	0,00
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	417.358.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>265.112.704.293,00</b>	<b>281.139.500.465,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 265.112.704.293,00 Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya sebesar Rp 281.139.500.465,00 maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp16.026.796.172,00 atau turun sebesar 5,70 %

- 2) Dana Insentif Daerah (DID) - LO

Pada Tahun 2021 Kabupaten Lampung Tengah memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp9.907.524.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.167. Dana Insentif Daerah (DID)**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	9.907.524.000,00	34.625.097.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.907.524.000,00</b>	<b>34.625.097.000,00</b>

- 3) Dana Desa - LO

Dana Desa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sebab pendapatan ini bukan merupakan porsi dari pendapatan LO.

#### **5.4.1.2.b. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO**

Transfer daerah lainnya merupakan transfer dari pemerintah provinsi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp124.547.073.101,00 terdiri dari:

**Tabel 5.168. Pendapatan Bagi Hasil - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	24.827.334.917,00	21.374.872.318,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	16.355.691.731,00	10.725.584.009,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	35.272.729.559,00	28.031.077.943,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	181.018.416,00	124.665.095,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	47.910.298.478,00	45.855.078.565,00
	<b>Jumlah</b>	<b>124.547.073.101,00</b>	<b>106.111.277.930,00</b>

Perbedaan antara LRA dan LO Pada Transfer Pemerintah daerah lainnya sebesar Rp20.344.064.452,00 (Rp104.203.008.649,00 – Rp124.547.073.101,00) yang merupakan Mutasi Tambah karena adanya Pembayaran Piutang DBH TA 2020 dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp30.326.625.212,00 dan Penetapan Piutang 2021 sebesar Rp50.670.689.664,00.

#### 5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

**Tabel 5.169. Lain-lain Pendapatan yang sah - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	121.648.735.556,00	15.159.270.015,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	150.527.128.000,00	153.071.137.237,70
	<b>Jumlah</b>	<b>272.175.863.556,00</b>	<b>168.230.407.252,70</b>

Perbedaan antara LO dan LRA pada Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp112.830.954.208,00 (Rp272.175.863.556,00 – Rp159.344.909.348,00) karena adanya mutasi tambah yaitu:

- 1) Hibah Tanah dari Pihak Ketiga/Masyarakat Pasos TPU Perumahan Griya Bandar Sari Utama sebesar Rp105.000.000,00, Tanah Hibah Eks PDAM Way Irang sebesar Rp157.340.000,00
- 2) Hibah Dari Kementerian Pendidikan Peralatan Mesin sebesar Rp723.280.000,00
- 3) Hibah Peralatan dan Mesin Berupa Komputer dari Kementerian BKPM sebesar Rp16.415.300,00
- 4) Hibah Kendaraan Ambulance 2 Unit CSR Bank Lampung sebesar Rp472.000.000,00, Hibah Peralatan Mesin dari GPM (Peralatan PCR sebesar Rp1.740.059.258,00 dan I unit Ambulance sebesar Rp201.820.000,00), Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (Kulkas Vaksin 14 Unit) sebesar Rp586.530.000,00
- 5) Hibah Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR dari Fasus dan Fasos sebesar Rp23.841.846.540,00
- 6) Hibah Gedung Bangunan dari kementerian PUPR sebesar Rp17.780.384.000,00

- 7) Hibah Jalan Irigasi dan Jaringan Terdiri dari Jalan Sekunder dan Saluran Drainase dari pasus dan Pasum sebesar Rp66.957.779.110,00
- 8) Hibah Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga (BRI) pada Rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya sebesar Rp248.500.000,00

#### 5.4.2. BEBAN - LO

Beban LO merupakan beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan yang disajikan dalam Laporan Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.197.742.729.639,47. Beban LO terdiri dari:

**Tabel 5.170. Beban Daerah**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Operasi	1.733.776.762.181,80	1.768.598.220.969,68
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	311.271.280.252,67	300.607.099.140,82
3	Beban Transfer	152.694.687.205,00	155.111.885.578,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.197.742.729.639,47</b>	<b>2.224.317.205.688,50</b>

##### 5.4.2.1. Beban Operasi

Beban operasi meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain, beban subsidi dan beban penyusutan dan amortisasi. Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.733.776.762.181,80 yang terdiri dari:

**Tabel 5.171. Beban Operasi**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Pegawai	1.164.115.089.059,00	1.198.574.880.945,00
2	Beban Barang dan Jasa	427.965.240.587,33	430.824.736.859,68
3	Beban Bunga	286.710.444,00	
4	Beban Hibah	75.370.056.543,15	128.471.834.670,00
5	Beban Penyisihan Piutang	1.852.538.559,55	0,00
6	Beban Lain-lain	64.045.526.988,77	10.726.768.495,00
7	Beban Subsidi	141.600.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.733.776.762.181,80</b>	<b>1.768.598.220.969,68</b>

##### 5.4.1.2.a. Beban Pegawai

Beban pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.164.115.089.059,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.172. Beban Pegawai**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	725.647.651.496,00	727.548.406.858,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	80.193.482.497,00	70.323.640.254,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	278.938.287.610,00	330.218.628.617,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	26.429.988.518,00	21.027.432.624,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	133.218.882,00	75.381.132,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	963.120.000,00	672.000.720,00
7	Beban Pegawai BOS	49.708.305.056,00	48.709.390.740,00
8	Beban Pegawai BLUD	2.101.035.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.164.115.089.059,00</b>	<b>1.198.574.880.945,00</b>

(1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji dan Tunjangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp725.647.651.496,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.173. Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	557.897.994.392,00	562.251.734.990,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	52.553.939.822,00	53.273.101.574,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	9.556.839.950,00	10.121.868.747,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	40.381.030.000,00	40.394.855.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.170.355.000,00	5.817.207.000,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	30.793.925.632,00	26.290.849.860,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	862.374.356,00	1.523.568.283,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	7.494.551,00	6.701.850,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.878.117.024,00	27.868.519.554,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.134.926.379,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.410.654.390,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>725.647.651.496,00</b>	<b>727.548.406.858,00</b>

(2) Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp80.193.482.497,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.174. Beban Tambahan Penghasilan PNS**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	74.601.350.062,00	65.443.868.016,00
2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	3.434.560.000,00	3.020.440.000,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	2.157.572.435,00	1.859.332.238,00
	<b>Jumlah</b>	<b>80.193.482.497,00</b>	<b>70.323.640.254,00</b>

(3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

**Tabel 5.175. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.591.682.438,00	3.869.464.230,00
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	341.189.953,00	421.235.800,00
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	208.910.087.180,00	224.841.157.220,00
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.489.250.000,00	2.625.717.995,00
5	Beban Tunjangan Khusus Guru	0,00	59.628.300,00
6	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	46.862.642.287,00	0,00
7	Beban Honorarium	15.743.435.752,00	0,00
8	Beban Honorarium PNS	0,00	28.381.500.623,00
9	Beban Honorarium Non PNS	0,00	69.309.792.850,00
10	Beban Uang Lembur	0,00	100.728.599,00
11	Beban Lauk Pauk & Uang Piket	0,00	609.403.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>278.938.287.610,00</b>	<b>330.218.628.617,00</b>

Perbedaan antara LRA dan LO pada beban gaji dan tunjangan sebesar Rp18.597.599.800,00 (Rp297.535.887.410,00 – Rp278.938.287.610,00) terdiri dari:

- Mutasi Kurang pada Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp17.968.349.800,00 (Rp226.878.436.980,00 – Rp208.910.087.180,00) karena adanya pembayaran Utang TPG TA 2020 sebesar Rp18.012.891.700,00 dan Penetapan Utang TPG di TA 2021 Sebesar Rp44.541.900,00
- Mutasi Kurang pada Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp629.250.000,00 (Rp3.118.500.000,00 – Rp2.489.250.000,00) karena adanya pembayaran Utang Tambahan Penghasilan Guru TA 2020 sebesar Rp684.750.000,00 dan Penetapan Utang Tambahan Penghasilan Guru di TA 2021 Sebesar Rp55.500.000,00

(4) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.429.988.518,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.176. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Uang Representasi DPRD	1.109.535.000,00	955.080.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	125.193.600,00	106.822.800,00
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	130.066.320,00	129.486.960,00
4	Beban Uang Paket DPRD	95.035.500,00	95.508.000,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.608.825.750,00	1.384.866.000,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	148.991.850,00	0,00
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.775.900.000,00	6.300.000.000,00
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	2.192.505.000,00	1.575.000.000,00
9	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	785.498,00	812.664,00
10	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.683.500.000,00	0,00
11	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.556.500.000,00	4.581.600.000,00
12	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	0,00
13	Beban Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	30.145.500,00
14	Beban Tunjangan Komisi	0,00	61.387.200,00
15	Beban Tunjangan Badan Anggaran	0,00	31.241.700,00
16	Beban Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	7.856.100,00
17	Beban Tunjangan Perumahan	0,00	5.751.000.000,00
18	Beban Tunjangan Badan Pembentukan Perda	0,00	16.625.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.429.988.518,00</b>	<b>21.027.432.624,00</b>

(5) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp133.218.882,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.177. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	43.200.000,00	25.200.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.880.000,00	2.520.000,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.760.000,00	45.360.000,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	1.738.080,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	294.722,00	563.052,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	880,00	720,00
	<b>Jumlah</b>	<b>133.218.882,00</b>	<b>75.381.852,00</b>

- (6) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  
 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp963.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.178. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	252.000.000,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	570.000.000,00	420.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>963.120.000,00</b>	<b>672.000.000,00</b>

- (7) Beban Pegawai BOS  
 Beban Pegawai BOS untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp49.708.305.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.179. Beban Pegawai BOS**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Pegawai BOS	49.708.305.056,00	48.709.390.740,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.708.305.056,00</b>	<b>48.709.390.740,00</b>

- (8) Beban Pegawai BLUD  
 Beban Pegawai BLUD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.101.035.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.180. Beban Pegawai BLUD**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Pegawai BLUD	2.101.035.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.101.035.000,00</b>	<b>-</b>

#### 5.4.2.1.b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp427.965.240.587,33 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.181. Beban Barang dan Jasa**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Barang	84.141.943.611,24	66.443.768.708,54
2	Beban Jasa	180.343.874.653,20	142.754.132.698,13
3	Beban Pemeliharaan	19.966.665.439,88	19.134.329.092,35
4	Beban Perjalanan Dinas	26.575.184.827,00	33.440.264.412,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	4.459.252.100,00	78.401.102.770,16
6	Beban Barang dan Jasa BOS	78.572.843.183,00	88.893.359.344,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	33.905.476.773,01	0,00
8	Beban Aset Tetap Extra Comtabel	0,00	1.757.779.834,50
	<b>Jumlah</b>	<b>427.965.240.587,33</b>	<b>430.824.736.859,68</b>

**1) Beban Barang**

Beban Barang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp84.141.943.611,24 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.182. Beban Barang**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020(Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	84.119.315.546,24	66.443.768.708,54
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	22.628.065,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.141.943.611,24</b>	<b>66.443.768.708,54</b>

Rincian Beban Barang Pakai Habis terdiri dari:

**a) Beban Barang Pakai Habis**

Beban barang pakai habis untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp84.119.315.546,24 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.183. Beban Barang Pakai Habis**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.248.954.029,42	3.174.529.370,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	295.655.330,00	168.687.910,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	730.087.828,00	2.056.883.110,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	2.502.218.510,00	2.561.793.200,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	109.355.000,00	332.816.000,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.157.000,00	6.980.000,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	64.189.000,00	64.050.900,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	42.205.890,00	2.500.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	677.721.525,00	9.800.000,00
10	Beban Bahan Praktek Kesehatan	0,00	5.700.000,00
11	Beban Bahan Praktek Pertanian/Perikanan/Perkebunan/Kehutanan	0,00	825.257.400,00
12	Beban Bahan dan Peralatan Insemenasi Buatan	0,00	107.250.000,00
13	Beban Bahan Logistik	0,00	102.223.000,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	766.350.151,00	0,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.231.744.445,00	0,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.017.908.700,00	3.102.126.302,50
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	11.880.000,00	0,00
18	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	20.828.800,00	11.150.000,00
19	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	13.437.500,00	0,00
20	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.988.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.746.681.708,42</b>	<b>12.531.747.192,50</b>

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
	<b>Jumlah Pindahan</b>	<b>9.746.681.708,42</b>	<b>12.531.747.192,50</b>
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.663.271.775,00	8.217.139.746,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.138.811.426,00	14.515.508.662,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	414.454.000,00	335.028.400,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	42.234.800,00	472.369.600,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.042.378.000,00	0,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	15.512.140,00	1.866.444.931,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	761.335.318,30	893.966.643,00
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	52.668.000,00	0,00
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	32.502.000,00	20.992.400,00
30	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	246.468.500,00	198.451.500,00
31	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	415.450.432,00	518.987.499,00
32	Beban Perlengkapan Promosi dan Pameran	0,00	33.200.000,00
33	Beban Obat-Obatan-Obat	4.255.053.763,68	9.194.498.635,04
34	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.701.003.502,00	0,00
35	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.571.722.096,84	0,00
36	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	133.467.200,00	0,00
37	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	40.551.250,00	0,00
38	Beban Makanan dan Minuman Rapat	12.687.897.445,00	5.767.978.715,00
39	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.738.420.850,00	1.433.924.217,50
40	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	228.004.600,00	0,00
41	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	149.630.300,00	656.572.637,00
42	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.241.440.000,00	5.556.790.825,00
43	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	1.438.671.620,50
44	Beban Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH	0,00	339.763.985,00
45	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	208.676.600,00	7.994.800,00
46	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	97.020.000,00	10.500.000,00
47	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	333.839.000,00	309.936.000,00
48	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	60.656.200,00	170.737.600,00
49	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	464.721.380,00	116.497.000,00
50	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	110.613.000,00	55.440.000,00
51	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	146.338.500,00	156.750.000,00
52	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	68.200.000,00	0,00
53	Beban Pakaian Penyelamatan	34.893.100,00	0,00
54	Beban Pakaian Siaga	6.345.740,00	0,00
55	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	946.043.260,00	0,00
56	Beban Pakaian KORPRI	7.499.250,00	9.250.000,00
57	Beban Pakaian Adat Daerah	282.975.000,00	347.875.000,00
58	Beban Pakaian Batik Tradisional	264.875.700,00	142.102.825,00
59	Beban Pakaian Olahraga	767.659.709,00	631.977.900,00
60	Beban Pakaian dan Perlengkapannya	0,00	129.535.200,00
61	Beban Pakaian Kerja Lapangan	0,00	324.589.800,00
62	Beban Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan	0,00	38.545.375,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.119.315.546,24</b>	<b>66.443.768.708,54</b>

Perbedaan antara LRA dan LO sebesar Rp11.066.958.884,94 (Rp73.052.356.661,30 – Rp84.119.315.546,24) disebabkan karena adanya mutasi tambah dan kurang, yang terdiri dari:

- Mutasi tambah pada persediaan Bahan-bahan Kimia sebesar Rp18.298.500,00, Persediaan Bahan Isi Tabung Gas sebesar Rp11.010.000,00, Persediaan Bahan-bahan Lainnya sebesar Rp417.000,00, Persediaan Bahan Cetak sebesar Rp722.760.295,00, Persediaan Perabot Kantor sebesar Rp3.175.000,00, Persediaan Alat Listrik sebesar Rp1.265.000,00, Persediaan Obat-obatan sebesar Rp1.960.315.592,68, Persediaan Penelitian Biologi sebesar Rp40.551.250,00, karena terdapat persediaan TA 2020 yang digunakan di tahun 2021;
- Mutasi tambah Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp10.293.231.647,84, karena adanya Belanja Modal menjadi Barang diserahkan ke Masyarakat;
- Mutasi kurang pada persediaan Bahan-bahan Bangunan dan konstruksi sebesar Rp561.321.220,58, Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar Rp35.415.250,00, Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp71.811.285,00, Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp437.801.453,00, Persediaan Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp863.735.192,00, Persediaan Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp13.981.000,00 karena terdapat sisa belanja yang dicatat sebagai persediaan TA 2021.

**b) Beban Barang Tak Pakai Habis**

Beban Barang Tak Pakai Habis untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.628.065,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.184. Beban Barang Tak Pakai Habis**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020(Rp)
1	Beban Komponen-Komponen Lainnya	6.000.000,00	0,00
2	Beban Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)	16.628.065,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.628.065,00</b>	<b>0,00</b>

**2) Beban Jasa**

Beban Jasa Kantor untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp180.343.874.653,20 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.185. Beban Jasa**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	146.005.177.123,20	96.509.019.394,73
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	22.242.329.974,00	17.251.450.163,00
3	Beban Sewa Tanah	43.000.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.224.189.600,00	1.517.929.610,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.115.095.270,00	686.598.500,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	60.898.200,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.599.599.986,00	1.701.301.500,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.797.242.500,00	1.561.521.000,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	96.000.000,00	292.300.000,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.160.342.000,00	7.067.740.367,00
12	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	16.166.272.163,40
	<b>Jumlah</b>	<b>180.343.874.653,20</b>	<b>142.754.132.698,13</b>

**a. Beban Jasa Kantor**

Beban Jasa Kantor sebesar Rp146.005.177.123,20 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.186. Beban Jasa Kantor**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	172.500.000,00	0,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.470.504.500,00	0,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.585.754.950,00	0,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.282.800.000,00	0,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	308.900.000,00	0,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	307.400.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.318.725.000,00	181.582.000,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	441.500.000,00	0,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	19.633.500.000,00	0,00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	10.518.372.761,00	42.271.572.693,66
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	225.081.650,00	205.064.091,00
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	691.537.500,00	1007800526
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.547.350.000,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	988.000.000,00	0,00
15	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	144.000.000,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Administrasi	6.016.000.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.735.900.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.408.125.000,00	7.341.893.525,07
19	Beban Jasa Tenaga Ahli	725.448.350,00	0,00
20	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.638.543.008,00	253.955.930,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.159.942.719,00</b>	<b>51.261.868.765,73</b>

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
	<b>Jumlah Pindahan</b>	<b>84.159.942.719,00</b>	<b>51.261.868.765,73</b>
21	Beban Jasa Tenaga Keamanan	6.814.268.000,00	0,00
22	Beban Jasa Tenaga Supir	982.150.000,00	0,00
23	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	108.600.000,00	0,00
24	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	276.000.000,00	0,00
25	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	44.000.000,00	0,00
26	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.962.867.700,00	0,00
27	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	54.250.762,20	7.198.000,00
28	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	288.265.500,00	2.991.500,00
29	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	208.076.000,00	0,00
30	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	247.680.000,00	50.000.000,00
31	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	0,00
32	Beban Jasa Kalibrasi	97.912.084,00	0,00
33	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.785.894.170,00	178.114.585,00
34	Beban Jasa Pengukuran Tanah	380.348.010,00	0,00
35	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	65.000.000,00	9.620.366.024,00
36	Beban Jasa Penyelaman	5.177.430.000,00	0,00
37	Beban Tagihan Telepon	66.078.653,00	582.066.694,00
38	Beban Tagihan Listrik	28.997.195.858,00	29.682.096.495,00
39	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.079.163.901,00	2.295.677.000,00
40	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.007.218.740,00	1.922.097.476,00
41	Beban Paket/Pengiriman	51.961.500,00	904.900,00
42	Beban Penambahan Daya	25.938.780,00	0,00
43	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.604.746,00	0,00
44	Beban Lembur	91.050.000,00	0,00
45	Beban Medical Check Up	27.280.000,00	0,00
46	Beban Dokumentasi	0,00	109.737.255,00
47	Beban Dekorasi	0,00	3.785.000,00
48	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan	0,00	334.140.700,00
49	Beban Transportasi dan Akomodasi	0,00	31.625.000,00
50	Beban Kontribusi Kepada Pihak Ketiga	0,00	137.570.000,00
51	Beban Beasiswa bagi Pendidik	0,00	104.160.000,00
52	Beban Sertifikasi	0,00	184.620.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>146.005.177.123,20</b>	<b>96.509.019.394,73</b>

Perbedaan antara LRA dan LO sebesar Rp302.706.780,00 disebabkan karena adanya mutasi tambah yang terdiri dari:

- Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebesar Rp287.120.000,00 karena adanya pembayaran Biaya Pengelolaan Pinjaman pada PT. SMI
- Beban Penambahan Daya sebesar Rp15.586.780,00 karena adanya realisasi Belanja Modal menjadi Barang Jasa Pemasangan Instalasi dan Penambahan Daya Listrik pada Dinas Binamarga.

**b. Beban Iuran Jaminan/Asuransi**

Beban Iuran dan Jaminan/Asuransi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.242.329.974,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.187. Beban Iuran Jaminan/Asuransi**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	237.200.000,00	0,00
2	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	18.915.934.500,00	16.918.787.000,00
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.535.587.200,00	0,00
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	76.132.791,00	0,00
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.477.475.483,00	0,00
6	Beban Premi Asuransi	0,00	332.663.163,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.242.329.974,00</b>	<b>17.251.450.163,00</b>

**c. Beban Sewa Tanah**

Beban Sewa Tanah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp43.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.188. Beban Sewa Tanah**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	18.000.000,00	0,00
2	Beban Sewa Tanah Kering	25.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**d. Beban Sewa Peralatan dan Mesin**

Beban Sewa Peralatan dan Mesin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.224.189.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.189. Beban Sewa Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	621.932.600,00	0,00
2	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	429.466.400,00	0,00
3	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7.500.000,00	0,00
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	9.000.000,00	0,00
5	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	5.000.000,00	0,00
6	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	785.565.600,00	132.372.000,00
7	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	51.745.000,00	0,00
8	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat	224.719.000,00	0,00
9	Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	51.095.000,00	0,00
10	Beban Sewa System/Power Supply	36.666.000,00	0,00
11	Beban Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	381.295.000,00
12	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	607.144.110,00
13	Beban Sewa Generator	0,00	4.750.000,00
14	Beban Sewa Tenda/Tarub	0,00	155.048.500,00
15	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	19.400.000,00
16	Beban Sewa Sound System	0,00	186.920.000,00
17	Beban Sewa Perlengkapan/Dekorasi	0,00	22.000.000,00
18	Beban Sewa Alat Studio	0,00	9.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.224.189.600,00</b>	<b>1.517.929.610,00</b>

**e. Beban Sewa Gedung dan Bangunan**

Beban Sewa Gedung dan Bangunan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.115.095.270,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.190. Beban Sewa Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Sewa Bangunan Gudang	6.600.000,00	
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.108.495.270,00	199.772.500,00
3	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Tinggal	0,00	456.826.000,00
4	Beban Sewa Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	0,00	30.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.115.095.270,00</b>	<b>686.598.500,00</b>

**f. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp60.898.200,00.

**Tabel 5.191. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	60.898.200,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.898.200,00</b>	<b>0,00</b>

**g. Beban Jasa Konsultasi Konstruksi**

Beban Sewa Konsultasi Konstruksi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.599.599.986,00

**Tabel 5.192. Beban Jasa Konsultasi Konstruksi**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	25.850.000,00	0,00
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	14.359.300,00	0,00
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	28.376.000,00	0,00
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	798.928.726,40	0,00
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	208.779.000,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	359.350.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	98.600.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.534.243.026,40</b>	<b>0,00</b>

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
	<b>Jumlah Pindahan</b>	<b>1.534.243.026,40</b>	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	998.720.100,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	252.786.000,00	0,00
10	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	49.643.088,00	0,00
11	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	215.965.400,00	0,00
12	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	1.548.242.371,60	0,00
13	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	1.326.691.965,99
14	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	374.609.534,01
	<b>Jumlah</b>	<b>4.599.599.986,00</b>	<b>1.701.301.500,00</b>

Perbedaan antara LRA dan LO pada Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp14.462.848.640,00 (Rp19.062.448.626,00 – Rp4.599.599.986,00) yaitu berupa mutasi kurang karena adanya kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan menjadi aset tetap.

#### **h. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

Beban Sewa Konsultansi Non Konstruksi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.797.242.500,00.

**Tabel 5.193. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	321.100.000,00	0,00
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	94.369.100,00	0,00
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	144.928.000,00	0,00
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	250.531.300,00	0,00
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	49.270.000,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	339.000.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	69.373.600,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	528.670.500,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultansi Penelitaian	0,00	100.000.000,00
10	Beban Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi	0,00	661.804.000,00
11	Beban Jasa Konsultansi Penyusunan	0,00	67.969.000,00
12	Beban Jasa Konsultansi Hukum	0,00	45.000.000,00
13	Beban Jasa Konsultansi	0,00	686.748.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.797.242.500,00</b>	<b>1.561.521.000,00</b>

#### **i. Beban Beasiswa Pendidikan PNS**

Beban Beasiswa Pendidikan PNS untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp96.000.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.194. Beban Beasiswa Pendidikan PNS**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	-	192.300.000,00
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	96.000.000,00	100.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>292.300.000,00</b>

**j. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**

Beban Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.160.342.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5.195. Beban Kursus Singkat/Pelatihan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	698.342.000,00	1.378.150.000,00
2	Beban Bimbingan Teknis	1.462.000.000,00	74.146.367,00
3	Beban Kontribusi Peserta	0,00	99.890.000,00
4	Beban Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	5.276.076.000,00
5	Beban Sosialisasi	0,00	30.978.000,00
6	Beban Pendidikan Penjurangan	0,00	208.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.160.342.000,00</b>	<b>7.067.740.367,00</b>

**3) Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp19.966.665.439,88 terdiri dari :

**Tabel 5.196. Beban Pemeliharaan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	41.215.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.298.376.165,67	1.568.001.808,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.057.696.481,01	5.189.655.988,50
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.565.057.793,20	10.341.965.077,85
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.320.000,00	2.034.706.218,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.966.665.439,88</b>	<b>19.134.329.092,35</b>

**a. Beban Pemeliharaan Tanah**

Beban Pemeliharaan Tanah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.215.000,00 terdiri dari :

**Tabel 5.197. Beban Pemeliharaan Tanah**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	41.215.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>41.215.000,00</b>	-

**b. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp14.298.376.165,67 terdiri dari :

**Tabel 5.198. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat	556.667.556,67	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu	420.851.150,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor	10.655.760.830,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor	24.885.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	99.550.000,00	102.362.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.003.734.805,00	1.023.491.308,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca	196.613.963,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	88.674.900,00	75.158.500,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium	23.326.600,00	4.958.800,00
10	Beban Pemeliharaan Komputer	1.140.555.561,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja	13.090.000,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu	74.665.800,00	0,00
13	Beban Sarana dan Prasarana Perhubungan	0,00	223.632.200,00
14	Beban Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan	0,00	138.399.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.298.376.165,67</b>	<b>1.568.001.808,00</b>

Perbedaan antara LRA dan LO pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yaitu berupa mutasi tambah sebesar Rp320.078.756,67 (Rp13.978.297.409,00 – Rp14.298.376.165,67), karena adanya KDP menjadi pemeliharaan rutin sebesar Rp298.701.856,67 dan Belanja Modal menjadi Barang yang diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp21.376.900,00;

**c. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.057.696.481,01 terdiri dari :

**Tabel 5.199. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	187.800.296,20	3.183.983.933,50
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	188.828.038,77	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	85.620.970,80	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	595.447.175,24	0,00
5	Beban Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan	0,00	2.005.672.055,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.057.696.481,01</b>	<b>5.189.655.988,50</b>

Perbedaan antara LRA dan LO pada Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yaitu berupa mutasi kurang sebesar Rp4.915.165.810,99 (Rp5.972.862.292,00 –

Rp1.057.696.481,01) karena adanya kapitalisasi dari beban pemeliharaan menjadi aset tetap.

**d. Beban Pemeliharaan Jalan**

Beban Pemeliharaan Jalan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.565.057.793,20 terdiri dari :

**Tabel 5.200. Beban Pemeliharaan Jalan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	446.600.000,00	1.322.242.406,85
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi	3.002.488.200,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor	14.889.995,60	0,00
4	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah	86.440.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik	96.256.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik	49.830.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik	867.053.597,60	0,00
8	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon	1.500.000,00	1.073.900.371,00
9	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Irigasi	0,00	7.589.917.000,00
10	Beban Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan Internet	0,00	355.905.300,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.565.057.793,20</b>	<b>10.341.965.077,85</b>

Perbedaan antara LRA dan LO pada Beban Pemeliharaan Jalan yaitu berupa mutasi kurang sebesar Rp17.521.096.100,00 (Rp22.086.153.893,20 – Rp4.565.057.793,20) karena adanya kapitalisasi dari beban pemeliharaan menjadi aset tetap.

**e. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.320.000,00 terdiri dari :

**Tabel 5.201 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanaman	4.320.000,00	894.881.328,00
2	Beban Pemeliharaan Pagar dan Halaman Parkir	0,00	293.041.100,00
3	Beban Pemeliharaan Kebersihan	0,00	846.783.790,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>2.034.706.218,00</b>

**4) Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.575.184.827,00 terdiri dari:

**Tabel 5.202. Beban Perjalanan Dinas**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.856.199.134,00	19.827.044.102,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.810.469.500,00	13.613.220.310,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	107.040.000,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	801.476.193,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.575.184.827,00</b>	<b>33.440.264.412,00</b>

**5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Kemasyarakatan**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Kemasyarakatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.459.252.100,00 terdiri dari:

**Tabel 5.203. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Kemasyarakatan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.990.952.100,00	28.879.883.893,00
2	Beban Jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	468.300.000,00	49.521.218.877,16
	<b>Jumlah</b>	<b>4.459.252.100,00</b>	<b>78.401.102.770,16</b>

**6) Beban Barang dan Jasa BOS**

Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp78.572.843.183,00 terdiri dari:

**Tabel 5.204. Beban Barang dan Jasa BOS**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BOS	78.572.843.183,00	88.893.359.344,00
	<b>Jumlah</b>	<b>78.572.843.183,00</b>	<b>88.893.359.344,00</b>

**7) Beban Barang dan Jasa BLUD**

Beban Barang dan Jasa BLUD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp33.905.476.773,01 terdiri dari:

**Tabel 5.205. Beban Barang dan Jasa BLUD**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	33.905.476.773,01	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.905.476.773,01</b>	<b>0,00</b>

Perbedaan antara LRA dan LO pada Beban Barang dan Jasa BLUD yaitu berupa mutasi tambah sebesar Rp1.359.985.016,01 (Rp33.905.476.773,01–Rp32.545.491.757,00) karena adanya pelunasan Utang BLUD tahun 2020 sebesar Rp13.633.773.137,99 dan penetapan Utang BLUD tahun 2021 sebesar Rp14.993.758.154,00.

**5.4.2.1.c. Beban Bunga**

Beban Bunga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp286.710.444,00 terdiri dari:

**Tabel 5.206. Beban Bunga**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Bunga	286.710.444,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>286.710.444,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Bunga sebesar Rp286.710.444,00 merupakan beban bunga utang atas pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PERSERO) yang jatuh tempo per 31 Desember 2021.

#### 5.4.2.1.d. Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp141.600.000,00 terdiri dari:

**Tabel.5.207. Beban Subsidi**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Subsidi	141.600.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>141.600.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.2.1.e. Beban Hibah

Beban Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp75.370.056.543,15 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.208. Beban Hibah**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.764.798.436,00	86.074.014.250,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	66.430.990.709,15	23.615.835.542,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.174.267.398,00	1.174.267.398,00
5	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	13.443.962.280,00
6	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	2.863.755.200,00
7	Beban Hibah Kepada KONI	0,00	1.300.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>75.370.056.543,15</b>	<b>128.471.834.670,00</b>

Perbedaan antara LRA dan LO pada Beban Hibah yaitu berupa mutasi tambah sebesar Rp590.379.250,00 (Rp7.174.419.186,00 – Rp7.764.798.436,00) karena adanya Belanja Modal menjadi Beban Hibah.

#### 5.4.2.1.f. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.852.538.559,55 terdiri dari:

**Tabel.5.209. Beban Penyisihan Piutang**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.803.149.758,86	1.988.644.630,83
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.158.908,00	19.979.947,25
3	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	48.229.892,69	(2.008.624.578,08)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.852.538.559,55</b>	<b>-</b>

Adapun Rincian Beban Penyisihan Piutang Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel.5.210. Beban Penyisihan Piutang Lainnya**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang BLUD	(69.093.979,58)	39.228.571,16
2	Beban Penyisihan Piutang DBH	101.720.322,27	(2.048.440.274,24)
3	Beban Penyisihan Piutang TGR	(9.498.700,00)	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	25.102.250,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang PT. Pandu	-	587.125,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.229.892,69</b>	<b>(2.008.624.578,08)</b>

#### 5.4.2.1.g. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp64.045.526.988,77 terdiri dari:

**Tabel.5.211. Beban lain-Lain**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Lain-lain	64.045.526.988,77	10.726.768.495,00
	<b>Jumlah</b>	<b>64.045.526.988,77</b>	<b>10.726.768.495,00</b>

Beban Lain-lain sebesar Rp64.045.526.988,77 merupakan beban Aset Extra Komptabel sebesar Rp8.286.039.062,36 dan Beban Penghapusan Aset sebesar Rp55.759.487.926,41.

Beban Lain-lain pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp53.318.758.493,77 atau sebesar 497,06% hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 beban lain-lain hanya terdiri dari beban penghapusan aset sedangkan pada tahun 2021 terdiri dari beban penghapusan aset dan beban aset extra komptabel. *Rincian pada lampiran 7.*

#### 5.4.2.2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO

Beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp311.271.280.252,67 terdiri dari:

**Tabel.5.212. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.711.440.495,22	52.939.082.114,67
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.119.686.793,00	19.691.633.254,76
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	236.071.734.471,45	227.937.576.431,39
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.161.278.987,00	0,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	207.139.506,00	38.807.340,00
	<b>Jumlah</b>	<b>311.271.280.252,67</b>	<b>300.607.099.140,82</b>

1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban penyusutan peralatan dan mesin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp48.711.440.495,22 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel.5.213. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	48.456.683.520,02	52.939.082.114,67
2	Beban Penyusutan Alat Kantor	31.471.000,00	-
3	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	208.339.327,00	
4	Beban Penyusutan Personal Computer	14.946.648,20	
	<b>Jumlah</b>	<b>48.711.440.495,22</b>	<b>52.939.082.114,67</b>

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban penyusutan gedung dan bangunan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp21.119.686.793,00 dapat diuraikan sebagai berikut

**Tabel.5.214. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.119.686.793,00	19.691.633.254,76
	<b>Jumlah</b>	<b>21.119.686.793,00</b>	<b>19.691.633.254,76</b>

3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp236.071.734.471,45 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel.5.215. Beban penyusutan jalan dan jembatan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	236.071.734.471,45	227.937.463.556,39
2	Instalasi Gardu Listrik	0,00	112.875,00
	<b>Jumlah</b>	<b>236.071.734.471,45</b>	<b>227.937.576.431,39</b>

4) Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban penyusutan aset lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.161.278.987,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel.5.216. Beban penyusutan aset lainnya**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.161.278.987,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.161.278.987,00</b>	<b>-</b>

5) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban penyusutan aset lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp207.139.506,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel.5.217. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	207.139.506,00	38.807.340,00
	<b>Jumlah</b>	<b>207.139.506,00</b>	<b>38.807.340,00</b>

**5.4.2.3. BEBAN TRANSFER -LO**

Beban transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp152.694.687.205,00 terdiri dari:

**Tabel.5.218. Beban Transfer**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LO	9.734.373.020,00	7.766.649.980,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO	142.960.314.185,00	147.345.235.598,00
	<b>Jumlah</b>	<b>152.694.687.205,00</b>	<b>155.111.885.578,00</b>

Beban Transfer dapat dirinci sebagai berikut:

1) **Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LO****Tabel.5.219. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	8.796.173.020,00	6.750.449.980,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	938.200.000,00	1.016.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.734.373.020,00</b>	<b>7.766.649.980,00</b>

2) **Beban Transfer Bantuan Keuangan – LO****Tabel.5.220. Beban Transfer Bantuan Keuangan**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	142.960.314.185,00	147.345.235.598,00
	<b>Jumlah</b>	<b>142.960.314.185,00</b>	<b>147.345.235.598,00</b>

**5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Surplus/defisit dari kegiatan operasional terdiri dari:

**Tabel.5.221. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan LO	2.295.161.002.451,03	2.122.894.018.174,56
2	Beban -LO	2.197.742.729.639,47	2.224.317.205.688,50
	<b>Surplus/Defisit Operasional</b>	<b>97.418.272.811,56</b>	<b>(101.423.187.513,94)</b>

**5.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada Kabupaten Lampung Tengah tidak ada realisasi.

#### 5.4.5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa terdiri dari:

**Tabel.5.222. Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Surplus/Defisit Operasional	97.418.272.811,56	(101.423.187.513,94)
2	Surplus/Defisit Non Operasional	-	-
	<b>Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>97.418.272.811,56</b>	<b>(101.423.187.513,94)</b>

#### 5.4.6. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari:

**Tabel.5.223. Pos Luar Biasa**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	15.693.913.480,08	36.551.751.911,00
	<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>15.693.913.480,08</b>	<b>36.551.751.911,00</b>

Beban luar biasa merupakan beban tidak terduga Tahun 2021 sebesar Rp15.693.913.480,08.

#### 5.4.7. Surplus/defisit LO

Surplus/defisit LO terdiri dari:

**Tabel.5.224. Surplus/Defisit LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa	97.418.272.811,56	(101.423.187.513,94)
2	Pos Luar Biasa	(15.693.913.480,08)	(36.551.751.911,00)
	<b>Surplus/defisit LO</b>	<b>81.724.359.331,48</b>	<b>(137.974.939.424,94)</b>

## 5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas Tahun 2021 dan 2020

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di Kas Daerah selama tahun 2021. Penerimaan dan pengeluaran diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran (transitoris). Saldo akhir kas sebesar Rp191.482.441.029,68 terdiri dari:

### 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp294.800.514.882,26 aktivitas operasi terdiri atas:

#### 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.485.885.286.620,19 terdiri dari:

**Tabel 5.225. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	100.691.283.459,70	85.423.990.503,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.075.809.375,00	9.646.781.059,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	7.711.541.564,54	7.231.134.960,48
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.404.583.640,95	76.544.985.405,38
5	Dana Perimbangan	1.664.299.043.383,00	1.625.918.929.774,00
6	Dana Insentif Daerah	9.907.524.000,00	34.625.097.000,00
7	Dana Desa	313.247.583.200,00	310.176.977.000,00
8	Pendapatan Bagi Hasil	104.203.008.649,00	115.682.278.908,33
9	Pendapatan Hibah	8.817.781.348,00	164.969.440.975,00
10	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	150.527.128.000,00	76.467.237,70
	<b>Jumlah</b>	<b>2.485.885.286.620,19</b>	<b>2.430.296.082.822,89</b>

#### 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp2.191.084.771.737,93 terdiri dari:

**Tabel 5.226. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.182.712.688.859,00	1.179.969.542.945,00
2	Belanja Barang dan Jasa	451.814.621.700,70	444.002.558.337,78
3	Belanja Subsidi	141.600.000,00	0,00
4	Belanja Hibah	74.779.677.293,15	127.832.872.390,00
5	Belanja Tak Terduga	15.693.913.480,08	37.695.401.411,00
6	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9.734.373.020,00	7.766.649.980,00
7	Transfer Bantuan Keuangan	456.207.897.385,00	457.522.212.598,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.191.084.771.737,93</b>	<b>2.254.789.237.661,78</b>

### 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini sebesar (Rp359.207.697.156,02). Rincian arus kas ini terdiri dari:

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas ini merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penjualan peralatan dan Mesin yaitu kendaraan dinas roda dua dan roda empat, gedung dan bangunan yaitu Penjualan Bongkaran atas Bangunan;

**Tabel 5.227. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	883.491.798,00
2	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	8.046.010,00	152.684.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.046.010,00</b>	<b>1.036.175.998,00</b>

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal selama Tahun 2021 dari kas daerah terdiri dari:

**Tabel 5.228. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.812.652.966,20	48.621.694.404,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.532.011.364,76	56.129.630.343,15
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	265.962.869.887,06	109.551.116.514,07
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	408.208.948,00	884.715.497,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	9.444.031.942,61
	<b>Jumlah</b>	<b>359.215.743.166,02</b>	<b>224.631.188.700,83</b>

### 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto berkaitan dengan defisit atau pengguna surplus anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2021 sebesar Rp107.418.653.289,00

1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan berasal dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri yaitu dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (PERSERO) di Tahun 2021 sebesar Rp108.640.000.000,00.

2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus keluar kas aktivitas pendanaan merupakan pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri di Tahun 2021 sebesar Rp1.221.346.711,00.

#### 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD. Arus kas bersih aktivitas transitoris tahun 2021 adalah sebesar (Rp279.212.624,80). Rincian arus kas ini terdiri dari.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Merupakan penerimaan atas pungutan BPJS (1%), PPh, PPN, dan Taspen (8%) yang harus disetorkan kepada pihak ketiga sebesar Rp138.089.731.272,00 yang terdiri dari BPJS (1%) sebesar Rp8.767.104.327,00, PPh sebesar Rp49.267.694.438,00, PPN sebesar Rp38.178.139.212,00, dan Taspen (8%) sebesar Rp41.381.573.046,00 dan merupakan pajak yang belum disetor oleh bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp495.220.249,00.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Merupakan pembayaran atas pungutan BPJS (1%), PPh, PPN, dan Taspen (8%) yang harus disetorkan kepada pihak ketiga sebesar Rp138.368.943.896,80 yang terdiri dari BPJS (1%) sebesar Rp8.767.104.327,00, PPh sebesar Rp49.267.694.438,00, PPN sebesar Rp38.178.139.212,00, Taspen (8%) sebesar Rp41.381.573.046,00 dan penyeteroran pajak yang belum disetorkan oleh bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp774.432.873,80.

#### 5.5.5. Kenaikan /Penurunan Kas

Kenaikan /penurunan kas merupakan nilai akumulasi dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.229. Kenaikan/Penurunan Kas**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	294.800.514.882,26	175.506.845.161,11
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(359.207.697.156,02)	(223.595.012.702,83)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	107.418.653.289,00	(3.451.705.420,00)
4	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(279.212.624,80)	774.432.873,8
	<b>Jumlah Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>42.732.258.390,44</b>	<b>(50.765.440.087,92)</b>

### 5.5.6. Saldo Awal Kas

Tabel 5.230. Saldo Awal Kas

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	134.820.060.390,15	181.142.323.755,23
2	Kas di Bendahara pengeluaran	665.754.211,00	-
3	Kas di Bendahara BLUD	1.643.506.221,29	1.302.042.798,93
4	Kas di Bendahara Dana JKN	11.270.459.192,00	8.968.504.972,00
5	Kas di Bendahara Dana BOS	71.190.000,00	8.597.971.450,00
6	Kas Lainnya - Bendahara BOS	774.432.873,80	-
	<b>Jumlah</b>	<b>149.245.402.888,24</b>	<b>200.010.842.976,16</b>

### 5.5.7. Saldo Akhir Kas

Tabel 5.231. Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	146.860.040.289,39	134.820.060.390,15
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	665.754.211,00
3	Kas di Bendahara BLUD	39.131.261.499,29	1.643.506.221,29
4	Kas di Bendahara Dana JKN	5.409.983.241,00	11.270.459.192,00
5	Kas di Bendahara Dana BOS	81.156.000,00	71.190.000,00
6	Kas lainnya	495.220.249,00	774.432.873,80
	<b>Jumlah</b>	<b>191.977.661.278,68</b>	<b>149.245.402.888,24</b>

## 5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penggabungan antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan perubahan ekuitas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 5.6.1. Saldo awal ekuitas tahun 2021 sebesar Rp3.182.319.653.920,60 merupakan saldo akhir tahun 2020;
- 5.6.2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp81.724.359.331,48 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- 5.6.3. Selisih sebesar Rp476.380.704.314,86 dapat dijelaskan sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar. Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp476.380.704.314,86.

**Tabel.5.232. Koreksi Ekuitas Lainnya**

No	Uraian	31 Desember 2021
1	Saldo Awal	84.789.939.866,05
2	Jurnal Balik Selisih Revaluasi Aset Tetap	(73.904.021.000,00)
3	Jurnal Balik LPE 2020	(10.885.918.866,05)
4	Jurnal Penyesuaian Mutasi Tambah Penilaian Tanah dibawah Jalan dengan Penilaian KPKNL, Revaluasi Aset Tetap 2021	439.091.544.000,00
5	Jurnal Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan	4.566.346.125,00
6	Jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	61.923.833.956,00
7	Jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	(69.767.528.684,00)
8	Jurnal Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.329.700.962,00
9	Jurnal Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Software	(159.701.333,00)
10	Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang PDAM Jangka Pendek TA 2021	(15.749.232.997,54)
11	Jurnal Penyesuaian Mutasi Tambah penilaian Bangunan Gedung Plaza Bandar Jaya	49.123.771.000,00
12	Kelebihan Pembayaran Retensi Perkim	(6,00)
13	Jurnal Kelebihan Bayar Pajak Parkir	91,00
14	Jurnal Mencatat Pajak Hotel tahun 2020	24.412.446,00
15	Jurnal Mencatat Penyisihan Piutang Hotel tahun 2020	(2.441.244,60)
	<b>Jumlah</b>	<b>476.380.704.314,86</b>

### 5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang tergambar pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp3.740.424.717.566,94 yang terdiri dari:

**Tabel.5.233. Ekuitas Akhir**

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Ekuitas Awal	3.182.319.653.920,60	3.235.504.653.479,49
2	Surplus/Defisit-LO	81.724.359.331,48	(137.974.939.424,94)
3	Dampak Komulatif Perubahan Kebjaksanaan Mendasar	476.380.704.314,86	84.789.939.866,05
	<b>Jumlah</b>	<b>3.740.424.717.566,94</b>	<b>3.182.319.653.920,60</b>

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

Informasi Non Keuangan

a. **Administrasi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) dan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) dengan Ibu kota di Metro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825), Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Pada Tahun 1999, Ibu kota Kabupaten Lampung Tengah pindah dari Kota Metro ke Gunung Sugih.

b. **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 212 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Maka terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Susunan Perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah sebanyak 26 (dua puluh enam) sudah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Daerah sebanyak 7 (tujuh) dan Kecamatan sebanyak 28 (dua puluh delapan).

Jumlah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 berjumlah 10.200 orang pegawai negeri sipil, yang terdiri atas:

1) Berdasarkan Golongan

**Tabel 6.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No.	Kabupaten	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Lampung Tengah	53	1.648	5.321	3.178	<b>10.200</b>
	Persentase	0,52%	16,16%	52,17%	31,16%	<b>100%</b>

2) Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 6.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Kabupaten	Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Lampung Tengah	4.486	5.714	<b>10.200</b>
	Persentase	43,98%	56,02%	<b>100%</b>

3) Berdasarkan Agama

**Tabel 6.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Agama**

No.	Kabupaten	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	
1.	Lampung Tengah	9.264	199	290	436	11	<b>10.200</b>
	Persentase	90,82%	1,95%	2,84%	4,27%	0,11%	<b>100%</b>

4) Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 6.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No.	Kabupaten	Pendidikan										Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	
1.	Lampung Tengah	44	88	1.634	67	530	1.101	145	6.035	554	2	<b>10.200</b>
	Persentase	0,43%	0,86%	16,02%	0,66%	5,20%	10,79%	1,42%	59,17%	5,43%	0,02%	100%

5) Berdasarkan Pangkat Golongan

**Tabel 6.5 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan**

ESELON	PANGKAT GOLONGAN																JUMLAH
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eselon II-a																1	1
Eselon II-b													2	13	26		41
Eselon III-a												20	35	28			83
Eselon III-b											6	42	83	21			152
Eselon IV-a										89	147	307	59	2			604
Eselon IV-b									17	51	25	25					118
Fungsional Umum		5	13	35	92	231	249	473	451	229	62	55	27	9			1.931
Fungsional Pendidik					6	47	22	18	1067	539	547	601	1.033	1.533	17		5.430
Fungsional Medis					9	3	185	258	240	186	156	225	54	27	4	7	1.347
Fungsional Lain					5		43	7	78	41	37	78	57	116	24	8	493
<b>Jumlah</b>		5	13	35	112	281	499	756	1.853	1.135	980	1.353	1.350	1.749	71	8	10.200

## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab VI dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka memperkuat pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah diantaranya sudah menerapkan pembayaran non tunai dengan batasan sebesar Rp5.000.000,00, sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang kertas maupun logam.

Kas di Kas Daerah pada Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp146.860.040.289,39 dan terdapat pembatasan penggunaan kas di kas daerah sebesar Rp41.036.455.842,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	DAK Fisik	4.858.946.715,00
2	DAK Non Fisik	33.890.755.872,00
3	Dana Non Kapitasi JKN	309.372.188,00
4	Dana Pemulihan Ekonomi Nasional	1.977.381.067,00
<b>Total</b>		<b>41.036.455.842,00</b>

APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh beberapa asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2021. Laporan keuangan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antar komponen laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk memenuhi pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 yang mensyaratkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability & stewardship*), diharapkan laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

